



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA PANGKALAN SATU KECAMATAN
KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NOVPRIDA AULINA PASARIBU

NIM: 018788199

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

VILLAGE FOOD RESILIENCE PROGRAMME FOR RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT IN PANGKALAN SATU VILLAGE KUMAI DISTRICT KOTAWARINGIN BARAT REGENCY

Novprida Aulina Pasaribu²
Indonesia Open University
novprida.map@gmail.com

This study is focused on the evaluation of Village Food Resilience Programme, with aim to know, analyze, and describe the implementation of the Village Food Resilience Programme for community empowerment in rural areas in Pangkalan Village One Kumai District. This study used descriptive qualitative research approach, which aims to gives illustration about the implementation of the Village Food Resilience Programme for community empowerment in Pangkalan Village One, Kumai district, Kotawaringin Barat regency. The results showed that Village Food Resilience Programme in Pangkalan Village One Kumai district has been running well and has been guided by the provisions contained in the Technical Guidance Activities, at every stage starting from the preparation stage, growth, development, and independence in community empowerment. Directly or indirectly, the people have benefited from the program through mentoring efforts, the establishment of public service institutions (TPD and LKD), as well as seed capital PMUK. The Venture Capital funds Strengthening Group (PMUK) which has been managed by LKD Base Village One of the years 2008 to 2013 amounting to Rp. 184 465 000, - used by members of the affinity group as capital to expand its business. Field findings also indicate that the level of understanding of public service institutions that formed is still limited, it is due to lack of training for the managers of these institutions and the lack of coordination of efforts across relevant sectors both at the district and village level. It is advisable to related parties to be more proactive and move again to invite the community and further enhance coordination.

Keywords : Food Security, Poverty, Food Insecurity, Empowerment, Food Resilience

² *MagisterStudent, Public Administration Magister, Indonesia Open University. Email: novprida.map@gmail.com*

ABSTRAK

PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANGKALAN SATU KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Novprida Aulina Pasaribu¹
Universitas Terbuka
novprida.mapa@gmail.com

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan, dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Progsi Demapan) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Progsi Demapan di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai sudah berjalan dengan baik dan sudah berpedoman dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Kegiatan, pada setiap tahapannya mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung masyarakat sudah merasakan manfaat dari program ini melalui upaya pendampingan, pembentukan lembaga layanan masyarakat (TPD dan LKD), serta perguliran dana bantuan PMUK. Adapun dana bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang sudah dikelola oleh LKD Desa Pangkalan Satu dari tahun 2008-2013 sebesar Rp. 184.465.000,- digunakan oleh para anggota kelompok afinitas sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman lembaga layanan masyarakat yang dibentuk masih terbatas, hal ini disebabkan karena minimnya kegiatan pelatihan bagi para pengurus lembaga tersebut serta belum adanya upaya koordinasi lintas sektor terkait baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Maka disarankan kepada pihak terkait agar lebih proaktif lagi untuk mengajak serta menggerakkan masyarakat dan lebih meningkatkan lagi koordinasi.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Rawan Pangan, Pemberdayaan, Kemandirian Pangan

¹Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka. Email *novprida.mapa@gmail.com*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “**PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANGKALAN
SATU KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**”
adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Agustus 2014

g Menyatakan,

METERAI
TEMPEL



4A1D5ACF248346744

ENAM RIBU RUPIAH

6000

EJP

**NOVPRIDA AULINA PASARIBU
NIM. 018788199**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA PANGKALAN SATU KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Penyusun TAPM : **NOVPRIDA AULINA PASARIBU**

NIM : 018788199

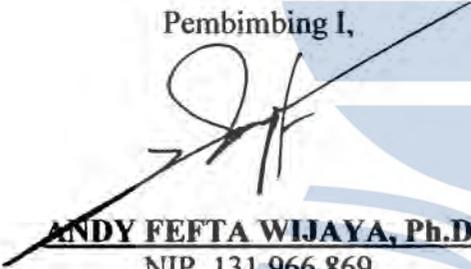
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Agustus 2014

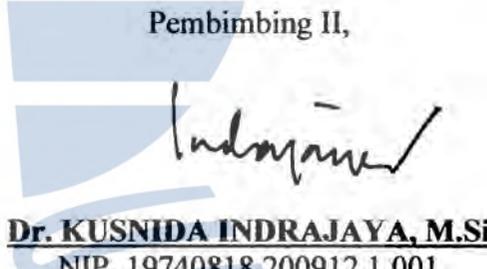
Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


ANDY FEFTA WIJAYA, Ph.D

NIP. 131 966 869


Dr. KUSNIDA INDRAJAYA, M.Si

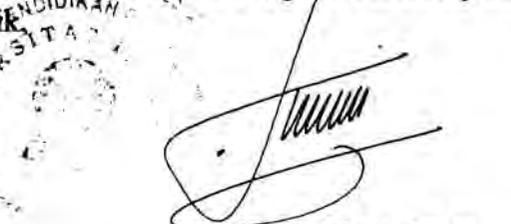
NIP. 19740818 200912 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003


SUCIATI, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **NOVPRIDA AULINA PASARIBU**
NIM : 018788199
Program Studi : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90**
Judul TAPM : **PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
PANGKALAN SATU KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

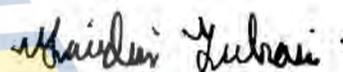
Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Agustus 2014
W a k t u : Pukul 12.20 WIB s.d. 14.20 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM:

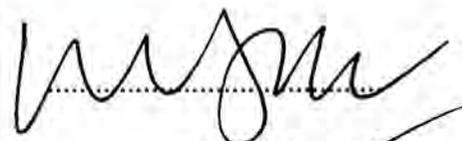
Ketua Komisi Penguji:

Aminuddin Zuhairi, M.Ed., Ph.D.



Penguji Ahli:

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.



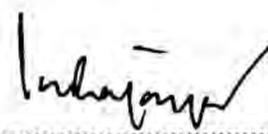
Pembimbing I:

Andy Fefta Wijaya, Ph.D.



Pembimbing II:

Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM/Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan dan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

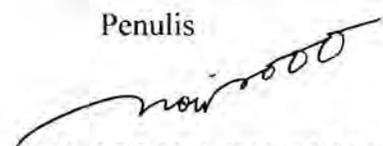
1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Bapak Andy Fefta Wijaya, Ph.D (selaku Pembimbing I) dan Bapak Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si (selaku Pembimbing II) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) Kabupaten Kotawaringin Barat, Ir. Abet Nego, M.Si beserta rekan-rekan KPPKP yang telah banyak memberikan dukungan dan perhatian selama penyusunan TAPM ini;
5. Kedua Orang Tua, Adik-Adik, dan Sahabat saya yang telah memberikan bantuan dukungan moral maupun materiil;

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, Agustus 2014

Penulis


NOVPRIDA AULINA PASARIBU
NIM. 078188199

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori	15
B. Penelitian Terdahulu	51
C. Kerangka Berpikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Desain Penelitian	57
B. Fokus Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian dan Sumber Data	60
D. Instrumen Penelitian	62
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data	65
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Evaluasi Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	70
1. Evaluasi Konteks (<i>Context</i>) Program Aksi Desa Mandiri Pangan	70
2. Evaluasi Input (<i>Input</i>) Program Aksi Desa Mandiri Pangan	85
3. Evaluasi Proses (<i>Process</i>) Program Aksi Desa Mandiri Pangan	93
4. Evaluasi Hasil (<i>Product</i>) Program Aksi Desa Mandiri Pangan	136

B. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Satu sebagai Hasil dari Program Aksi Desa Mandiri Pangan	144
1. Pendampingan	144
2. Peran Kelembagaan Masyarakat	148
3. Pemanfaatan PMUK	158
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	169



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir	56
Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	67
Gambar 4.1. SK Penetapan Pendamping Progsi Demapan	87
Gambar 4.2. Dokumen SK Penetapan TPD Desa Pangkalan Satu	89
Gambar 4.3. Dokumen SK Penetapan LKD Progsi Demapan	89
Gambar 4.4. Anggota kelompok afinitas yang akan meminjam dana PMUK harus membuat RUK terlebih dahulu	92
Gambar 4.5. Verifikasi RUK dilakukan oleh LKD dengan diketahui oleh TPD, setelah itu dana PMUK diberikan kepada anggota kelompok afinitas	92
Gambar 4.6. Dokumen SK Penetapan Desa Penerima Progsi Demapan	94
Gambar 4.7. Dokumen SK Pembentukan Pokja Progsi Demapan	104
Gambar 4.8. Pertemuan rutin kelompok afinitas Karya Sejahtera dilakukan pada tanggal 14 setiap bulannya	108
Gambar 4.9. Kelompok afinitas Karya Sejahtera anggotanya sebagian besar merupakan kaum ibu rumah tangga, pengarahan dalam kelompok ini dilakukan melalui pertemuan rutin oleh pendamping	109
Gambar 4.10. Salah satu jenis usaha <i>off farm</i> anggota kelompok afinitas yaitu pembuatan emping melinjo yang ada di Desa Pangkalan Satu	113
Gambar 4.11. Lahan persawahan di desa Pangkalan Satu yang dikembangkan dengan sistem SRI	115
Gambar 4.12. Terdapat beberapa varietas padi yang diuji coba untuk ditanam di areal persawahan padi di desa Pangkalan Satu dengan menerapkan sistem SRI	115
Gambar 4.13. Subsistem distribusi pangan di desa Pangkalan Satu didukung dengan akses jalan yang kondisinya cukup baik	116
Gambar 4.14. Kelompok wanita anggota kelompok afinitas yang menjadi sasaran penerima manfaat kegiatan P2KPG di desa Pangkalan Satu	118
Gambar 4.15. Sosialisasi kegiatan P2KPG didukung oleh Petugas Pokja Pangan dan Gizi, TPD, dan Pendamping desa mandiri pangan setempat	118
Gambar 4.16. Pemanfaatan lahan pekarangan dalam kegiatan P2KPG berupa demplot kelompok wanita anggota kelompok afinitas di desa Pangkalan Satu	118
Gambar 4.17. Sebagian besar masyarakat desa Pangkalan Satu memiliki mata pencaharian sebagai petani kebun tanaman karet dan kelapa sawit, akses penjualan hasil perkebunan didukung oleh kondisi jalan yang cukup baik	123
Gambar 4.18. Monitoring dari propinsi ke desa Pangkalan Satu untuk meninjau pelaksanaan progsi demapan yang telah memasuki tahap kemandirian pada tahun 2011	133

Gambar 4.19.	Usaha produktif berbasis sumber daya lokal pembuatan emping singkong yang dimiliki oleh anggota kelompok afinitas	139
Gambar 4.20.	Usaha produktif berbasis sumber daya lokal pembuatan emping melinjo yang dimiliki oleh kelompok afinitas	140
Gambar 4.21.	Pembinaan TPD kepada masyarakat kelompok afinitas dilakukan melalui pertemuan rutin kelompok dengan materi pembinaan seputar administrasi pengelolaan dana bantuan PMUK	153



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Model Evaluasi CIPP	23
Tabel 2.2.	Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat	43
Tabel 3.1.	Informan dan Jumlah Informan	61
Tabel 4.1.	Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin	72
Tabel 4.2.	Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Masyarakat Desa Pangkalan Satu Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	73
Tabel 4.3.	Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Kepala Rumahtangga Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin ..	75
Tabel 4.4.	Jenis Lantai Hunian Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	76
Tabel 4.5.	Sumber Air Minum Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	77
Tabel 4.6.	Sumber Penerangan Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	77
Tabel 4.7.	Kepemilikan Lahan Sawah atau Ladang Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	78
Tabel 4.8.	Kepemilikan Ternak Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	78
Tabel 4.9.	Kepemilikan Kendaraan Bermotor Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	79
Tabel 4.10.	Kepemilikan Kendaraan Tak Bermotor Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	79
Tabel 4.11.	Persediaan Makanan Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	80
Tabel 4.12.	Jumlah Rumahtangga yang mengkonsumsi Daging Sapi/ayam/ikan atau telur seminggu yang lalu menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin	81
Tabel 4.13.	Daftar Nama Kelompok dan Jumlah Anggota Afinitas Desa Pangkalan Satu Tahun 2008	86
Tabel 4.14.	Susunan Pengurus Tim Pangan Desa Demapan P.Satu Th.2008	88
Tabel 4.15.	Susunan Pengurus Lembaga Keuangan Desa 'Karya Mandiri' Demapan Pangkalan Satu Tahun 2018	88
Tabel 4.16.	Indikator Input Program Aksi Desa Mandiri Pangan di desa Pangkalan Satu	93
Tabel 4.17.	Nama, Jumlah Kelompok, dan Susunan Pengurus Kelompok Afinitas di Desa Pangkalan Satu	97
Tabel 4.18.	Perkembangan Keuangan Demapan Desa Pangkalan Satu sampai dengan Desember 2013	154

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	169
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian	170
Lampiran 3. Biodata	171



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan merupakan permasalahan lintas sektoral yang dewasa ini muncul sebagai isu nasional seiring dengan merebaknya berbagai kasus rawan pangan di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti di kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2007 yang mengakibatkan 13 balita meninggal dunia dan 4,1 juta jiwa balita di Indonesia pada tahun 2007 menderita gizi buruk. Masalah ketahanan pangan juga dapat di lihat dari terjadinya kelangkaan beberapa komoditas pangan. Masalah ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari subsistem ketersediaan yang terkait dengan upaya peningkatan produksi pangan, subsistem distribusi tentang keberadaan pangan yang merata dan terjangkau di masyarakat, dan subsistem konsumsi tentang kecukupan pangan yang dikonsumsi masyarakat baik dalam jumlah maupun mutunya.

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena :

1. Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang merupakan hak yang paling asasi bagi manusia.
2. Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan dan gizi.
3. Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Undang-Undang No.7 tahun 1996 tentang Pangan mengartikan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Operasionalisasi pelaksanaan PP No. 68 tahun 2002 tersebut pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat pedesaan dengan fokus utamanya adalah rumah tangga pedesaan.

Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Desa merupakan salah satu *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di pedesaan adalah melalui Program Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian.

Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan selama 4 (empat) tahap berturut-turut melalui 4 tahapan pelaksanaan yaitu : tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Tiap tahapan memuat berbagai macam kegiatan dengan waktu pelaksanaan tiap tahapan adalah selama satu tahun. Kegiatan difokuskan di daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang telah ada di tingkat desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat tahun berturut-turut mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian.

Beberapa pendekatan dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan antara lain meliputi : 1) Pemberdayaan masyarakat, merupakan rangkaian proses sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi

sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan perubahan lebih baik untuk mencapai kesejahteraan. Proses ini dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat agar mampu menganalisis kebutuhannya berdasarkan situasi perikehidupan dan masalah-masalahnya. 2) Penguatan kelembagaan, didasarkan pada kebutuhan masyarakat sebagai pelaku, disesuaikan dengan sistem pemerintahan desa atau lembaga yang sudah ada, diarahkan pada upaya merevitalisasi kelembagaan tani yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi kelembagaan pangan sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk pertanian, sebagai sarana belajar efektif bagi petani untuk meningkatkan kemampuan, diarahkan kepada pengembangan kapasitas kerjasama internal maupun kerjasama eksternal dengan kelembagaan lain. Kelembagaan yang ditumbuhkan dan diperkuat melalui kegiatan pemberdayaan antara lain : kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan. 3) Pengembangan sistem ketahanan pangan, terdiri dari subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi.

Sesuai dengan Pedoman Umum Program Desa Mandiri Pangan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: (1) pelatihan; (2) pendampingan; dan (3) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif, kapasitas individu, kapasitas kelembagaan masyarakat, sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan. Sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di perdesaan. Sehingga diharapkan terjadi perubahan dinamika masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di

desanya, serta penumbuhan kelembagaan di desa yang dikelola masyarakat untuk penguatan modal dan sosial.

Melalui fasilitasi pemerintah, kelembagaan dibangun untuk mampu mengoptimalkan input : sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan, melalui : (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem distribusi yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan; dan (3) subsistem konsumsi untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan. Sehingga diharapkan LKD sudah berfungsi sebagai layanan modal; posyandu bersama kader gizi dan PKK sudah aktif; sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan sudah bekerja; serta koordinasi program lintas subsektor dan sektor sudah dirintis untuk rencana pembangunan sarana prasarana perdesaan yang mendukung ketahanan pangan.

Upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai fasilitasi tersebut, memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi subsektor dan lintas sektor, yang diimplementasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Bekerjanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat mencapai output yang diinginkan, antara lain : (1) terbentuknya kelompok-kelompok afinitas; (2) terbentuknya Lembaga Keuangan Desa (LKD); dan (3) tersalurnya dana Bansos untuk usaha produktif. Sehingga diharapkan terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir masyarakat, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

Pendekatan kegiatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin yang terpilih, yang diarahkan untuk mengubah perilaku masyarakat desa agar dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan menolong dirinya sendiri, melalui : (a) Penguatan kelembagaan masyarakat di perdesaan antara lain : meningkatkan kemampuan kelompok afinitas sebagai pelaku dan pengembang usaha produktif, Tim Pangan Desa (TPD) sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai layanan usaha produktif perdesaan; (b) Penguatan sistem ketahanan pangan diarahkan untuk membangun sistem ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi.

Penilaian keberhasilan diutamakan bagi desa-desa yang telah memasuki tahap kemandirian, antara lain dengan menggunakan indikator berikut : a) pemberdayaan masyarakat, meliputi perubahan tingkat kehidupan dan perubahan pola pikir masyarakat; b) penguatan kelembagaan, meliputi dinamika kelompok afinitas, kinerja TPD dalam melaksanakan tugasnya di setiap tahap, dan kinerja LKD; c) pengembangan sistem ketahanan pangan, meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan; d) pengembangan sarana prasarana pedesaan, meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna pedesaan, dan dukungan pembangunan sarana pedesaan.

Desa Pangkalan Satu adalah salah satu desa rawan pangan yang ditetapkan menerima program aksi Desa Mandiri Pangan pada tahun 2008 dengan nomor SK 368/SK/KP.010/IV/2008 tanggal April 2008. Penetapan desa ini sebagai desa

sasaran kegiatan telah sesuai dengan syarat bagi desa penerima program yang tertuang dalam Pedoman Umum Desa Mandiri Pangan, yaitu merupakan desa rawan pangan yang memiliki penduduk lebih dari 30 persen RTM (Rumah Tangga Miskin) berdasarkan Survei DDRT. Survey DDRT merupakan kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga di suatu wilayah untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya dalam rangka mengidentifikasi rumah tangga miskin dan tidak miskin. Berdasarkan survei DDRT yang dilakukan pada tahun 2008, jumlah rumah tangga miskin di Desa Pangkalan Satu sebanyak 36,5 persen.

Desa ini sesuai dengan acuan pada Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Desa Mandiri Pangan tahun 2012 telah memasuki tahap kemandirian, yaitu sudah menjadi desa mandiri pangan dengan indikator yaitu : (1) Dinamika kelompok afinitas meningkat, yang ditandai dari; usaha ekonomi produktif telah mampu meningkatkan daya beli, serta berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, kemudahan akses produksi, dan pemasaran pertanian; (2) Jaringan kemitraan meningkat, yang ditandai munculnya usaha kecil dan usaha mikro perdesaan di bidang pangan dan non pangan, tumbuhnya Gapoktan yang mandiri, dan berfungsinya LKD sebagai layanan modal; (3) Pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dari aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman serta berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (4) TPD telah berfungsi/mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan di desa,

yang ditandai dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha tani melalui program/kegiatan lintas subsektor dan sektor yang berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya; (5) Sistem ketahanan pangan telah bekerja, yang ditandai dengan ketersediaan dan kecukupan pangan, jaminan distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu, tingkat harga pangan yang stabil sesuai mekanisme pasar, serta jaminan konsumsi pangan yang cukup, bergizi, beragam, seimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga.

Kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, belum pernah dilakukan suatu kajian evaluasi mengenai bagaimana tingkat keberhasilan program ini bagi masyarakat kelompok sasaran kegiatan program aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Selama ini kegiatan evaluasi yang dilakukan baru sebatas untuk mengetahui bagaimana perkembangan dana bansos Penguatan Modal Usaha (PMUK) yang dimanfaatkan oleh para anggota kelompok afinitas di desa tersebut. Padahal point utama program aksi desa mandiri pangan adalah bagaimana mewujudkan Desa Pangkalan Satu menjadi salah satu desa mandiri pangan melalui pendekatan upaya pemberdayaan masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan analisis kebijakan publik, evaluasi merupakan salah satu tahap penting dalam melakukan suatu analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari

kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

Program aksi Desa Mandiri Pangan pada hakekatnya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menekankan penerapan pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat dan aparat di tingkat lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan program aksi desa mandiri pangan mengutamakan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola masyarakat secara langsung dalam wadah kelembagaan-kelembagaan lokal yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal baik di desa, kecamatan dan tingkatan di atasnya.

Problematika yang terjadi saat ini di Desa Pangkalan Satu, yang menjadi temuan awal peneliti yaitu bahwa kelembagaan yang ada di program Demapan di desa Pangkalan Satu tidak bekerja secara optimal. Sesuai dengan acuan kegiatan dalam Pedoman Teknis Program Desa Mandiri Pangan, LKD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas yang berfungsi untuk

mengelola dana Bansos, simpanan modal/tabungan masyarakat, dan layanan permodalan RTM khususnya dan masyarakat desa umumnya untuk pengembangan usaha produktif. Dana Bansos yang dalam program ini disebut sebagai dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah dana yang dikelola oleh LKD yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas sebagai modal usaha produktif masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya di Desa Pangkalan Satu, LKD sebagai lembaga layanan keuangan sudah terbentuk, tetapi belum berfungsi sebagai lembaga yang mengatur keuangan. Keuangan masih dipegang oleh pengurus kelompok afinitas. Selain itu, kegiatan rapat pertanggungjawaban keuangan LKD juga tidak dilaksanakan secara rutin setiap akhir tahun. Adanya kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu dalam pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan output yang diharapkan dari program Demapan.

Persoalan lainnya dalam pelaksanaan program Demapan di Desa Pangkalan Satu dilihat dari sisi Tim Pangan Desa (TPD), lembaga ini sudah terbentuk tetapi perannya juga belum berfungsi secara optimal dimana pada tahap kemandirian perannya adalah melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat menggantikan fungsi Pendamping. Sesuai dengan Pedoman Teknis program Demapan sebagai acuan kegiatan, TPD merupakan lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di perdesaan, dengan keanggotaan terdiri dari : aparat desa, tokoh masyarakat, perwakilan tokoh dari kelompok afinitas, penggerak PKK, dan Penyuluh. TPD pada desa mandiri pangan diharapkan telah berfungsi/mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan di desa, yang ditandai dengan

pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha tani melalui program/kegiatan lintas subsektor dan sektor yang berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya. Dalam pelaksanaannya di Desa Pangkalan Satu tidak demikian, peran TPD dalam pendampingan masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan desa masih belum efektif. Alih-alih sebagai penggerak program/kegiatan, untuk kegiatan di internal lembaga TPD saja belum berjalan secara maksimal dimana hal ini dapat terlihat dari tidak adanya jadwal pertemuan baik secara berkala maupun kontemporer baik pertemuan internal antar anggota TPD maupun pertemuan dengan kelompok-kelompok afinitas yang ada.

Problematika pelaksanaan program Demapan di Desa Pangkalan Satu juga terjadi pada sisi pendampingan. Sesuai dengan Pedoman Teknis program Demapan, dalam rangka mendukung pendayagunaan bantuan modal usaha dan pembangunan prasarana perdesaan disiapkan penyediaan tenaga yang bertugas mendampingi kelompok masyarakat agar menjadi suatu masyarakat dalam kebersamaan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan. Pendamping bertugas sebagai pemandu (fasilitator), penghubung (komunikator), penggerak (dinamisator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan usaha kelompok. Proses pendampingan ini dilaksanakan pada tahap persiapan hingga tahun keempat pada tahap kemandirian. Pelaksanaan program Demapan di desa Pangkalan Satu dilihat dari sisi pendampingan, petugas pendamping sama sekali sudah tidak berhubungan dengan anggota kelompok afinitas, tugas lanjutannya diserahkan kepada pendamping kabupaten. Sementara pendamping kabupaten memiliki cakupan tugas yang sangat luas, yaitu

mendampingi seluruh desa penerima program Demapan, tidak fokus hanya pada satu desa saja. Padahal pendampingan merupakan bagian yang sangat berkaitan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam program aksi desa mandiri pangan upaya pendampingan perlu dilakukan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok afinitas yang meliputi : a) menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat, b) membantu masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan dan mencari mitra usaha, c) membantu penyuluh pertanian lapangan dalam penerapan teknologi spesifik lokasi dan pengolahan hasil.

Problematika lainnya, pertemuan kelompok-kelompok afinitas rutin dilaksanakan, namun kegiatan pertemuan kelompok tersebut hanya berupa kegiatan simpan pinjam dana PMUK, tanpa ada upaya pendampingan yang terarah. Sesuai dengan acuan kegiatan desa mandiri pangan yang telah memasuki tahap kemandirian fungsi pendamping digantikan oleh Tim Pangan Desa. Namun yang terjadi di Desa Pangkalan Satu TPD yang ada tidak berperan aktif, sehingga untuk materi pertemuan kurang beragam, padahal sejatinya dalam pertemuan tersebut banyak hal yang bisa didiskusikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi-kondisi aktual di atas mengindikasikan bahwa pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di Desa Pangkalan Satu belum berjalan secara maksimal, terlebih lagi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan jelas jika membandingkan antara kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan dengan indikator keberhasilan yang semestinya dicapai untuk terwujudnya desa mandiri pangan yang tertuang dalam Pedoman Teknis Program

Aksi Desa Mandiri Pangan yang menjadi acuan kegiatan tersebut. Atas dasar hal tersebut maka peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui secara lebih spesifik kemudian melakukan analisis bagaimana pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di Desa Pangkalan Satu serta bagaimana pelaksanaan program ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat ?
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai hasil dari Program Aksi Desa Mandiri Pangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menganalisis pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai hasil dari Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

D. Manfaat Penelitian

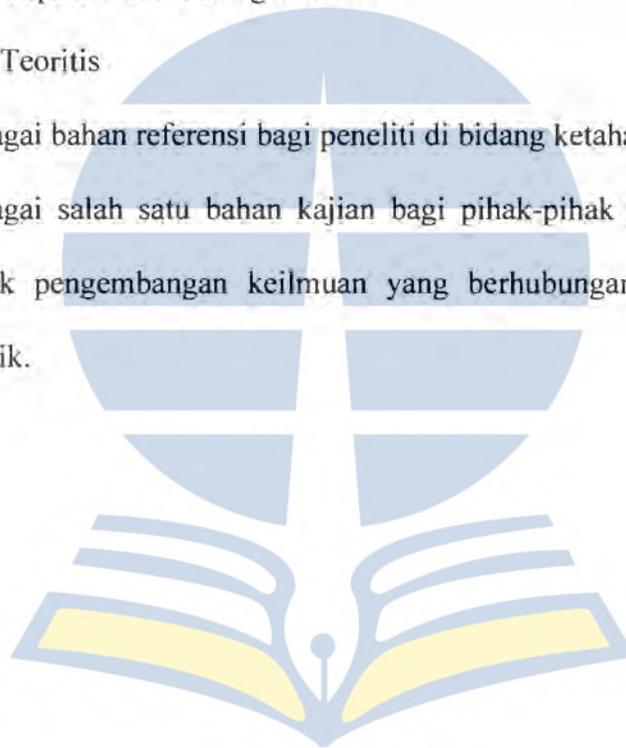
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis maupun teoritis. Manfaat praktis dan teoritis dalam penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Sebagai bahan masukan dalam perencanaan kebijakan ketahanan pangan di kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan referensi bagi peneliti di bidang ketahanan pangan.
- 2) Sebagai salah satu bahan kajian bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan kebijakan publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

a. Evaluasi

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai (Suharso, 2005). Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1989). Istilah Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan *penaksiran* (appraisal), *pemberian angka* (rating) dan *penilaian* (assesment). Menurut William Dunn (2003), suatu evaluasi mempunyai katakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu : fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai.

- 1) **Fokus nilai.** Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) **Interdependensi fakta – nilai.** Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang

maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat, haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

- 3) **Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.** Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (*ex-ante*).
- 4) **Dualitas Nilai.** Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada.

Menurut Sondang Siagian (1970) istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu : "Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai". Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakekat dari penilaian itu adalah :

- a. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan dengan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.

- b. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan : Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? Korektifitas yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya , melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan- penyelewengan itu terjadi.

Jika ini telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan tidak terulang, sehingga dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat *performance* yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar, atau paling tidak, inefisiensi yang semakin berkurang.

- c. Penilaian bersifat *prescriptive*. Sesuatu yang bersifat *prescriptive* adalah yang bersifat “mengobati”. Setelah melalui ditemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkinnya penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan “resep” untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu agar penyakit yang sama tidak timbul kembali, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya “penyakit” yang baru.
- d. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang berdiri

sendiri dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Malahan sesungguhnya kelima fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain.

Menurut Peneliti evaluasi adalah proses membandingkan antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana kegiatan dari suatu sasaran evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

b. Tujuan Evaluasi

Menurut Sudjana (2006), terdapat enam hal tujuan evaluasi, yaitu untuk :

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program.
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program.
3. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program.
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program.
5. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar (2004) menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus

diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hal tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.

Husein Kosasih (2004) mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk : (1) memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, (2) memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, (3) memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

c. Evaluasi Program

1. Pengertian Program

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila program dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program memiliki 3 unsur penting yaitu :

1. Program adalah realisasi dan implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

2. Pengertian Evaluasi Program

Ralp Tyler dalam Suharsimi (2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) mendefinisikan evaluasi program sebagai upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sementara Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2004) menyatakan evaluasi program merupakan proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang dibakukan. Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

3. Tujuan Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program menurut Beni Setiawan (1999) adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sudjana (2006), beberapa tujuan khusus evaluasi program yaitu :

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program.
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program.
3. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program.
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program.
5. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

4. Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP merupakan salah satu dari beberapa teknik evaluasi suatu program yang ada. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1971 dengan berlandaskan pada keempat dimensi yaitu dimensi *context*, dimensi *input*, dimensi *process*, dan dimensi *product*. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan *judgment* mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi.

Menurut Stake, Stufflebeam, dan Alkin dalam Suharsimi (2007) evaluasi berfokus pada empat aspek, yaitu :

a. Konteks / *Context* (C)

Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

b. Input / *Input* (I)

Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Misalnya pada evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan, pertanyaan yang diajukan antara lain : (1) apakah proses metode pemberdayaan yang diberikan memberikan dampak jelas pada perubahan pola pikir masyarakat penerima program? ; (2) bagaimana respon masyarakat terhadap metode pemberdayaan yang diberikan dalam program aksi Demapan?

c. Proses / *Process* (P)

Evaluasi proses untuk membantu mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekapan atau

arsip prosedur yang telah terjadi. Stufflebeam dalam Arikunto (2004) mengusulkan pertanyaan untuk proses antara lain : (1) apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? ; (2) apakah yang terlibat dalam pelaksanaan program sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung? ; (3) apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?; (4) hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program?

d. Produk / *Product* (P)

Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan antara lain : (1) apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? ; (2) apakah kebutuhan masyarakat peserta program sudah dapat dipenuhi selama program aksi Demapan dilaksanakan?

Keempat hal tersebut di atas merupakan sasaran evaluasi yang merupakan komponen dari sebuah proses sebuah program kegiatan. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

Tabel 2.1. Model CIPP

Aspek Evaluasi	Tipe Keputusan	Jenis Pertanyaan
Context evaluation	Keputusan yang terencana	Apa yang harus dilakukan ?
Input evaluation	Keputusan terstruktur	Bagaimana kita melaksanakannya?
Process evaluation	Keputusan implementasi	Apakah yang dikerjakan sesuai rencana?
Product evaluation	Keputusan yang telah disusun ulang	Apakah berhasil?

Sumber : *The CIPP approach to evaluation* (Bernadtte Robinson, 2002)

Empat aspek Model Evaluasi CIPP membantu pengambil keputusan untuk menjawab empat pertanyaan dasar mengenai :

1. Apa yang harus dilakukan: mengumpulkan dan menganalisa *need assessment* data untuk menentukan tujuan, prioritas dan sasaran.
2. Bagaimana kita melaksanakannya: sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dan mungkin meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan informasi.
3. Apakah dikerjakan sesuai rencana : menyediakan pengambilan keputusan informasi tentang seberapa baik program diterapkan. Dengan terus-menerus memonitoring program, pengambil keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang timbul, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan penganggaran.
4. Apakah berhasil : dengan mengukur *outcome* dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambil keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

e. Kajian Program Aksi Desa Mandiri Pangan

1. Latar Belakang (Pedoman Teknis Desa Mandiri Pangan Tahun 2012)

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program yang diberi nama Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan). Hal tersebut merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Program Aksi Demapan merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan karena masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut mulai dari usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai akhirnya pada pelestarian kegiatan tersebut. Pelaksanaan Program Aksi Demapan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2. Tujuan (Pedoman Teknis Desa Mandiri Pangan Tahun 2012)

Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan) bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.

3. Sasaran (Pedoman Teknis Desa Mandiri Pangan Tahun 2012)

Sasaran kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan) adalah rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.

4. Prinsip-Prinsip Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Pedoman Teknis Desa Mandiri Pangan 2012)

Desentralisasi, pemerintah menyerahkan wewenang penuh kepada masyarakat untuk mengelola dana yang ada dalam Program Aksi Demapan dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut serta mempertanggungjawabkan pengelolaannya.

Transparansi (keterbukaan), pengelolaan seluruh kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan) dilakukan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh semua pelaku Program Aksi Desa Mandiri Pangan (demapan) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Partisipasi, pengertian partisipasi dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan Demapan. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dana PMUK dalam Demapan di desa melalui forum pertemuan berkala dalam kelompok masyarakat sasaran (Kelompok Afinitas (KA), Tim Pangan Desa (TPD), dan Lembaga Keuangan Desa (LKD)).

Swadaya, adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Swadaya ini bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana dalam bentuk tabungan maupun materiil untuk pelaksanaan serta pemeliharaan kegiatan yang diusulkan.

Perguliran, dana yang disediakan dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Demapan) berupa dana untuk Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), yang disalurkan kepada kelompok merupakan pinjaman yang harus dikembalikan.

Sanksi adalah hukum terhadap pelanggaran kesepakatan dan peraturan yang dibuat dalam Program Aksi Demapan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan Demapan, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

Pelestarian, masyarakat bertanggung jawab terhadap kesinambungan setiap usulan kegiatan yang diusulkan dan ditetapkan oleh forum TPD dan LKD untuk mendapatkan dana PMUK. Seluruh hasil kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Segala keputusan yang menyangkut pengembangan atau pelestarian kegiatan harus disepakati dalam musyawarah desa.

5. Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis (Pedoman Teknis Desa Mandiri Pangan Tahun 2012)

Untuk dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan agar hasil kegiatan bermutu baik serta guna mendukung fasilitas masyarakat, Program Aksi Demapan menyediakan bantuan pendampingan di setiap tahap kegiatan mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Tugas pendamping yaitu : (1) menyusun rencana kerja pendampingan, (2) menumbuhkan dan mengembangkan kelompok-kelompok afinitas, (3) mengembangkan dinamika

kelompok afinitas, (4) membina kelompok-kelompok afinitas dalam merencanakan usaha produktif, (5) menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan TPD dan kelompok-kelompok afinitas.

6. Sumber dan Alokasi Dana Program Aksi Demapan (Pedoman Teknis Desa Mandiri Pangan Tahun 2012)

a) Sumber dan Alokasi Dana Program Aksi Demapan

Pendanaan untuk kegiatan Demapan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana APBN untuk Kementerian Pertanian disalurkan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan kelompok atau swadaya masyarakat dalam kegiatan. Untuk desa Pangkalan Satu alokasi dana APBN selama 4 tahun pelaksanaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan waktu tertentu sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang diajukan.

7. Cara Kerja Program Aksi Demapan (Pedoman Teknis Desa Mandiri Pangan Tahun 2012)

Program Aksi Demapan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian

pangan rumah tangga dan masyarakat melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, dilaksanakan pada tahun pertama kegiatan Demapan, dengan kegiatan mempersiapkan aparat pelaksana dan masyarakat melalui : selaksi lokasi sasaran, pendampingan, pembentukan TPD, penumbuhan LKD, sosialisasi kegiatan, penyusunan data dasar desa, penetapan kelompok, pelatihan-pelatihan, pemberdayaan kelompok afinitas, penyusunan rencana pembangunan wilayah desa (RPWD), penyaluran Bansos.
2. Tahapan penumbuhan, dengan kegiatan diantaranya : pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan dukungan pengembangan sarana dan prasarana.
3. Tahap pengembangan, dilaksanakan untuk : penguatan dan pengembangan dinamika serta usaha produktif kelompok afinitas, serta pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usaha tani, dan lainnya. Pada tahap ini sudah terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir msyarakat, peningkatan keterampilan, dan pengetahuan masyarakat.
4. Tahap kemandirian, yang ditandai dengan : (a) adanya perubahan pola pikir, aktivitas, dan perbaikan usaha kelompok afinitas; (b) adanya perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; (c) berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (d) berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi, dan pemasaran pertanian; (e) bekerjanya sistem ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan

dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang, aman sampai tingkat rumah tangga.

f. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Robert Dahl (1983), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara menurut Korten (1992), pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Robert Dahl (1983) pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal

maupun nasional. Oleh sebab itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan proses yang menyangkut hubungan kekuasaan-kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Menurut Talcot Parsons dalam Priyono (1996), *power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Priyono, 1996). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994).

Kieffer (1984) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, yaitu :

- a. Perkembangan konsep diri yang lebih positif.

- b. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis.
- c. Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Grand theories dari konsep *empowerment* (pemberdayaan) ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga yang dikuasai, ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan (Priyono, 1996).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Menurut Kartasasmita (1996) dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu : *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. *Ketiga*, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta

eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Drijver dan Sajise dalam Sutrisno (2005) mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan, merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

5. Keuntungan sosial dan ekonomi, merupakan bagian dari program pengelolaan. Pihak *stakeholder* akan menerima keuntungan dari partisipasi dalam perencanaan sebuah daerah.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat menurut Sutrisno (2005) adalah :

1. Mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan.
2. Menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan.
3. Memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan.
4. Mengurangi ketergantungan.
5. Membagi kekuasaan dan tanggung jawab.
6. Meningkatkan tingkat keberlanjutan.

3. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2006) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Proses-proses pemberdayaan menurut Soetomo (2006) adalah sebagai berikut:

1) *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2) *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, spiritual, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3) *Identifying the local leader*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu faktor pemimpin setempat harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4) *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5) *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6) *Helping people to identify their most pressing problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

7) *Fostering self-confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

8) *Deciding on a program action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program tersebut perlu ditetapkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

9) *Recognition of strength and resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

10) *Helping people to continue to work on solving their problems*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

11) *Increasing people's ability for self-help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu

menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara (Kartasasmita, 1995), yaitu :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Di sini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan usaha untuk membangun potensi (*daya*) itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah.

Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

4. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wahab dkk (2002) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu :

1. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
2. *The development approach* pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

3. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Sedangkan Ross (1987) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu :

1. Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat *the single function* adalah program atau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program ini sangat asing bagi mereka sehingga inovasi prakarsa masyarakat tidak berkembang.
2. Pola pendekatan *the multiple approach* dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.
3. Pola pendekatan *the inner resources approach* sebagai pola yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Sedangkan menurut Suharto (1997), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu :

1. **Pemungkinan** : menciptakan suasana atau iklim yang meningkatkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan** : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. **Perlindungan** : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan** : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tabel 2.2.
Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat

Tahapan Afektif	Tahapan Kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai keterampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran

kesadaran dan kepedulian			dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber : Sulistiyani, 2004

6. Elemen-elemen Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan atau pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai proses pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- 1) Mendahulukan kepentingan umum, yaitu porsi dan tingkat kesiapan individu mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat (yang terlihat dari kedermawanan, kemanusiaan, individu, pengorbanan personal, kebanggaan masyarakat, saling mendukung, setia, peduli, persahabatan, persaudaraan).
- 2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilai khususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikan kepentingan anggota dalam masyarakat.
- 3) Layanan masyarakat, yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan), yang dipelihara secara berkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitas dan layanan.
- 4) Komunikasi dalam masyarakat, dan diantara masyarakat dengan pihak luar. Komunikasi termasuk jalan, metode elektronika (seperti telpon, radio, TV, internet), media cetak (koran, majalah, buku), jaringan kerja, bahasa yang

dapat saling dimengerti, kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasi secara umum.

- 5) Percaya diri, meskipun percaya diri diekspresikan secara individual, namun seberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan di antara semua masyarakat? Misalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapan, sikap positif, keinginan, motivasi diri, antusiasme, optimisme, mandiri, keinginan untuk memperjuangkan haknya, menghindari sikap masa bodoh dan pasrah, dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai.
- 6) Keterkaitan (politis dan administratif), suatu lingkungan yang mendukung penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, hukum dan legislatif) dan elemen administratif (sikap dari pegawai dan teknisi sipil, sebaik peraturan dan prosedur pemerintah), dan lingkungan hukum.
- 7) Informasi, kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran.
- 8) Rintangan, pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan, pelatihan manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) apakah ditujukan pada perkuatan masyarakat? Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkan tingkat ketergantungan dan kelemahan masyarakat, atau menantang masyarakat untuk bertindak menjadi lebih kuat? Dan apakah rintangan ini bersifat berkelanjutan atau tergantung pada sepanjang

pengambilan keputusan oleh pendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda dari masyarakat itu sendiri?

- 9) Kepemimpinan, pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Pemimpin yang paling efektif dan berkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat, memiliki kedudukan dan penentu kebijakan. Pemimpin harus memiliki keahlian, kemauan, kejujuran dan beberapa karisma.
- 10) Jaringan kerja, tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahui. Apakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahui orang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakan sumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secara keseluruhan? Serta memanfaatkan hubungan, potensi dan kebenaran, dalam masyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat.
- 11) Organisasi, adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu, melainkan hingga integritas organisasi, struktur, prosedur, pengambilan keputusan, proses, efektivitas, divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi.
- 12) Kekuatan politik, tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan daerah dan nasional. Namun sebagai individu yang memiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional.
- 13) Keahlian, kemampuan (kemampuan teknis, kemampuan manajemen, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan oleh

individu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga mereka mampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan.

- 14) Kepercayaan, tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat terhadap sesamanya, khususnya pemimpin dan abdi masyarakat, yang merupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, transparansi, asas kepercayaan) dalam masyarakat.
- 15) Keselarasan, pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusun masyarakat, meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan (agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), tingkat toleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu dan lainnya dan keinginan untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama, suatu rasa kesamaan tujuan atau visi, perataan nilai.
- 16) Kekayaan, tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumber daya aktual, dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan bermanfaat, keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerja, tanah, peralatan, persediaan, pengetahuan, keahlian).

Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas, semakin kuat masyarakat, semakin besar kemampuan yang dimilikinya, dan semakin berdaya mereka.

g. Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk

kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan itu berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang ikut dalam proses perubahan tersebut.

Kemandirian dapat tercipta dari sebuah masyarakat yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Pembelajaran masyarakat pertama-tama harus difokuskan pada usaha melepaskan seseorang dari realitas yang menghambat eksistensi, yaitu hambatan yang berupa ketidaksederajatan, tekanan, dan penindasan dari pihak luar yang merasa lebih berpengetahuan, berpangkat, berjabatan dan lain sebagainya.

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan resiko langsung (*stakeholder*) akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik.

Pemberdayaan harus berperan untuk mewujudkan konsep masyarakat belajar atau *Concept of Societal Learning* dan caranya adalah dengan mempertemukan *top down approach* dengan *bottom up*. Masyarakat belajar (*Learning Society*) yang aktif melakukan aksi ini dengan sendirinya akan terbangun kapasitasnya karena *learning society* secara inheren akan mengembangkan kapasitas komunitas (*Community Capacity Building*). Secara empirik banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah memasuki fase *Learning Society* akan lebih

berpotensi untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang lebih berkelanjutan, karena mereka sudah lebih mandiri dalam berbagai hal mulai dari mengidentifikasi, menilai dan memformulasikan masalah baik fisik, sosial, kultural maupun ekonomi, membangun visi dan aspirasi, memprioritaskan intervensi, merencana, mengelola, memonitor, bahkan memilih teknologi yang tepat. Masyarakat yang aktif semacam ini juga menghasilkan kerelaan masyarakat yang lebih untuk memberi kontribusi kerja dan biaya pembangunan, operasi dan perawatan sedemikian sehingga mampu mengembalikan biaya investasi publik yang pada gilirannya akan menjadi lebih berkemungkinan terjadinya pengulangan.

Langkah-langkah riil yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

1) Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang

Dua hal yang mendasar dalam membentuk iklim ini adalah :

- Menyadarkan masyarakat dan memberikan motivasi untuk berkembang
Proses menyadarkan masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participary analysis*.
- Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah.

2) Memperkuat potensi yang ada

Dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangunan, yang selanjutnya dikembangkan dengan

memberikan masukan/input serta membuka berbagai peluang yang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya.

3) Proses perlindungan (pendampingan)

Secara aplikatif *empowerment* dilakukan melalui 2 (dua) hal yaitu :

- Penguatan akses, dilakukan melalui menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok pemberdaya.
- Penguatan teknis dilakukan sebagai bagian dari kegiatan advokasi sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan.

h. Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Proses pemberdayaan masyarakat dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilakukan melalui : (1) pelatihan; (2) pendampingan; dan (3) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif, kapasitas individu, kapasitas kelembagaan masyarakat, sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan. Sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di perdesaan. Sehingga diharapkan terjadi perubahan dinamika masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di desanya, serta penumbuhan kelembagaan di desa yang dikelola masyarakat untuk penguatan modal dan sosial.

Pendekatan kegiatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin yang terpilih, yang diarahkan untuk mengubah perilaku masyarakat desa agar

dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan menolong dirinya sendiri, melalui :

- a. Penguatan kelembagaan masyarakat di perdesaan antara lain meningkatkan kemampuan kelompok afinitas sebagai pelaku dan pengembang usaha produktif, TPD sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan LKD sebagai layanan usaha produktif perdesaan.
- b. Penguatan sistem ketahanan pangan diarahkan untuk membangun sistem ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi.

B. Penelitian Terdahulu

Haryadi (2011) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Pangkalpinang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manfaat atau hasil program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama, tingkat keberhasilannya, dan efektifitas program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman program, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan terhadap implementasi program menyebabkan buruknya tata kelola program. Sehingga berdasarkan hasil analisis secara umum pelaksanaan program tidak dapat tercapai. Terlihat bahwa program yang dijalankan hanya mengejar target. Tidak ada data pasti tentang keberhasilan

program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka.

Akhmad Rizky (2011) melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Bidang Ekonomi dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan bidang ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan bidang ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sisir menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Namun dalam menanggulangi kemiskinan PNPM hanya bisa mengurangi sebesar 12% pada tahun 2010 dari tahun 2007. Hal ini mengindikasikan bahwa PNPM kurang berhasil dalam menanggulangi kemiskinan.

Ardike Ari Santi (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh Pemerintah Kota Blitar”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi dan perkembangan UKM di Kota Blitar serta faktor-faktor apa saja yang menghambat dan menunjang pemberdayaan UKM pada Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara makro pemberdayaan UKM di Kota Blitar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Beberapa penghargaan atas peningkatan dan pengembangan ekonomi rakyat kecil diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa prioritas, strategi, sasaran, dan tujuan yang diandalkan sebagai modal

membangun masyarakat dan mewujudkan ekonomi berbasis UKM yang mandiri dan tangguh berhasil diwujudkan.

Abdur Rohim (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang berdampak pada lini sosial-budaya maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa adanya desa wisata berawal dari gagasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, kemudian mendapatkan respon positif dari para penggerak lokal masyarakat. Keberhasilan Desa Wisata Bejiharjo memang tidak terlepas dari upaya pemerintah setempat membangunkan tidur panjang masyarakat untuk menggali potensi wisata, kegigihan penggerak desa wisata yang pantang menyerah atas cercaan pihak yang tidak mendukung, ditambah pula stimulan dana dari program PNPM Mandiri Pariwisata dan instansi lainnya. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pihak pengelola Desa Wisata Bejiharjo diterapkan dalam bidang atraksi, akomodasi, penyiapan SDM yaitu a) pertemuan/serasehan, b) pendampingan, c) bantuan modal, d) pembangunan sarana dan prasarana, e) pembentukan organisasi desa wisata, f) kerja bakti, g) pemasaran. Kegiatan pemberdayaan tersebut telah memberikan dampak sosial-budaya, ekonomi kepada masyarakat Desa Wisata Bejiharjo.

James Erik Siagian (2007) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan sarana sosial dasar, sarana ekonomi, dan penyediaan lapangan pekerjaan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis model logit. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan adanya program penyediaan sarana sosial dasar sebesar 7 kali lebih besar dibandingkan tanpa adanya program penyediaan sarana sosial dasar. Demikian juga dengan variabel penyediaan sarana ekonomi mempunyai kemungkinan sebesar 14 kali berhasil mengentaskan kemiskinan, serta variabel lapangan kerja mempunyai kemungkinan sebesar 24 kali berhasil mengentaskan kemiskinan dibandingkan tanpa adanya program penyediaan lapangan kerja di Kecamatan Pantai Labu.

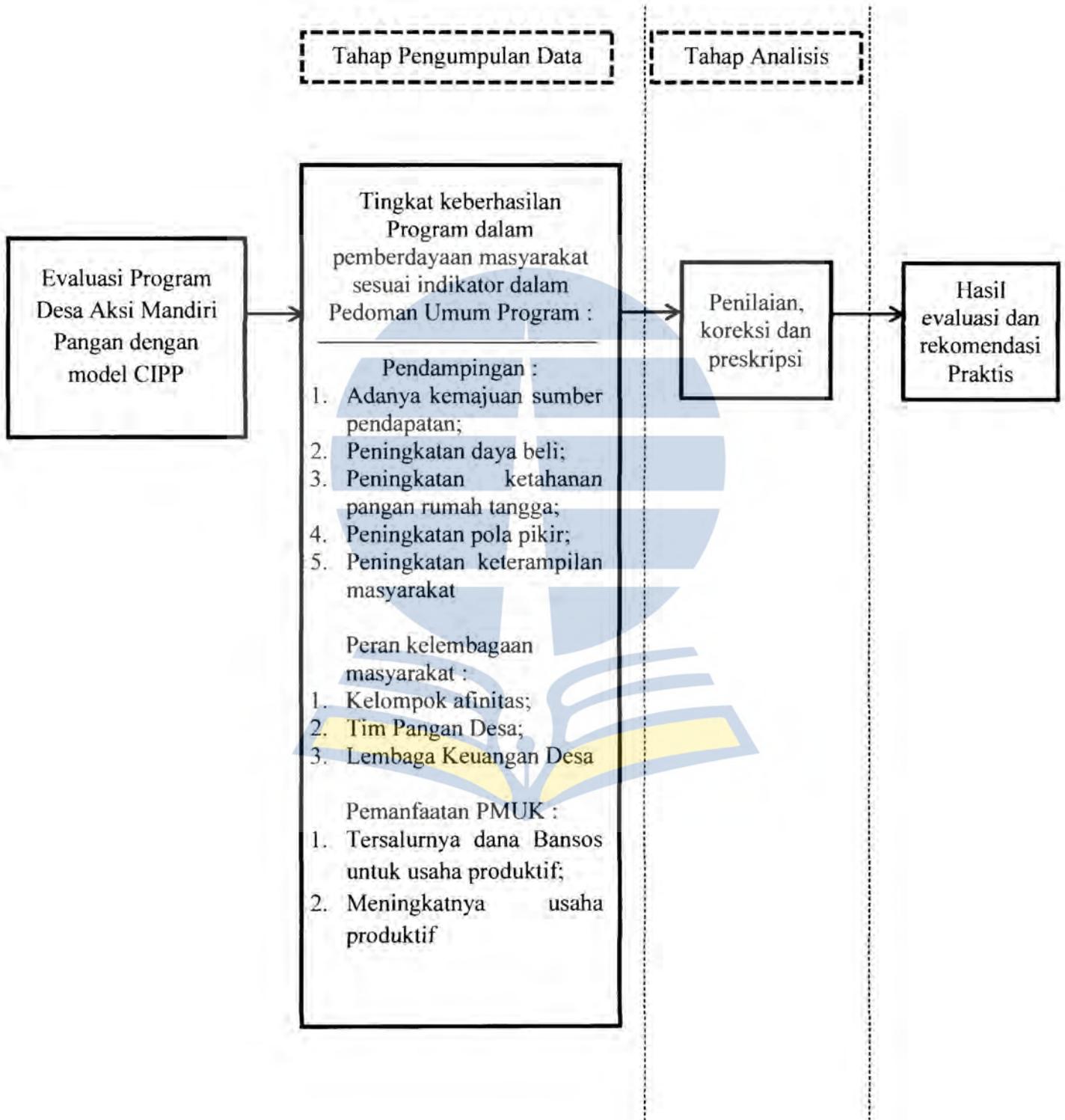
Agus Mulyono (2008) melakukan penelitian berjudul “Studi Partisipasi Masyarakat pada Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat terkait dengan keberadaan program desa mandiri pangan tahap persiapan dan penumbuhan di Desa Munthuk, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Yang menggunakan beberapa tahapan setelah data terkumpul, yang meliputi tahapan reduksi data dan penyajian data sebelum dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan berada

pada tingkatan *partnerhip* sesuai dengan tingkatan partisipasi Arstein dimana partisipasi mendapat tempat dan apresiasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dukungan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Masyarakat merasa bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pelibatan masyarakat sangat besar serta ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas di dalamnya antara masyarakat dan pemerintah serta tidak ada intervensi terlalu jauh dari pemerintah serta tidak dimungkinkan adanya keputusan sepihak.



C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1.
Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2007) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine Marshal dalam Jonathan Sarwono, 2006). Penelitian kualitatif ingin mengungkapkan atau menjawab tentang pertanyaan atau bagaimana sifat suatu hal atau obyek yang diamati untuk kemudian dihasilkan hipotesis dan analisis secara deskriptif (Wisadirama, 2005).

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan-tindakan, serta data tambahan seperti dokumentasi (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2000). Menurut Usman (2008) penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti yang lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali dengan responden). Analisis data kualitatif deskriptif menekankan pada proses, bersifat

induktif, dan setiap kejadian memiliki makna yang esensial (Bogdan dan Biklen, 1998).

Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif. Tujuan penelitian dengan pendekatan deskriptif menurut Koentjaraningrat (1991) adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan suatu frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya suatu hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendapatkan informasi sesuai dengan fenomena yang ada dengan cara mengamati, memahami apa yang dikatakan oleh informan, mendengarkan, dan kemudian melaporkan dalam sebuah hasil yang sistematis. Dengan metode kualitatif deskriptif hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pemberdayaan masyarakat pada program aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pusat perhatian dari apa yang akan diteliti guna mendapatkan data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang ditetapkan. Penetapan fokus penelitian sangat penting bagi suatu penelitian karena dapat mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang diteliti.

Adapun fokus penelitian ini mencakup :

- 1) Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - a) Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam hal *context (C)* / konteks.
 - b) Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam hal *input (I)* / input.
 - c) Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam hal *process (P)* / proses.
 - d) Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam hal *product (P)* / hasil.
- 2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai hasil dari Program Aksi Desa Mandiri Pangan.
 - a) Pendampingan
 - (1) Adanya kemajuan sumber pendapatan
 - (2) Peningkatan daya beli
 - (3) Peningkatan ketahanan pangan rumah tangga
 - (4) Peningkatan pola pikir
 - (5) Peningkatan keterampilan masyarakat
 - b) Peran Kelembagaan Masyarakat
 - (1) Kelompok afinitas
 - (2) Tim Pangan Desa
 - (3) Lembaga Keuangan Desa

c) Pemanfaatan PMUK

- (1) Tersaluranya dana bansos untuk usaha produktif
- (2) Meningkatnya usaha produktif

C. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu bahwa desa ini telah melaksanakan program aksi desa mandiri pangan sejak tahun 2008 sehingga pada tahun 2012 desa ini telah memasuki tahap kemandirian. Tahap kemandirian merupakan tahap akhir dalam program aksi Desa Mandiri Pangan sehingga perlu dilakukan suatu kajian evaluasi bagaimana pelaksanaan program tersebut di Desa Pangkalan Satu. Program aksi desa mandiri pangan di Desa Pangkalan Satu merupakan program yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan masyarakat dan sampai saat ini belum pernah dilakukan kajian evaluasi sejauh mana program aksi desa mandiri pangan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Satu. Pemilihan lokasi juga didasarkan oleh hasil observasi awal peneliti yang menemukan isu-isu permasalahan seperti yang telah dikemukakan di depan. Pertimbangan lain berhubungan dengan aksesibilitas dan kedekatan peneliti yang relatif besar terhadap lokasi penelitian dan substansi penelitian sehingga memudahkan proses penelitian.

2. Sumber Data

a) Informan

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Bungin (2006) teknik *purposive sampling* digunakan pada penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Penentuan sampel atau informan dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat dan tahu mengenai program aksi desa mandiri pangan. Informan dalam penelitian ini adalah aparat kabupaten yang membidangi ketahanan pangan dan menangani program aksi demapan, pendamping, TPD, LKD, kepala desa, dan masyarakat anggota kelompok afinitas yang menjadi sasaran kegiatan. Untuk memperoleh informasi maka wawancara mendalam akan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Jumlah informan atau tokoh kunci (*key persons*) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Informan dan Jumlah Informan

No.	Informan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Aparat Kabupaten	2	
2.	Pendamping	1	
3.	TPD	3	
4.	LKD	3	
5.	Masyarakat/kelompok afinitas	6	
6.	Kepala Desa	1	Kades Pangkalan Satu
	JUMLAH	16	

b) Dokumen

Data dokumen dalam penelitian ini meliputi Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2011 yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, Laporan Evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di

Kabupaten Kotawaringin Barat mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 yang berisi laporan perkembangan dana bansos PMUK setiap tahunnya. Dalam penelitian ini juga terkumpul Database Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013 yang berisi keterangan mengenai jumlah kelompok afinitas, nama-nama anggota kelompok afinitas, susunan keanggotaan LKD dan TPD, SK penetapan Desa Pangkalan Satu sebagai desa mandiri pangan, SK pendamping, serta laporan hasil analisis survey DDRT.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (1996), yang menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berinteraksi dengan segala stimulasi dari lingkungan yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh baik dengan cara menafsirkan maupun memberikan hipotesis dan arah pengamatan. Sedangkan instrumen tambahan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara langsung dengan informan atau responden. Pedoman wawancara memuat berbagai pertanyaan substansi yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Instrumen tambahan lainnya yaitu catatan lapangan yang berisi pokok-pokok informasi di lapangan yang bisa dikembangkan, serta alat bantu lain yaitu kamera dan *tape recorder*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Marzuki (2002), informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yang terdiri dari :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*), dimana tanya jawab dilakukan secara bebas namun terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun dalam bentuk pedoman wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap topik yang ditentukan. Pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Desa Pangkalan Satu, untuk informan dari kelompok afinitas, anggota TPD dan LKD serta Kepala Desa pada hari dan tempat yang terpisah atau masing-masing. Wawancara dengan pendamping dilakukan di Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) Kab. Kotawaringin Barat yaitu ketika pendamping menyampaikan laporan berkala ke seksi ketahanan pangan yang membidangi program Demapan.

b) Pengamatan Lapangan (Observasi Lapangan)

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data mengenai gambaran umum pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan dalam pemberdayaan masyarakat, tahapan/proses dalam pelaksanaan program, manfaat bagi masyarakat kelompok sasaran program, pelaku dan penggerak program, serta hasil dari pelaksanaan program. Observasi pada penelitian ini dilakukan dalam berbagai kesempatan yang berbeda, yaitu pengamatan pada kondisi informan secara individual / kunjungan rumah, serta pengamatan saat kegiatan pertemuan rutin kelompok-kelompok afinitas berlangsung.

2. Data Sekunder

Menurut Soeprapto (2011), dalam penelitian kualitatif selain menggunakan metode wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*), dimungkinkan pula bagi peneliti untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lain yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data ini disebut sebagai data sekunder. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia dan berguna untuk menunjang analisis data primer. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Laporan Akhir Tahun Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Laporan Database Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten

Kotawaringin Barat, Laporan analisis DDRT Desa Pangkalan Satu tahun 2008, serta peraturan yang menjadi acuan kegiatan yaitu Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan yang ada di lokasi penelitian, foto-foto dokumentasi, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam Soeprapto (2011) ada tiga komponen yang harus diperhatikan dalam melakukan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif tersebut, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama di lapangan. Tahap reduksi dimaksudkan sebagai tahap pengurangan atau tahap seleksi data yang telah diperoleh peneliti dengan tujuan sebagai proses penyempurnaan data. Reduksi data dilakukan untuk memisahkan data mana yang relevan dan dibutuhkan serta data mana yang tidak relevan dan tidak dibutuhkan sehingga data-data tersebut nantinya menjadi lebih fokus terhadap tujuan penelitian. Data-data

yang diperoleh di lapangan oleh peneliti di reduksi dengan cara pembuatan ringkasan, penelusuran tema, dan penulisan memo. Reduksi data dilakukan terus menerus selama kegiatan penelitian berlangsung sampai laporan akhir menjadi tersusun secara lengkap.

b. Penyajian data

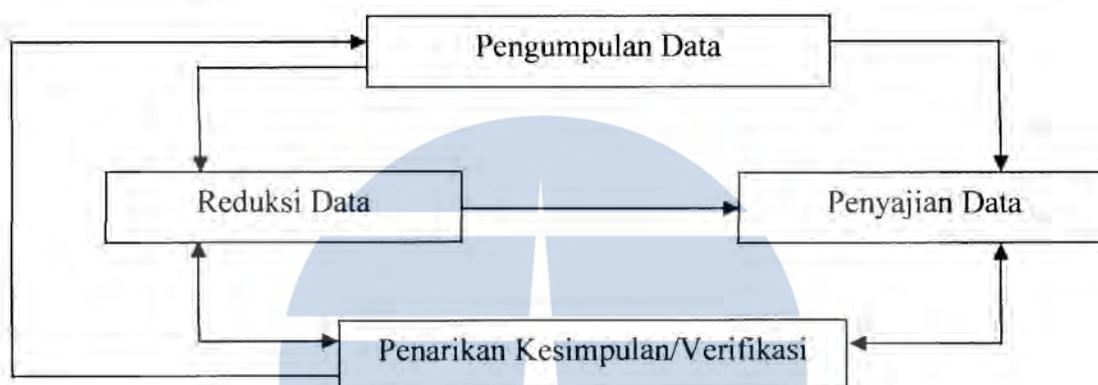
Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Informasi disusun dengan merancang deretan dan kolom-kolom dalam bentuk matriks, gambar, skema, atau tabel dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian sehingga didapatkan kumpulan sejumlah data yang siap untuk dianalisis serta diinterpretasi untuk menuju pada kesimpulan-kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir yang dilakukan setelah seluruh proses analisis data telah selesai dilakukan, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan mencari pola, tema, keteraturan, penjelasan, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat *tentatif*, kemudian dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain setiap kesimpulan

senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

Ketiga komponen analisis data di atas yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif seperti dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini.



Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
(menurut Miles dan Huberman, 1994)

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan acuan kegiatan yaitu Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan, setelah 4 tahun berjalannya program sejak tahun 2008 maka pada tahun 2011 desa Pangkalan Satu telah memasuki tahap kemandirian. Desa yang telah memasuki tahap kemandirian ditandai dengan adanya perubahan pola pikir, aktivitas, dan perbaikan usaha kelompok afinitas; adanya perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; berfungsinya cadangan pangan masyarakat; berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi dan pemasaran pertanian; bekerjanya sistem ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga.

Upaya melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di Desa Pangkalan Satu selama ini telah dilakukan secara rutin, yaitu melalui Evaluasi Akhir Tahun Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan oleh Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun yang menjadi fokus evaluasi tersebut hanya sebatas memantau perkembangan bantuan sosial saja yaitu dana PMUK. Sementara penilaian aspek keberhasilan program ini adalah bagaimana pelaksanaan program ini dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan desa mandiri pangan.

Penelitian ini mencoba mengevaluasi program aksi desa mandiri pangan dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pangkalan Satu. Sesuai dengan pendapat Arikunto (2013) penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian. Sebagaimana telah disebutkan pada bab 2 pada penelitian ini peneliti menggunakan model CIPP (*context, input, process, product*) untuk melakukan evaluasi program aksi desa mandiri pangan dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pangkalan Satu. Alasan peneliti menggunakan model CIPP dalam melakukan evaluasi adalah karena keunikan model CIPP itu sendiri. Keunikan model CIPP adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat keputusan (*decision*) yang menyangkut perencanaan dan operasional program. Keuntungan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap *context, input, process* dan *product*.

Pertimbangan lainnya yaitu bahwa model evaluasi CIPP berhubungan dengan sistem pendidikan dan layanan sosial. Tujuan evaluasi yang paling penting adalah bukan untuk membuktikan namun untuk meningkatkan. CIPP memandang evaluasi sebagai suatu alat yang digunakan untuk membantu membuat program berjalan secara lebih baik untuk orang-orang yang ingin mereka layani. Dalam kaitannya dengan program aksi desa mandiri pangan, sebagai proyek pendidikan, kegiatan utama desa mandiri pangan adalah memfasilitasi agar terjadi pembelajaran bagi masyarakat desa sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka berubah menjadi lebih baik. Dengan adanya perubahan perilaku

tersebut maka diharapkan masyarakat desa akan mempunyai kapasitas untuk menangkap berbagai peluang yang ada di sekitarnya dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Evaluasi Konteks (*Context*) Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Gambaran Umum Desa Pangkalan Satu

Desa Pangkalan Satu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Kumai, terletak pada 111 BT dan 261 LS yang merupakan desa ekstrasmigrasi dengan penduduk mayoritas suku Jawa. Luas wilayah Desa Pangkalan Satu \pm 1.822 Ha yang terdiri dari : tanah pekarangan (116 Ha), kebun plasma kelapa sawit (666 Ha), kebun kelapa sawit rakyat (406 Ha), kebun karet rakyat (244 Ha), lahan sawah tadah hujan (75 Ha), ladang/huma (17 Ha), lain-lain/hutan (298 Ha). Wilayah Desa Pangkalan Satu terbagi menjadi 2 wilayah dusun, yaitu wilayah dusun I yang membawahi RT. 01 sampai dengan RT. 08, dan wilayah dusun II yang membawahi RT. 09 sampai dengan RT. 15.

Desa Pangkalan Satu secara geografis wilayahnya berbatasan sebelah utara dengan Desa Bumi Harjo, sebelah selatan dan Timur dengan Kelurahan Kumai Hulu dan Sebelah Barat dengan Desa Natai Raya. Sedangkan jarak desa ke ibukota kecamatan 39 km dengan waktu tempuh 1 jam dan jarak ke ibu kota kabupaten berkisar 21 km.

Penduduk Desa Pangkalan Satu sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sebagian lahan digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan (72 %). Tanah di desa Pangkalan Satu merupakan tanah lempung berpasir dan merupakan lahan marginal (sub optimal). Sedangkan lahan sawah tadah hujan hanya berkisar 4,1 %, merupakan lahan sawah yang digunakan para petani untuk menanam padi sawah.

Identifikasi calon lokasi desa mandiri pangan tahun 2008 atas dasar data Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan data Food Insecurity Atlas (FIA). Identifikasi tahun 2007 dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai dan Kecamatan Pangkalan Lada dan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 24 Maret 2007. Dari hasil identifikasi tersebut diketahui bahwa desa Pangkalan Satu termasuk dikategorikan sebagai desa rawan pangan. Desa ini kemudian ditetapkan sebagai desa penerima program aksi desa mandiri pangan tahun 2008 melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 191.1/SK/KP.010/II/2008 tentang Penetapan Desa Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 29 Pebruari 2008.

Selanjutnya desa Pangkalan Satu dicacah dengan metode survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT). Survey ini dilakukan pada tahun pertama / tahun persiapan yaitu tahun 2008. Tujuan survey DDRT adalah untuk mengetahui berbagai potensi dan gambaran karakteristik rumah tangga yang ada di desa Pangkalan Satu. *Output* yang diperoleh dari kegiatan sensus ini meliputi daftar rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin, karakteristik, status sosial, pengeluaran rumah tangga, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, dan pola konsumsi pangan rumah tangga. Survey DDRT dilakukan dengan mendata

seluruh rumah tangga yang ada di desa bersangkutan, dalam hal ini yaitu Desa Pangkalan Satu. Pelaksanaan pencacahan DDRT dilakukan pada tanggal 03 Maret sampai dengan 11 April 2008. Analisis DDRT sebagai salah satu langkah awal dalam program aksi desa pandiri pangan merupakan salah satu tahap penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Soetomo (1996) bahwa salah satu proses yang perlu dilakukan yaitu dengan mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, spiritual, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

Analisis DDRT meliputi 6 aspek penilaian yaitu kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, ekonomi, dan karakteristik konsumsi. Hasil analisis dari data DDRT dari aspek kependudukan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin

Jumlah Anggota RT	Status Rumah Tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase		
1	49	16,7	34	20,1	83	17,9
2	88	29,9	43	25,4	131	28,3
3	98	33,3	48	28,4	146	31,5
4	36	12,2	19	11,2	55	11,9
5	14	4,8	12	7,1	26	5,6
6	9	3,1	10	5,9	19	4,1
7			2	1,2	2	0,4
8			1	0,6	1	0,2
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa Kepala Rumah Tangga dengan jumlah anggota keluarga terbesar yaitu 7-8 orang sebanyak 3 KK (0,65%) dan ini terdapat pada keluarga dengan status miskin. Sedangkan KK dengan tanggungan 1-2 orang merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 214 orang (46,22%). Dari jumlah tersebut sebagian besar (29,59%) berada pada kelompok tidak miskin. Dari sejumlah kepala rumah tangga tersebut (463 KK) kelompok tidak miskin memiliki tanggungan lebih banyak yaitu sebanyak 294 orang (63,5%) sedangkan kelompok miskin berjumlah 169 orang (36,5%).

Berdasarkan data kependudukan tersebut dapat dinyatakan bahwa secara konteks, program aksi desa mandiri pangan di Desa Pangkalan Satu sudah tepat sasaran. Sesuai dengan Pedoman Teknis kegiatan, desa yang menjadi sasaran program ini disyaratkan terdapat jumlah penduduk miskin setidaknya 30% dari jumlah penduduk. Sementara jumlah penduduk miskin di Desa Pangkalan Satu pada tahun 2008 terdapat sebanyak 169 orang (36,5%).

Hasil analisis dari data DDRT dari aspek pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Masyarakat Desa Pangkalan Satu Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin

Pendidikan KRT	Status Rumah Tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase		
Tidak Tamat SD	39	13,54	61	34,86	100	21,6
SD dan sederajat	151	52,43	70	40,00	221	47,7
SLTP dan sederajat	53	18,40	21	12,00	74	16,0
SLTA dan sederajat	42	14,58	23	13,14	65	14,0
Diploma I-III	1	0,35			1	0,2
Diploma IV/S1/S2/S3	2	0,70			2	0,4
Total	288	100	175	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Tingkat pendidikan tertinggi masyarakat Desa Pangkalan Satu adalah D.IV/S-1 dan pendidikan terendah SD/ sederajat bahkan ada yang tidak tamat SD. Sebagian besar (47,7%) tingkat pendidikan masyarakatnya tamat SD/ sederajat dan hanya sebagian kecil (14,6%) tamat SLTA/ Sederajat, D-III dan S-1. Sedangkan Kepala Rumah Tangga yang tidak tamat SD/ sederajat menempati urutan kedua terbesar (34,86%). Pendidikan tertinggi (D-III dan S-1) hanya berada pada Kepala Rumah Tangga dengan status rumah tangga tidak miskin. Hal ini wajar karena seyogyanya Kepala Rumah Tangga yang tidak miskin mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari tabel 4.2 terlihat bahwa Kepala Rumah Tangga yang tidak tamat SD/ sederajat, kepala rumah tangga dengan status rumah tangga miskin proporsinya lebih besar dibanding kepala rumah tangga dengan status rumah tangga tidak miskin dengan perbandingan 34,86% berbanding 13,54%.

Salah satu indikator kemiskinan adalah rumah tangga dengan pendidikan kepala rumah tangga tidak pernah sekolah atau belum tamat sekolah dasar dan lapangan pekerjaannya bertani. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan Jafar Hafsah (2008), bahwa di pedesaan kemiskinan itu digambarkan sebagai akibat pendidikan yang kurang memadai sehingga pola penentuan pekerjaannya pun akan terbatas pula, misalnya sebagai buruh tani, yang hanya mengandalkan kekuatan fisik bukan keterampilan, yang didapat dari nilai pendidikan. Pengelompokan ini didasari atas kelemahan dari pendapatan rumahtangga apabila tingkat pendidikan kepala rumah tangga rendah dan dengan lapangan pekerjaan sebagai petani sangatlah rawan dengan kemiskinan.

Hasil analisis dari data DDRT dari aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3. Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Kepala Rumahtangga Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin

Lapangan Pekerjaan KRT	Status Rumah Tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase (%)
	Jumlah (Org)	Persentase (%)	Jumlah (Org)	Persentase (%)		
Lainnya	78	26,5	34	20,1	112	24,2
Pertanian	132	44,9	100	59,2	232	50,1
Pertambangan dan penggalian	53	18,0	18	10,7	71	15,3
Industri/kerajinan	2	0,7	2	1,2	4	0,9
Konstruksi/bangunan	10	3,4	3	2,4	14	3,0
Perdagangan	9	3,1	2	1,2	11	2,4
Angkutan, pergudangan	1	0,3			1	0,2
Jasa-jasa	6	2,0	2	1,2	8	1,7
Tidak bekerja	3	1,0	7	4,1	10	2,2
Total	294	100	169		463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Sebagian besar (50,10%) lapangan usaha (pekerjaan) Kepala Rumah Tangga adalah di sektor pertanian. Di urutan kedua adalah lapangan usaha lainnya (buruh perkebunan sawit), sedangkan terkecil (0,10%) adalah di sektor angkutan (ojek).

Hasil analisis dari data DDRT dari aspek perumahan ditinjau dari 3 indikator yaitu jenis lantai hunian, sumber air minum, dan sumber penerangan, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4. Jenis Lantai Hunian Menurut Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin

Lantai Hunian	Status Rumah Tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin			
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase
Marmmer/keramik	9	3,1	3	1,8	12	2,6
Ubin (tegel)	6	2,0			6	1,3
Plaster semen/pasang bata	201	68,4	89	52,7	290	62,6
Kayu papan	15	5,1	6	3,6	21	4,5
Bambu			1	0,6	1	0,2
Tanah	62	21,1	70	41,4	132	28,5
Lainnya	1	0,3			1	0,2
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jenis lantai hunian yang ada di Desa Pangkalan Satu bervariasi dari jenis keramik sampai tidak memiliki lapisan (tanah). Jenis lantai hunian terbesar 201 atau 62,6% adalah plaster semen/pasangan bata. Dari jenis lantai hunian yang menggunakan plaster semen/batu bata, 201 KRT atau 69,31 berada pada kelompok tidak miskin sedangkan sisanya 89 KRT atau 30,69% pada kelompok miskin. Sedangkan urutan kedua terbesar menggunakan lantai tanah yaitu sebesar 132 atau 28,5 %. Dari jumlah kelompok yang menggunakan jenis lantai tanah, 70 KRT (53,03%) berada pada KRT dengan status rumah tangga miskin sedangkan sisanya 46,97% berada dalam kelompok KRT miskin.

Tabel 4.5. Sumber Air Minum Menurut Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin

Sumber Air Minum	Status Rumah Tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin			
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase
Pompa	2	0,7	1	0,6	3	0,6
Sumur terlindung	241	82,0	131	77,5	372	80,3
Sumur tak terlindung	29	9,9	27	16,0	56	12,1
Mata air terlindung			2	1,2	2	0,4
Mata air tak terlindung	1	0,3	2	1,2	3	0,6
Air sungai	21	7,1	5	3,0	26	5,6
Lainnya			1	0,6	1	0,2
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Sumber air minum masyarakat Desa Pangkalan Satu berasal dari berbagai sumber. Sumber air minum terbesar adalah sumur (92,40%) baik sumur dengan jenis sumur terlindung maupun sumur tak terlindung.

Tabel 4.6. Sumber Penerangan Menurut Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin

Sumber Penerangan	Status Rumah Tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin			
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase
Listrik PLN	293	99,7	165	97,6	458	98,9
Sentir / pelita	1	0,3	4	2,4	5	1,1
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Sumber penerangan rumahtangga berasal dari listrik dan sentir/pelita. Sumber penerangan terbesar berasal dari listrik PLN (98,90%) dan sisanya (1,20%) berasal dari jenis penerangan sentir/pelita.

Hasil analisis dari data DDRT dari aspek karakteristik ekonomi ditinjau dari kepemilikan aset (bergerak maupun tidak bergerak) yaitu luas lahan/sawah/ladang/kebun, kepemilikan ternak, kendaraan bermotor

(motor/mobil), kendaraan tidak bermotor (sepeda/sampan) dan kasur/tempat tidur yang dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 4.7. Kepemilikan Lahan Sawah atau Ladang Menurut Kelompok Rumah tangga Miskin dan Tidak Miskin

Luas lahan yang dimiliki (Ha)	Status rumah tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase		
0	128	43,5	66	39,1	194	41,9
0,5	118	40,1	86	50,9	204	44,1
1,0	31	10,5	15	8,9	46	9,9
1,25	13	4,4	1	0,6	14	3,0
1,5	2	0,7			2	0,4
2,0	2	0,7			2	0,4
2,25			1	0,6	1	0,2
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Secara umum masyarakat Desa Pangkalan Satu memiliki lahan 2 ha (program pemerintah untuk transmigrasi dibagi 2 ha per KK) . Luas lahan berupa sawah, ladang ataupun kebun bervariasi antara 0,5 ha sampai 2,25 ha bahkan ada yang tidak memiliki lahan. Kepala rumah tangga yang memiliki lahan seluas 0,5 ha berjumlah 195 krt (44,10%) dan ini merupakan kelompok terbesar. Sedangkan yang memiliki luas lahan 2,25 ha berjumlah 1 krt (0,2%) dan ini terdapat pada rumah tangga dengan status miskin.

Tabel 4.8. Kepemilikan Ternak Menurut Kelompok Rumah tangga Miskin dan Tidak Miskin

Kepemilikan Ternak	Status rumah tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase		
Tidak memiliki	177	60,2	113	66,9	290	62,6
Memiliki	117	39,8	56	33,1	173	37,4
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Kepemilikan ternak yang dimasukkan dalam analisis adalah ternak jenis sapi/kerbau, kambing, domba, dan ayam. Sebagian besar 290 krt (62,60%) masyarakat Pangkalan Satu tidak memiliki ternak dan sisanya 173 krt (37,40%) memiliki ternak. Dari 173 krt yang memiliki ternak, 117 krt (67,63%) diantaranya dimiliki krt tidak miskin dan 56 krt (32,47%) dimiliki krt miskin.

Tabel 4.9. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Menurut Kelompok Rumah tangga Miskin dan Tidak Miskin

Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Status rumah tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase		
Tidak memiliki	126	42,9	118	69,8	244	52,7
Memiliki	168	57,1	51	30,2	219	47,3
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Sebagian besar (52,70%) masyarakat Pangkalan Satu tidak memiliki kendaraan bermotor. Dari jumlah tersebut, yang terbanyak dari kelompok rumah tangga tidak miskin yaitu sebesar 126 krt (51,64%) dan sisanya 118 krt (48,36%) kelompok miskin. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 294 krt dengan status tidak miskin 51,10% atau 168 krt memiliki kendaraan bermotor. Sementara dari kelompok kepala rumah tangga dengan status miskin 69,80% tidak memiliki kendaraan bermotor dan sisanya 30,20% memiliki kendaraan bermotor.

Tabel 4.10. Kepemilikan Kendaraan Tak Bermotor Menurut Kelompok Rumah tangga Miskin dan Tidak Miskin

Kepemilikan Kendaraan Tak Bermotor	Status rumah tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase		
Tidak memiliki	97	33,0	67	39,6	164	35,4
Memiliki	197	67,0	102	60,4	299	64,6
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Kepemilikan sepeda, sampan atau kendaraan tak bermotor lainnya sebagian besar memiliki yaitu 64,60%. Sedangkan yang tidak memiliki 35,40%. Dari kelompok tidak miskin sebagian besar (67,00%) memiliki, sedangkan kelompok miskin sebesar 60,40%. Sementara krt yang tidak memiliki kendaraan tak bermotor, dari kelompok tidak miskin sebesar 33,0% sedangkan kelompok miskin sebesar 39,60%.

Hasil analisis dari data DDRT dari aspek karakteristik konsumsi ditinjau dari persediaan makanan, konsumsi daging/ayam/ikan atau telur, dan membeli pakaian yang dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 4.11. Persediaan Makanan Menurut Kelompok Rumah tangga Miskin dan Tidak Miskin

Persediaan Makanan	Status rumah tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase		
Tidak ada persediaan	35	11,9	83	49,1	118	25,5
Ada persediaan	259	88,1	86	50,9	345	74,5
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Kepala rumah tangga memiliki persediaan makanan untuk seminggu sebanyak 74,50% memiliki dan 25,5 % tidak memiliki. Dari jumlah krt yang memiliki persediaan makanan, 75,07% (259 krt) berada pada kelompok rumah tangga tidak miskin dan 24,93% (86 krt) berada pada krt miskin. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari kelompok rumah tangga tidak miskin 88,10% memiliki persediaan makanan sedangkan 11,9 % tidak memiliki persediaan makanan. Sedangkan dari kelompok rumah tangga miskin, 50,90% memiliki persediaan makanan dan 49,10% tidak memiliki persediaan makanan.

Tabel 4.12. Jumlah Rumah Tangga yang mengkonsumsi Daging Sapi/ayam/Ikan atau Telur Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin

Kriteria	Status rumah tangga				Total	
	Tidak Miskin		Miskin		Jumlah (Org)	Persentase
	Jumlah (Org)	Persentase	Jumlah (Org)	Persentase		
Tidak mengkonsumsi	36	12,2	116	68,6	152	32,8
Mengkonsumsi	258	87,8	53	31,4	311	67,2
Total	294	100	169	100	463	100

Sumber : Analisis DDRT Desa P. Satu, 2008

Sebanyak 152 krt (32,80%) tidak mengkonsumsi daging/ayam/ikan atau telur, mereka hanya mengkonsumsi/makan dengan lauk tahu/tempe atau sayuran. Sebaliknya 311 krt (67,20%) mengkonsumsi daging/ayam/ikan atau telur selama seminggu sebelum dilakukan pencacahan. Kelompok krt yang mengkonsumsi daging/ayam/ikan atau telur dengan status rumah tangga tidak miskin berjumlah 258 krt (87,80%) sedangkan yang tidak mengkonsumsi 36 krt (12,2%). Sementara dari krt miskin, kelompok yang mengkonsumsi daging/ayam/ikan atau telur berjumlah 53 krt (31,40%) dan yang tidak mengkonsumsi 116 orang (68,60%). Dari tabel di atas terlihat bahwa kelompok krt dengan status tidak miskin lebih banyak (258 krt atau 82,96%) mengkonsumsi daging/ayam/ikan atau telur dibandingkan kelompok krt dengan status miskin (53 krt atau 17,04 %). Sebaliknya kelompok krt dengan status miskin lebih banyak (116 krt atau 76,32 %) tidak mengkonsumsi daging/ayam/ikan atau telur dibandingkan kelompok krt dengan status tidak miskin (36 krt atau 23,68%).

Lima Indikator Kemiskinan

a) Indikator 1

Rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumahtangga tidak pernah sekolah atau belum tamat sekolah dasar (SD) dan lapangan pekerjaannya bertani. Pengelompokan ini didasari atas kelemahan dari pendapatan rumahtangga apabila tingkat pendidikan kepala rumahtangga rendah dan dengan lapangan pekerjaan sebagai petani sangatlah rawan terhadap kemiskinan, maka ditetapkan sebagai indikator 1, dengan kode 1 (satu).

b) Indikator 2

Pengelompokan rumah tangga ini didasari atas ketidakmampuan rumahtangga dari sudut ekonomi yaitu, apabila rumahtangga dalam satu minggu terakhir tidak mengkonsumsi daging/ayam/telur/ikan selama satu minggu yang lalu dan juga tidak mempunyai persediaan bahan makanan pokok. Di dalam kelompok ini juga dikelompokkan berdasarkan ketidakmampuan rumahtangga untuk membeli paling sedikit satu stel pakaian selama satu tahun yang lalu atau di dalam rumah tangga ini terdapat anak usia sekolah 7 – 15 tahun yang tidak bisa sekolah, maka dikategorikan sebagai indikator 2.

c) Indikator 3

Rumah tangga dengan melihat kepemilikan aset dijadikan sebagai ukuran sederhana dari kemampuan cadangan rumah tangga di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan dapat dijadikan sebagai modal usaha rumahtangga. Apabila rumahtangga tidak mempunyai motor/mobil/perahu motor atau kendaraan bermotor dan juga tidak memiliki

sepeda/sampan atau kendaraan motor lainnya dan juga tidak memiliki kasur/tempat tidur dan tidak memiliki hewan ternak, maka rumahtangga tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki aset berharga yang dapat dijual sewaktu-waktu untuk membeli bahan makanan dan dikategorikan sebagai indikator 3. Di dalam kelompok faktor ini ditambahkan juga pada rumahtangga yang tidak memiliki lahan/ladang untuk berkebun kurang dari 0,05 Ha dan bahkan tidak memiliki lahan untuk bertani.

d) Indikator 4

Dari kondisi dan fasilitas rumah tinggal yang diperhatikan adalah luas perkapita tempat tinggal apabila kurang dari 8,1 meter persegi atau kondisi tempat tinggal dengan lantai tanah dan sumber air minum selain dari pada leding, pompa dan sumur terlindung serta tidak mempunyai fasilitas listrik PLN maka rumah tersebut dalam kondisi yang kurang sehat dan identik dengan rumah tangga yang tidak mampu, dikategorikan indikator 4.

e) Indikator 5

Indikator ini didasari atas penentuan rumahtangga kurang mampu dilihat dari pola konsumsi makanannya, amak apabila proporsi membeli bahan makanan terhadap pengeluaran rumah tangga keseluruhan dalam satu bulan lebih besar dari 80%, maka dianggap rumah tangga tersebut sebagian besar kemungkinannya memperoleh pendapatn hanya untuk makanan saja, untuk kebutuhan lainnya sangat kecil sehingga kemampuan rumahtangga untuk membeli kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan biaya-biaya listrik, bahan bakar tidak lebih dari 20 %.

Pengidentifikasian Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan kepada indikator-indikator yang ada, maka didalam mengidentifikasi rumahtangga menjadi miskin dengan melihat kondisi tertentu. Sangat dimungkinkan apabila syarat indikator 1, indikator 3 dan indikator 5 ketiganya terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai rumahtangga dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan tidak pernah sekolah atau tidak tamat sekolah dasar, dan juga bekerja di bidang pertanian, mempunyai pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi makanan $> 80\%$ serta rumahtangga tersebut ketika diwawancarai tidak memiliki aset berupa mobil, motor, sepeda, kasur dan hewan, akan tetapi dimungkinkan rumahtangga tersebut memiliki lahan sawah atau ladang. Pemilikan ladang atau sawah dijadikan sebagai aset rumahtangga yang sulit untuk cepat dijual sehingga rumahtangga yang memiliki aset tanah atau ladang kurang sensitif untuk indikator kemiskinan, akan tetapi biasa dijadikan sebagai informasi aset yang diberdayakan untuk dapat menghasilkan tambahan pendapatan rumahtangga. Selain memenuhi ketiga faktor tersebut, ada beberapa rumahtangga yang tidak memenuhi ketiga faktor tersebut akan tetapi memenuhi indikator 2 dan indikator 4 sehingga dijadikan sebagai kelompok yang sama.

Dari hasil analisis DDRT, data kepala keluarga miskin ini didata lagi dengan menggunakan Survey Rumah Tangga (SRT). Untuk SRT data yang diambil merupakan data yang sudah homogen yaitu data kepala keluarga miskin dan dipilih responden dengan metode acak sederhana. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Pangkalan Satu kegiatan SRT tidak dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sumber daya manusia yaitu aparat kabupaten yang dapat memahami bagaimana melakukan SRT. Aparat sebelumnya yang menangani

pelaksanaan DDRT telah dimutasi ke instansi lain dan tidak ada yang menggantikannya. Sehingga penentuan kelompok masyarakat sasaran program langsung diambil dari hasil analisis DDRT yang ada yang memenuhi syarat sebagai rumah tangga miskin yaitu sebanyak 169 rumah tangga.

2. Evaluasi Masukan (*Input*) Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Program aksi desa mandiri pangan di desa Pangkalan Satu mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Sebagai langkah awal kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi program yang dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2008. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat desa serta dihadiri oleh para aparat dan tokoh desa setempat. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi latar belakang dilaksanakannya program aksi desa mandiri pangan, serta tujuan dan manfaat apa yang diperoleh melalui pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di wilayah mereka.

Setelah sosialisasi program, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT). Survey ini dilakukan pada tanggal 3 Maret sampai dengan 11 April 2008 oleh aparat ketahanan pangan dari KPPKP Kabupaten Kotawaringin Barat selaku instansi teknis kegiatan. Tujuan survey DDRT adalah untuk mengetahui berbagai potensi dan gambaran karakteristik rumah tangga yang ada di desa Pangkalan Satu. *Output* yang diperoleh dari kegiatan sensus ini meliputi daftar rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin, karakteristik, status sosial, pengeluaran rumah tangga, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, dan pola konsumsi pangan rumah tangga. Survey DDRT dilakukan dengan mendata seluruh rumah tangga yang ada di desa bersangkutan, dalam hal ini yaitu Desa Pangkalan Satu. Data hasil survey kemudian dianalisis

lebih lanjut. Hasil analisis DDRT meliputi 6 aspek penilaian yaitu kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, ekonomi, dan karakteristik konsumsi.

Data yang dihasilkan dari kegiatan survey DDRT adalah data penduduk yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin dan kelompok rumah tangga tidak miskin. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembentukan organisasi yang anggotanya merupakan rumah tangga miskin terpilih dari hasil analisis DDRT. Pembentukan organisasi ini melibatkan peran fasilitator yaitu seorang pendamping yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPPKP Kabupaten Kotawaringin Barat selaku instansi teknis kegiatan melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat. Organisasi yang dibentuk ini kemudian disebut sebagai kelompok afinitas. Anggota kelompok afinitas di Desa Pangkalan Satu dibentuk berdasarkan tempat tinggal dan lingkungan sosial di setiap RW, karena di desa Pangkalan Satu terdiri dari 4 RW, maka jumlah kelompok disesuaikan menjadi 4 kelompok. Nama, jumlah anggota dan tanggal pembentukan kelompok dapat dilihat pada tabel berikut.

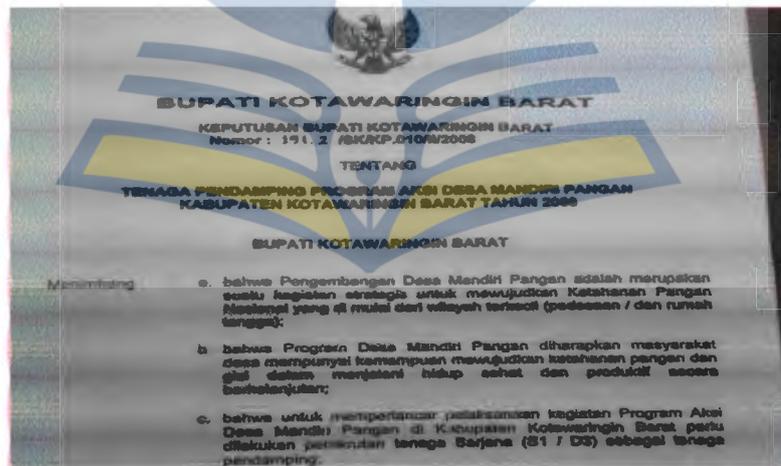
Tabel 4.13. Daftar Nama Kelompok dan Jumlah Anggota Afinitas
Desa Pangkalan Satu Tahun 2008

No.	Nama Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Tanggal Pembentukan
1	Sumber Rejeki	51	11 Mei 2008
2	Tali Rasa	32	12 Mei 2008
3	Makmur	32	13 Mei 2008
4	Karya Sejahtera	29	14 Mei 2008
	JUMLAH	144	

Sumber : Laporan Akhir Tahun Progsi Demapan Tahun 2008

Dalam program aksi desa mandiri pangan ada input yang bertugas sebagai fasilitator seperti yang telah disebutkan di atas yaitu pendamping desa. Pendamping desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat

nomor 191.2/SK/KP.010/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Tenaga Pendamping Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008. Berdasarkan SK tersebut pendamping desa Pangkalan Satu yaitu Ir. M. Mukhdari. Adapun yang menjadi tugas pendamping antara lain adalah : 1) membimbing kelompok dalam mengembangkan usaha produktif, 2) membimbing Tim Pangan Desa agar dapat berperan sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di tingkat desa, 3) menumbuhkan Lembaga Keuangan Desa, 4) menumbuhkan kader pangan desa dan kelompok afinitas. Sebelum melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu pendamping dibekali dengan pelatihan. Pelatihan yang telah diikuti oleh Ir. M. Mukhdari adalah pelatihan PRA (*Partisipatory Rural Appraisal / Pemahaman pedesaan secara partisipatif*) dan Pelatihan Pemberdayaan Kelompok yang difasilitasi oleh Kantor Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan tanggal 10-14 Agustus 2006.



Gambar 4.2. SK Penetapan Pendamping Progsi Demapan (didokumentasikan oleh peneliti tanggal 26 Maret 2014)

Pada tahun 2008 juga dibentuk kelembagaan yang merupakan bagian integral dari program aksi desa mandiri pangan, yaitu Tim Pangan Desa (TPD) dan

Lembaga Keuangan Desa (LKD). TPD terdiri dari 6 orang yang anggotanya terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, penggerak PKK desa dan perwakilan KK miskin (kelompok afinitas). Nama-nama anggota TPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14. Susunan Pengurus Tim Pangan Desa Demapan P. Satu Th. 2008

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Perwakilan
1	Mujiono	Ketua	Aparat Desa
2	Setiono	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3	Kasno	Bendahara	Tokoh Masyarakat
4	Imam Hambali	Anggota	Perwakilan kelompok
5	Lahuri Jayadi	Anggota	Perwakilan kelompok
6	Suwarni	Anggota	PKK Desa

Sumber : Laporan Akhir Tahun Progsi Demapan Tahun 2008

Lembaga Keuangan Desa (LKD) secara organisatoris cikal bakalnya telah dibentuk oleh Tim Pangan Desa dengan anggota kelompok dan difasilitasi pendamping dengan terlebih dahulu membuat AD/ART. Secara fungsional Tim LKD sudah melaksanakan tugasnya. Nama-nama anggota LKD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15. Susunan Pengurus Lembaga Keuangan Desa Demapan Pangkalan Satu Tahun 2008

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Jarwanto	Ketua
2	Sumiati	Sekretaris
3	Suwarni	Bendahara
4	Suyatmi	Anggota (Seksi On Farm)
5	Ratim	Anggota (Seksi Of Farm)
6	Wahyuni	Anggota (Seksi Non Farm)

Sumber : Laporan Akhir Tahun Progsi Demapan Tahun 2008

Lembaga Tim Pangan Desa yang telah dibentuk kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 532/SK/KP.010/V/2008 tentang Penetapan Tim Pangan Desa (TPD) Desa Pangkalan Satu Program Aksi

Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2008 tanggal 28 Mei 2008. Lembaga Keuangan Desa yang telah dibentuk juga ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor KP.140/365-1/VII/2009 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Desa Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2008 tanggal 28 Juli 2009.



Gambar 4.2. Dokumen SK Penetapan TPD Desa Pangkalan Satu (didokumentasikan oleh peneliti tanggal 26 Maret 2014)



Gambar 4.3. Dokumen SK Penetapan LKD Progsi Demapan (didokumentasikan oleh peneliti tanggal 26 Maret 2014)

Salah satu ciri program pemberdayaan masyarakat adalah adanya bantuan dana bergulir bagi masyarakat yang paling memerlukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasmita (1996) bahwa dalam rangka pemberdayaan, upaya yang amat pokok salah satunya adalah peningkatan akses masyarakat ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal atau dana bergulir. Dalam progsi demapan di Desa Pangkalan Satu dana yang digulirkan bagi masyarakat disebut sebagai dana bansos Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Dana sebesar Rp.100.000.000,- diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada akhir tahun 2008 sebesar Rp.80.000.000,- dan tahap kedua diberikan pada tahun 2009 sebesar Rp.20.000.000,-. Dana bansos PMUK tersebut dialokasikan dari APBN. Dalam proses pencairannya tidak dilakukan secara serta merta. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, pada tahun pertama yang merupakan tahap persiapan masyarakat kelompok afinitas tidak langsung menerima dana bantuan PMUK tersebut. Melainkan masyarakat terlebih dahulu dilatih untuk melakukan usaha simpan pinjam kelompok. Seperti dinyatakan oleh informan berikut :

“bantuan PMUK itu tidak langsung diserahkan kepada kelompok afinitas begitu saja setelah kelompok-kelompok tersebut terbentuk. Melainkan mereka diajak terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan simpan pinjam. Pemberian bantuan PMUK baru dilakukan pada akhir tahun 2008, yaitu setelah beberapa bulan para anggota kelompok afinitas telah melakukan kegiatan simpan pinjam. Tujuannya adalah agar melatih mereka untuk memiliki kebiasaan menabung terlebih dahulu dan berlatih bagaimana cara memanfaatkan dana bergulir yang akan diberikan nantinya. Adapun PMUK diberikan secara bertahap, yaitu tahap I pada akhir tahun 2008 sebesar Rp.80.000.000,- dan tahap II pada tahun 2009 sebesar Rp.20.000,-.” (Sudirman, aparat ketahanan pangan, wawancara 10 Juni 2014).

“tahun 2008 itu masyarakat tidak langsung menerima bantuan PMUK. Melainkan melakukan usaha simpan pinjam terlebih dahulu. Baru pada sekitar akhir tahun 2008, dana PMUK dicairkan masuk melalui rekening kelompok. Setelah itu pada tahun 2009 ada lagi dana PMUK yang masuk ke rekening kelompok.” (Mujiono, bendahara LKD, wawancara 03 Juni 2014).

Penggunaan dana untuk modal usaha produktif anggota pada dasarnya ditetapkan oleh anggota sendiri, setelah dibahas dalam musyawarah kelompok. Dana yang digunakan oleh anggota kelompok diharapkan berkembang tumbuh dengan keuntungan yang dihasilkan dalam kegiatan produktif. Tata cara peminjaman, penggunaan, pengembalian, biaya, sanksi, dan aturan main lainnya menjadi tanggung jawab, kewenangan dan kesepakatan bersama dalam musyawarah kelompok. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan, tata cara peminjaman dana PMUK di desa Pangkalan Satu diawali dengan penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlebih dahulu. RUK merupakan dokumen yang memuat nama anggota kelompok, pekerjaan, jenis usaha yang akan dikembangkan, serta rincian biaya yang dibutuhkan. Selain RUK dalam proses peminjaman juga dilengkapi dengan surat perjanjian pinjaman (contoh RUK dan Perjanjian Pinjaman seperti dalam Lampiran).

“dalam proses peminjaman dana PMUK anggota kelompok terlebih dahulu membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) kemudian dilengkapi dengan perjanjian pinjaman anggota kelompok kepada pendamping, ketua TPD, dan ketua LKD dengan diketahui oleh kepala desa. Setelah kami verifikasi barulah dana PMUK tersebut diberikan kepada anggota.” (Jarwanto, Ketua LKD, wawancara 21 Juni 2014).



Gambar 4.4. Anggota kelompok afinitas yang akan meminjam dana PMUK harus membuat RUK terlebih dahulu (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 13 April 2014 saat pertemuan rutin kelompok di rumah ketua kelompok afinitas Makmur)



Gambar 4.5. Verifikasi RUK dilakukan oleh LKD dengan diketahui oleh TPD, setelah itu dana PMUK diberikan kepada anggota kelompok afinitas (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 13 April 2014 saat pertemuan rutin kelompok di rumah ketua kelompok afinitas Makmur)

Bantuan dana sebagai modal usaha merupakan suatu injeksi untuk mempercepat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dana PMUK sebagai dana bergulir dapat diartikan sebagai dana abadi dalam bentuk bantuan modal kepada kelompok masyarakat yang tetap berada dan tumbuh berkembang di desa bersangkutan. Bagi anggota kelompok, dana tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan. Dengan dana ini diharapkan kelompok simpan pinjam ini dapat berkembang menjadi lembaga dana masyarakat desa yang menjadi milik desa, dan dikelola oleh warga desa setempat. Dari program ini terlihat sebagai wujud pemihakan dan pemberdayaan masyarakat yang akan mendorong percepatan perubahan struktural sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional.

Tabel 4.16. Indikator Input Program Aksi Desa Mandiri di desa Pangkalan Satu

No.	Dimensi	Lengkap	Tidak Lengkap	Ket.
1	Input			
	a. Jumlah anggaran	Ya	-	
	b. Instrumental			
	i. Pedoman Umum/ Pedoman Teknis	Ya	-	
	ii. Pendamping	Ya	-	
	iii. Kelembagaan	Ya	-	
	– Kelompok afinitas	Ya	-	
	– TPD	Ya	-	
	– LKD	Ya	-	
	iv. Dana PMUK	Ya	-	

sumber : *Pedoman Teknis Progsi Demapan, 2011*

3. Evaluasi Proses (*Process*) Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan sesuai dengan acuan kegiatan pada Pedoman Teknis Program (Anonim, 2012) meliputi empat tahapan pelaksanaan yaitu: tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan

kemandirian. Demikian juga dengan pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di Desa Pangkalan Satu meliputi empat tahapan tersebut.

Tahap Persiapan (Tahun Pertama)

Tahap persiapan dilaksanakan dalam waktu satu tahun yaitu pada tahun 2008 dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Seleksi lokasi

Seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat: kabupaten, kecamatan, dan desa. Seleksi lokasi Desa Pangkalan Satu sebagai desa sasaran program aksi Demapan diawali dengan identifikasi calon desa mapan tahun 2008 atas dasar data Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan data Food Insecurity Atlas (FIA). Identifikasi desa Pangkalan Satu dilaksanakan pada tanggal 5-24 Maret 2007. Dari hasil identifikasi tersebut diketahui bahwa desa Pangkalan Satu dikategorikan sebagai desa rawan pangan. Selanjutnya desa tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 191.1/SK/KP.010/II/2008 tentang Penetapan Desa Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 29 Pebruari 2008.



Gambar 4.6. Dokumen SK Penetapan Desa Penerima Progsi Demapan (didokumentasikan oleh peneliti tanggal 26 Maret 2014)

2) Sosialisasi program

Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang desain program aksi desa mandiri pangan dan rencana implementasi kegiatan untuk *stakeholder*. Sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan forum Dewan Ketahanan Pangan baik di tingkat propinsi, kabupaten (kecamatan dan desa) dengan melibatkan aparat dari instansi terkait, swasta dan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi tingkat kabupaten di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan tanggal 15 Maret 2006 dan 16 Juni 2006. Sosialisasi tingkat desa di Desa Pangkalan Satu dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2008. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi latar belakang dilaksanakannya program aksi desa mandiri pangan, serta tujuan dan manfaat apa yang diperoleh melalui pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di wilayah mereka. Kegiatan sosialisasi program dilaksanakan bagi masyarakat desa serta dihadiri juga oleh para tokoh dan aparat desa setempat. Sosialisasi dilakukan oleh instansi Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku instansi teknis kegiatan.

3) Pendampingan

Kegiatan pendampingan meliputi:

a. Rekrutmen pendamping

Pendamping demapan di desa Pangkalan Satu sebelumnya merupakan pendamping demapan di desa lainnya yang menerima program demapan pada tahun 2006 dimana di desa tersebut terdapat 2 pendamping per desa. Sehingga Ir. M. Mudhari selaku pendamping demapan desa Pangkalan satu merupakan hasil perampingan petugas

pendamping dari desa lainnya. Adapun Ir. M. Mudhari merupakan hasil seleksi/rekrutmen pendamping desa yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2006 yang diikuti oleh 5 orang calon pendamping. Tenaga pendamping yang terpilih tersebut kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 191.2/SK/KP.010/II/2008 tentang Tenaga Pendamping Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008. Seperti dinyatakan oleh informan berikut.

“pendamping demapan di desa Pangkalan Satu bukan merupakan rekrutmen baru, tetapi merupakan perampingan dari desa mapan lainnya yang memiliki 2 orang pendamping. Maka salah satu pendamping yaitu Ir. M. Mudhari itu yang ditunjuk sebagai pendamping di desa Pangkalan Satu yang kemudian ditetapkan melalui surat keputusan kepala kantor KPPKP.” (Amrul Hasani, aparat ketahanan pangan, wawancara 13 Juni 2014).

b. Pelatihan pendamping

Sebelum melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu pendamping dibekali dengan pelatihan. Pelatihan yang telah diikuti oleh pendamping desa Pangkalan Satu adalah Pelatihan PRA (*Partisipatory Rural Appraisal* / Pemahaman pedesaan secara partisipatif) dan Pelatihan Pemberdayaan Kelompok yang difasilitasi oleh Kantor Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan tanggal 10-14 Agustus 2006.

c. Pelaksanaan pendampingan

Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping di Desa Pangkalan Satu pada tahap persiapan yaitu memfasilitasi penumbuhan kelompok-kelompok afinitas dari rumah tangga miskin. Kelompok afinitas

merupakan suatu organisasi yang para anggotanya merupakan kelompok rumah tangga miskin hasil analisis DDRT yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pendamping mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kelompok afinitas. Pembentukan kelompok afinitas dilakukan secara partisipatif melalui kesepakatan bersama. Demikian juga dalam kepengurusan kelompok. Artinya masyarakat diajak untuk dapat bersuara, mengatur dan memilih sendiri bagaimana proses pembentukan organisasi mereka. Dari hasil keputusan bersama tersebut maka dibentuklah 4 kelompok afinitas dengan dasar tempat tinggal di Desa Pangkalan Satu yang terdiri dari 4 RW. Nama, jumlah kelompok dan susunan pengurusnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17. Nama, jumlah kelompok dan susunan pengurus kelompok afinitas di Desa Pangkalan Satu

No.	Nama Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Pengurus Kelompok
1	Sumber Rejeki	51	Sarikin (Ketua) Suryono (Sekretaris) Sri Wahyuni (Bendahara)
2	Tali Rasa	32	Sutrisno A (Ketua) Gito (Sekretaris) Sukarmanto (Bendahara)
3	Makmur	32	Pono (Ketua) Warji (Sekretaris) Damis (Bendahara)
4	Karya Sejahtera	29	Sameno (Ketua) Anam R (Sekretaris) Partono (Bendahara)
	JUMLAH	144	

Sumber : Laporan Akhir Tahun Progsi Demapan Tahun 2008

Pendamping melakukan pendampingan secara intensif terhadap kelompok afinitas yang telah dibentuk. Dalam hal ini pendamping membimbing dalam penyusunan AD/ART organisasi. Pendamping juga

mengajarkan manajemen administrasi dan pengelolaan keuangan. Proses pendampingan ini dilakukan pada pertemuan rutin di setiap kelompok setiap bulannya. Pendamping secara aktif selalu menghadiri pertemuan kelompok, berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan, seperti dinyatakan oleh beberapa anggota kelompok afinitas berikut.

“Saya ikut program mandiri pangan sudah sejak awal. Pendampingnya kan dulu Pak Mudhori. Beliau setiap arisan di kelompok Makmur sini selalu datang. Kalo di kelompok sini kan arisannya selalu di tempat saya. Pertimbangannya karena rumah saya ini di tengah-tengah, jadi semua anggota kelompok bisa datang ke arisan. Makanya saya tau kalo Pak Mudhori itu pasti selalu datang mendampingi setiap arisan.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

”Di sini dulu yang jadi pendamping adalah Pak Mudhori. Beliau orangnya rajin, selalu datang dalam kegiatan pertemuan di setiap bulannya. Kalo di kelompok kami Sumber Rejeki pertemuan kan setiap tanggal 11 setiap bulannya. Nah di pertemuan tersebut beliau tidak pernah absen datang.” (Sarikhin, ketua kelompok Sumber Rejeki, wawancara tanggal 11 Mei 2014).

Pada tahap persiapan ini pendamping mengajak masyarakat sasaran kegiatan yang telah digabung dalam wadah kelompok afinitas untuk mengenali potensi yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan. Pendamping memfasilitasi kelompok untuk membuat rencana kerja kelompok afinitas yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Karena program aksi desa mandiri pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat, maka penyusunan rencana usaha dilakukan dengan metode PRA. Masyarakat secara partisipatif diajak untuk membuat rencana usulan kegiatan yang dapat berupa kegiatan *on farm*, *off farm*, dan *non farm*. Rencana kegiatan kelompok ini kemudian

dituangkan dalam bentuk Rencana Usaha Kelompok (RUK). Seperti dinyatakan oleh informan berikut.

“Dulu kami ada diajarkan untuk membuat rencana kegiatan kelompok oleh bapak pendamping. Dari rencana kegiatan itu lalu kami membuat rencana usaha kelompok. Proses menyusunnya ya kami diajak terlibat secara langsung. Kami menentukan sendiri apa-apa saja kira-kira kegiatan yang mau dilakukan. Setelah itu kami dibimbing dalam membuat rencana usulan kegiatan. Jadinya kira-kira seperti proposal gitu. Dan itu semua disampaikan melalui pertemuan rutin kelompok kami.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Pada tahap persiapan ini pendamping memfasilitasi kelompok dalam pencairan dana bantuan sosial (bansos) Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Pendamping membimbing kelompok afinitas untuk melengkapi administrasi untuk pencairan dana berupa surat perjanjian, buku tabungan kelompok, beserta lampiran RUK yang telah disusun sebelumnya.

4) Penyusunan Data Dasar Desa

Penyusunan data dasar rumah tangga (DDRT) di Desa Pangkalan Satu dilakukan pada awal tahap persiapan yaitu pada tanggal 3 Maret sampai dengan 11 April 2008 oleh aparat ketahanan pangan KPPKP Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan survey DDRT adalah untuk mengetahui berbagai potensi dan gambaran karakteristik rumah tangga yang ada di desa Pangkalan Satu. *Output* yang diperoleh dari kegiatan sensus ini meliputi daftar rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin, karakteristik, status sosial, pengeluaran rumah tangga, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, dan pola konsumsi pangan rumah tangga. Survey DDRT dilakukan dengan

mendata seluruh rumah tangga yang ada di desa Pangkalan Satu. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut.

“waktu awal tahun 2008 itu saya ingat pernah dikunjungi oleh bapak-bapak dari kantor ketahanan pangan. Mau mendata untuk calon penerima kegiatan program aksi desa mandiri pangan katanya. Waktu itu sistem datangnya ya dari pintu ke pintu gitu lah, ke rumah-rumah masyarakat. Pertanyaannya seingat saya seputar masalah matapencarian, pekerjaan, pendidikan, anggota keluarga, kepemilikan (aset). Kalo yang tentang pangan hal yang ditanya seingat saya itu apa ada stok pangan, apa saja yang dimakan, dimana membeli kebutuhan pangan.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

5) Pelatihan

Pelatihan yang dilaksanakan dalam program aksi Desa mandiri Pangan Desa Pangkalan Satu pada tahap persiapan adalah pelatihan bagi petugas pendamping. Namun pelatihan ini dilakukan pada saat pendamping tersebut masih bertugas sebagai tenaga pendamping di desa mapan lainnya. Pelatihan yang dimaksud yaitu pelatihan PRA dan pelatihan pemberdayaan kelompok yang difasilitasi oleh Kantor Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 10-14 Agustus 2006. Sedangkan ketika pendamping tersebut ditugaskan menjadi pendamping demapan di desa Pangkalan Satu, tidak ada pelatihan lagi bagi pendamping tersebut. Sehingga pendamping melakukan pendampingan berbekal materi pendampingan yang telah diterima sebelumnya.

Pelatihan bagi kelompok afinitas tidak pernah dilakukan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan sebagai berikut.

“sejak saya ikut jadi anggota kelompok afinitas di program mapan ini tahun 2008, seingat saya belum pernah mendapat pelatihan. Baik itu dari propinsi, kabupaten, atau dari desa. Kalau memang diadakan yang saya mau saja to

ikut, kan bisa nambah pengetahuan apa gitu.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“anggota kelompok karya sejahtera ini kan banyak ibu-ibu mbak. Kalo seumpama kita ada diajak ikut pelatihan misalkan kayak diajari bagaimana membuat panganan dari bahan lokal gitu ya kami sangat setuju. Kan bisa menambah keterampilan kami para ibu-ibu anggota kelompok. Kami bisa jadi lebih kreatif, terus seumpama peluangnya bagus kan bisa jadi modal untuk nambah pendapatan. (Romdiah, anggota kelompok Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

Pelatihan bagi pengurus yang mengelola keuangan dana bansos PMUK yaitu LKD hanya sekali saja dilakukan, sementara pelatihan bagi penggerak ketahanan pangan dalam progsi demapan, yaitu TPD belum pernah dilakukan. Hal tersebut diketahui melalui wawancara peneliti terhadap informan berikut.

“Selama saya menjadi pengurus LKD dalam program demapan ini baru sekali saja mengikuti pelatihan, yaitu pelatihan yang diadakan oleh BKP Propinsi di Palangkaraya tahun 2011. Tapi sayangnya pelatihan itu menurut saya tidak sesuai dengan kondisi di Pangkalan Satu ini. Pada tahun 2011 kan desa ini sudah memasuki tahun keempat, tahap kemandirian. Sementara materi pelatihan yang saya ikuti itu adalah tentang persiapan bagi desa-desa calon penerima program demapan.” (Jarwanto, ketua LKD, wawancara 21 Juni 2014).

“Saya selaku aparat kabupaten yang menangani progsi demapan ini pernah mengikuti pelatihan yang diperuntukkan bagi pengurus LKD tahun 2011 yang diadakan oleh BKP Provinsi Kalteng di Palangkaraya. Sayangnya materi pelatihan tersebut tidak sesuai untuk Desa Pangkalan Satu. Materi pelatihan adalah tentang persiapan bagi desa-desa calon penerima program, sementara Desa Pangkalan Satu pada tahun tersebut telah memasuki tahun keempat, yaitu tahap kemandirian.” (Sudirman, aparat ketahanan pangan, wawancara 10 Juni 2014).

“Tahun 2008 sampai dengan 2013 saya sebagai pengurus TPD belum pernah mengikuti pelatihan progsi demapan. Pada tahun 2014 ini pun dalam tugas saya sebagai bendahara LKD, saya belum pernah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai anggota tim penggerak ketahanan

pangan dalam progsi demapan ini.” (Mujiono, bendahara LKD, wawancara 03 Juni 2014).

“Pelatihan bagi pengurus kelompok, pengurus LKD, serta pengurus TPD memang sangat jarang dilakukan. Pada tahun 2011 diadakan satu kali pelatihan yaitu bagi pengurus LKD oleh BKP Provinsi di Palangkaraya, namun materi pelatihan tidak sesuai dengan kondisi desa Pangkalan Satu.” (Amrul Hasani, aparat ketahanan pangan, wawancara 13 Juni 2014).

6) Pemberdayaan kelompok afinitas

Kelompok afinitas adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Upaya pemberdayaan kelompok afinitas pada tahap persiapan program demapan di Desa Pangkalan Satu berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan dari sisi keaktifan petugas pendamping dalam mengikuti pertemuan rutin kelompok setiap bulannya dan memberikan materi-materi pengarahan sudah cukup baik. Seperti dinyatakan informan berikut.

“Pak Mudhori dulu selaku pendamping termasuk rajin, dia selalu hadir kalau kami ada pertemuan rutin kelompok setiap bulannya. Dalam pertemuan itu materi yang diberikan ya cukup beragam. Seingat saya dulu pernah juga diberi materi tentang budidaya tanaman pangan, kayak jagung, tanaman hortikultura, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Terutama kami juga dibimbing dalam mengelola keuangan kelompok, bagaimana supaya program ini bisa terus berjalan, kami harus disiplin dalam mengelolanya, termasuk soal pemanfaatan dana bantuan serta punya kebiasaan menabung.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan merupakan program yang bertujuan untuk mengubah kondisi desa Pangkalan Satu yang termasuk kategori rawan pangan menjadi desa yang memiliki kemandirian pangan, baik dalam sub sistem ketersediaan, distribusi dan akses, serta konsumsi pangan.

Cakupan kemandirian pangan yang luas ini tentu memerlukan koordinasi lintas sektor terkait. Atas dasar hal tersebut maka di tahun pertama proksi demapan yaitu pada tahap persiapan dibentuklah suatu kelompok kerja kabupaten program aksi demapan. Penetapan kelompok kerja tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 191.4/SK/KP.010/II/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2008 tanggal 29 Pebruari 2008. SKPD yang menjadi anggota tim pokja proksi demapan ini berasal dari lintas sektor terkait yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun yang menjadi tugas pokja tersebut adalah : 1) melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam program aksi demapan; 2) melakukan identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program aksi demapan, 3) merumuskan program pengembangan demapan; 4) menyampaikan laporan kegiatan kepada instansi pengelola program aksi demapan di tingkat propinsi dan pusat; serta 5) mengadakan pertemuan pokja di tingkat kabupaten minimal 3 bulan sekali.



Gambar 4.7. Dokumen SK Pembentukan Pokja Progsi Demapan (didokumentasikan oleh peneliti tanggal 26 Maret 2014)

Idealnya jika pokja progsi demapan tersebut dapat menjalankan fungsinya, maka upaya pemberdayaan kelompok afinitas dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut adalah sangat logis sebab dengan dukungan dan bimbingan dari berbagai instansi lintas sektor terkait yang saling bekerja sama dalam wadah pokja, maka kegiatan-kegiatan pemberdayaan dapat berjalan lebih luas cakupannya, terintegrasi dan terarah. Yang menjadi realita dalam pelaksanaan program aksi demapan di Desa Pangkalan Satu adalah bahwa fungsi pokja hanya sebatas di atas meja saja. Pokja progsi demapan memang telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan koordinasi di tingkat kabupaten, yaitu melalui rapat-rapat lintas sektor. Namun *action* di lapangan yaitu *action* langsung yang berhubungan dengan masyarakat tidak ada. Hal ini seperti dinyatakan oleh informan berikut.

“Selama saya ikut kegiatan demapan ini seingat saya tidak pernah ada pengarahan atau bimbingan dari dinas-dinas lain yang disampaikan melalui pertemuan rutin kelompok kami. Selama ini yang memberikan materi pendampingan ya dari pendamping saja. Saya sendiri termasuk anggota PKK di desa ini ya juga tidak pernah diajak untuk berkoordinasi misalnya, dari Penggerak PKK untuk mereka ikut rembug memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu kelompok afinitas kami ini.” (Lisa, sekretaris kelompok Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“Pada tahap persiapan memang ada dibentuk kelompok kerja atau disebut pokja yang khusus menangani kegiatan program aksi desa mandiri pangan.

Anggotanya berasal dari lintas sektor terkait urusan pangan. Ada dari distanak, diskanla, disperindag, dinas kesehatan, koperasi, juga penggerak PKK. Penetapannya dengan SK Bupati. Dalam pelaksanaannya untuk koordinasi lintas sektor mereka melalui rapat-rapat. Tujuan dibentuknya pokja ini supaya kegiatan pemberdayaan kelompok afinitas untuk mewujudkan kemandirian pangan bisa lebih luas dan terintegrasi. Tapi selama ini saya lihat action di lapangannya sangat minim bahkan bisa dibilang tidak ada. Contohnya waktu kami sosialisasi program ke masyarakat desa dulu di tahap persiapan yang hadir hanya dari ketahanan pangan saja, sementara dari dinas-dinas lain tidak ikut hadir. (Amrul Hasani, aparat ketahanan pangan, wawancara 13 Juni 2014).

Tahap Penumbuhan (Tahun Kedua)

Tahap penumbuhan dititikberatkan pada penguatan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pelayanan masyarakat.

1) Penumbuhan Kelembagaan Aparat

a. Pemberdayaan Penyuluh

Upaya pemberdayaan penyuluh dilakukan dengan menumbuhkan pemahaman kepada penyuluh tentang pentingnya program aksi desa mandiri pangan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan upaya ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dimana tidak ada koordinasi dan integrasi program aksi demapan dengan program penyuluhan. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak pernahnya penyuluh memberikan penyuluhan kepada kelompok sasaran kegiatan demapan. Seperti dinyatakan oleh informan berikut.

“selama saya ikut kegiatan demapan, pendampingan dari penyuluh itu tidak ada. Ya penyuluh pernah aja ke tempat saya, ke rumah ini, tapi kunjungannya secara informal. Kalo memberikan penyuluhan pada saat pertemuan rutin kelompok itu tidak ada. Jadi program penyuluhan selama ini belum pernah diberikan oleh penyuluh melalui pertemuan rutin kelompok.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“saya selama ikut jadi anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera belum pernah mendapat penyuluhan dari penyuluh desa yaitu Pak Jumarno. Tapi selain di demapan ini saya juga ikut jadi anggota kelompok gapoktan. Kan di desa ini ada program SRI mulai tahun 2006, saya diajari melalui sekolah lapangan dalam kegiatan gapoktan ini tentang bagaimana cara budidaya padi dengan sistem SRI. Dengan sistem SRI ini kami diajari bagaimana cara menanam padi, membuat MOL, dan pemanfaatan serangga predator sebagai musuh alami hama yang menyerang tanaman padi oleh bapak penyuluh. Setiap bulan saya pasti sekolah di situ sama Pak Jumarno. Cuma kalo melalui kegiatan pertemuan rutin kelompok, memang tidak pernah ada penyuluhan.” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

- b. Aparat yang Menangani Ketahanan Pangan Tingkat Propinsi dan Kabupaten. Menumbuhkan pemahaman kepada aparat yang menangani ketahanan pangan tingkat propinsi dan kabupaten tentang pentingnya program aksi desa mandiri pangan melalui langkah-langkah : pembinaan bagi aparat pelaksana Program aksi desa mandiri pangan serta workshop hasil pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan diketahui bahwa belum upaya pembinaan yang memadai bagi aparat kabupaten yang menangani program aksi demapan. Selama ini upaya pembinaan hanya dilakukan melalui pertemuan evaluasi progsi demapan yang dilakukan sekali setahun di tingkat provinsi. Sementara pembinaan aparat kabupaten melalui pokja demapan lintas sektor tingkat kabupaten tidak pernah dilakukan.

“selama ini upaya pembinaan bagi saya sebagai aparat kabupaten yang menangani progsi demapan adalah melalui pertemuan evaluasi program saja setiap sekali setahun di tingkat provinsi. Kalau pembinaan dari pokja demapan tingkat kabupaten belum pernah dilakukan.” (Sudirman, aparat ketahanan pangan, wawancara 10 Juni 2014).

“pembentukan pokja demapan kabupaten diharapkan dapat membantu dalam membina pelaksanaan progsi demapan, salah satunya melalui

pelatihan bagi aparat kabupaten yang menangani program ini. Namun demikian belum pernah terlaksana.” (Amrul Hasani, aparat ketahanan pangan, wawancara 13 Juni 2014).

2) Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kelompok Afinitas

Pemberdayaan kelompok afinitas pada tahap penumbuhan dilakukan melalui peningkatan kapasitas para anggota kelompok baik di bidang organisasi maupun dalam penumbuhan usaha. Kegiatan pemberdayaan kelompok tersebut dilakukan melalui pelatihan oleh aparat di tingkat kabupaten dan fasilitasi tenaga pendamping.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, peneliti menemukan kondisi di lapangan bahwa upaya pemberdayaan kelompok afinitas melalui kegiatan pendampingan oleh pendamping pada tahap penumbuhan ini tidak maksimal. Seperti dinyatakan oleh informan berikut.

“kalo diarahkan untuk membuat usaha kelompok bareng-bareng ya pernah, kami menanam tanaman pangan waktu itu. Cuman karena tidak berhasil panennya ya sudah nggak tidak dilanjutkan lagi.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

“pendampingan menurut saya masih kurang. Selama ini pengaruh pendampingan menurut saya di kelompok ya cuman untuk pengarahan, arisan, ngecek perguliran dana, setelah itu ya sudah, selesai, pulang. Kami pengarahan ya kami diarahkan untuk nanam tanaman kayak jagung, singkong. Cuman ya sebatas diarahkan nanam saja. Kan akan sangat bagus kalo ada pelatihan, kayak di kelompok kami ini kan banyak ibu-ibu. Coba misalkan diadakan pelatihan praktek bagaimana cara membuat penganan kayak bikin kue dari singkong, emping singkong, keripik singkong, emping melinjo. Lalu kami diarahkan ke mana untuk menjual penganan itu. Kalo begitu kan bagus untuk kami dapat keterampilan yang baru, bisa untuk menambah pendapatan. Atau praktek bikin kerajinan misalnya nyongket atau menjahit gitu, bikin taplak atau kerajinan lainnya, lalu dijual” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).



Gambar 4.8. Pertemuan rutin kelompok afinitas Karya Sejahtera dilakukan pada tanggal 14 setiap bulannya (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 14 Mei 2014 saat pertemuan rutin kelompok di rumah ketua kelompok afinitas Karya Sejahtera)

Pelaksanaan program desa mandiri pangan memerlukan dukungan lintas sektor. Melalui pembentukan Pokja program aksi Demapan tingkat kabupaten yang anggotanya merupakan SKPD dari berbagai lintas sektor terkait urusan pangan sebenarnya sudah mampu menjadi fasilitator pendampingan pemberdayaan kelompok afinitas, misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota kelompok melalui pertemuan rutin setiap bulannya. Namun pada tahap ini upaya pemberdayaan oleh Pokja progsi demapan tersebut tidak maksimal, bahkan tidak ada. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh informan berikut.

“ Pengarahan selama ini di pertemuan rutin ya hanya dari pendamping. Kalo pengarahan dari dinas lain misalnya kayak dinas perikanan, kesehatan, koperasi, gitu belum pernah ada di pertemuan kelompok kami. (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).



Gambar 4.9. Kelompok afinitas Karya Sejahtera anggotanya sebagian besar merupakan kaum ibu rumah tangga, pengarahan dalam kelompok ini dilakukan melalui pertemuan rutin oleh pendamping (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 14 Mei 2014 saat pertemuan rutin kelompok di rumah ketua kelompok afinitas Karya Sejahtera)

Upaya pemberdayaan kelompok afinitas pada tahap ini belum dilaksanakan secara maksimal. Pemanfaatan dana PMUK sebagai dana modal usaha untuk memberdayakan masyarakat idealnya adalah melalui usaha bersama. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1993), bahwa kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Upaya pemberdayaan masyarakat adalah lebih efisien jika masyarakat tersebut digabung dalam kelompok. Dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam, diketahui tidak ada bentuk usaha bersama dari keempat kelompok afinitas di desa Pangkalan Satu. Perguliran dana dilakukan kepada individu per individu anggota kelompok. Sementara sistem yang diterapkan dalam perguliran dana adalah sistem tanggung renteng yang pada dasarnya dibuat demi kelancaran proses perguliran dana. Namun karena bentuk peminjaman dana modal usahanya tidak dengan pendekatan usaha kelompok maka hal ini mengakibatkan proses perguliran dana menjadi tidak

lancar. Jika ada salah satu anggota yang belum bisa melunasi pinjaman maka anggota kelompok lain belum boleh meminjam. Peminjaman baru bisa dilakukan jika anggota yang meminjam sudah melunasi pinjaman sebelumnya. Hal ini seperti dinyatakan oleh informan berikut.

“di kelompok Karya Sejahtera ini kalau ada yang masih nunggak pinjamannya, anggota lain ya terpaksa belum boleh pinjam dulu. Karena kami kan menggunakan sistem tanggung renteng. Jadi kalo ada yang nunggak ya saya sebagai pengurus kelompok harus mengopyak-opyak anggota untuk segera melunasi pinjamannya supaya perguliran dananya lancar, anggota yang lain bisa gantian pinjam.” (Lisa, sekretaris kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

3) Penguatan Modal Usaha

Penguatan modal usaha dilakukan dengan tujuan untuk : (1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola kegiatan dan keuangan bersama; (2) Meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengakses permodalan; dan (3) Meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha pertanian dan non pertanian. Yang dilakukan dengan prinsip-prinsip: (1) Dana penguatan modal usaha bukan merupakan modal yang habis pakai; (2) Dana penguatan modal merupakan dana yang harus berkembang dan bergulir di lokasi Desa mandiri pangan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dan dari hasil wawancara peneliti terhadap informan, bantuan dana PMUK pada tahun 2008 sampai dengan 2011 dikelola melalui sistem satu pintu yaitu oleh LKD yang merupakan lembaga layanan modal bagi masyarakat kelompok afinitas. Setiap anggota kelompok yang akan meminjam dana PMUK akan dibimbing oleh pendamping untuk membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlebih

dahulu yang memuat keterangan rencana penggunaan dana. Anggota kelompok tidak perlu memberikan jaminan pinjaman, sebagai gantinya, anggota cukup membuat surat perjanjian pinjaman yang ditandatangani di atas materai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok dalam mengakses permodalan. Artinya, tanpa memberikan jaminan anggota kelompok dapat menggunakan dana PMUK sebagai modal usaha. RUK yang telah dibuat oleh anggota kelompok kemudian diverifikasi oleh TPD untuk menentukan kelayakan usaha serta besaran pinjaman yang sesuai. RUK yang telah diverifikasi dan disetujui oleh TPD kemudian dikoordinasikan kepada kepala desa untuk diketahui.

“bagi anggota kelompok yang akan meminjam dana PMUK mereka harus menyusun RUK terlebih dahulu. Dari RUK itu kami selaku LKD mengetahui apa tujuan penggunaan dana yang akan dipinjam. Sebenarnya dalam pengisian RUK ini kan harus detail ya rinciannya, namun karena kondisi masyarakat di sini terbatas kualitas SDM nya jadi kami memodifikasi RUK agar lebih mudah dipahami oleh calon peminjam. Selain RUK anggota juga harus membuat surat perjanjian pinjaman. Hal ini merupakan bentuk kompensasi karena kami kan tidak mensyaratkan jaminan. Jadi cukup dengan surat perjanjian tersebut anggota kelompok sudah bisa meminjam. Tentunya setelah melalui verifikasi oleh TPD dan diketahui oleh kepala desa.” (Jarwanto, ketua LKD, wawancara wawancara 21 Juni 2014).

“kami selaku TPD tentu tidak bisa memberikan pinjaman begitu saja. Tugas TPD adalah memverifikasi RUK calon peminjam. Tujuannya adalah demi kelancaran perguliran dana PMUK yang ada. Dana ini kan sifatnya dana abadi, dan setiap anggota berhak untuk dapat memanfaatkannya. Tugas kami selaku TPD adalah memastikan agar perguliran dana tersebut lancar, tidak ada yang macet di anggota. Kami perlu memverifikasi calon peminjam apakah usulannya layak dan apakah besaran pinjaman sesuai dengan profil kemampuannya. Kemudian setelah kami verifikasi pun RUK tersebut akan dikoordinasikan dengan kepala desa untuk diketahui beliau.” (Kasno, pengurus TPD, wawancara 11 Mei 2014).

Upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha pertanian dan non pertanian dengan memanfaatkan dana PMUK belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari tidak berfungsinya pembagian kerja dalam LKD. Berdasarkan SK Kepala KPPKP nomor KP.140/365-1/VII/2009 tentang penetapan LKD Program Aksi Desa Mandiri Pangan terdapat pembagian tugas yang jelas terhadap 6 (enam) orang pengurus LKD yang ditetapkan yaitu sebagai 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris, 1 (satu) orang sebagai bendahara, 1 (satu) orang sebagai anggota yang membidangi seksi *on farm*, 1 (satu) orang sebagai anggota yang membidangi seksi *off farm*, dan 1 (satu) orang sebagai anggota yang membidangi seksi *non farm*. Dalam pelaksanaannya hanya 3 (tiga) orang yang aktif melakukan fungsinya sebagai pengurus LKD, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara ketiga anggota lainnya yang membidangi masing-masing seksi tidak aktif.

“anggota LKD ini sebenarnya ada 6(enam) orang, namun yang aktif melakukan tugasnya hanya 3 (tiga) orang saja, yaitu saya selaku ketua, sekretaris dan bendahara. 3 (tiga) anggota lainnya tidak, karena bingung juga apa yang mau dikerjakan kurang jelas tugasnya.” (Jarwanto, ketua LKD, wawancara wawancara 21 Juni 2014).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa belum semua anggota LKD yang benar-benar memahami peran lembaganya. Tidak berfungsinya peran anggota seksi *on farm*, *off farm*, dan *non farm* tersebut berakibat pada upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha pertanian dan non pertanian tidak berjalan maksimal. Dari hasil observasi peneliti terhadap dokumen RUK anggota kelompok, terdapat berbagai macam

jenis usaha yang diusulkan, baik dari *on farm*, *off farm*, dan *non farm*. Seperti bercocok tanam sayur-sayuran, pembuatan batu bata, beternak ayam, berdagang, usaha pembuatan emping melinjo, kerupuk, tahu dan tempe. Peran LKD belum sampai kepada upaya membantu anggota kelompok dalam menganalisis potensi usaha yang dilakukan untuk dapat dikembangkan lebih jauh dengan memanfaatkan bantuan dana PMUK yang dipinjamkan.



Gambar 4.10. Salah satu jenis usaha *off farm* anggota kelompok afinitas yaitu pembuatan emping melinjo yang ada di Desa Pangkalan Satu (sumber data dokumentasi : Laporan Akhir Perkembangan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013)

4) Harmonisasi Sistem Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Keberhasilan pembangunan ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut, perlu didukung oleh faktor-faktor input

berupa sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya.

a. Subsistem Ketersediaan

Upaya peningkatan produksi pangan di desa Pangkalan Satu dilakukan melalui program SRI (*sistem rice intensification*) yang programnya dilakukan di luar progsi demapan. Namun secara personal, terdapat beberapa anggota kelompok afinitas yang termasuk dalam anggota kelompok tani program SRI tersebut.

“selain di demapan ini saya juga ikut jadi anggota kelompok gapoktan. Kan di desa ini ada program SRI, saya diajari melalui sekolah lapangan dalam kegiatan gapoktan ini tentang bagaimana cara budidaya padi dengan sistem SRI. Dengan sistem SRI ini kami diajari bagaimana cara menanam padi, membuat MOL, dan pemanfaatan serangga predator sebagai musuh alami hama yang menyerang tanaman padi oleh bapak penyuluh. Setiap bulan saya pasti sekolah di situ sama Pak Jumarno. Cuman kalo melalui kegiatan pertemuan rutin kelompok, memang tidak pernah ada penyuluhan. Hasil panennya ya lumayan, bisa untuk mencukupi kebutuhan beras saya sehari-hari. Jadi sekarang saya tidak perlu beli beras lagi di warung, kare sudah ada hasil panen sendiri di rumah.” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“saya selain di demapan juga ikut jadi anggota kelompok gapoktan. Kami diajari bercocok tanam padi dengan sistem SRI, yang mengajar adalah Pak Jumarno sebagai penyuluh lapangan di desa ini. Hasilnya ya lumayan, untuk konsumsi keluarga saya sehari-hari.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).



Gambar 4.11. Lahan persawahan di desa Pangkalan Satu yang dikembangkan dengan sistem SRI (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 20 Maret 2014 saat melakukan observasi lapangan)



Gambar 4.12. Terdapat beberapa varietas padi yang diuji coba untuk ditanam di areal persawahan padi di desa Pangkalan Satu dengan menerapkan sistem SRI (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 20 Maret 2014 saat melakukan observasi lapangan)

Upaya peningkatan usaha pemenuhan cadangan pangan baru dilakukan pada tingkat keluarga saja, belum sampai pada tingkat masyarakat desa dan wilayah desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, di desa Pangkalan Satu belum terdapat lembaga cadangan pangan seperti lumbung desa. Masyarakat menyimpan cadangan pangan bagi rumah tangga masing-masing.

“cadangan pangan di desa dalam bentuk lumbung pangan belum ada. Untuk cadangan pangan beras saya stok sendiri di rumah, cukup untuk sebulan ke depan. Karena saya tidak punya sawah maka cadangan pangan beras tersebut saya beli dari toko di sekitar desa ini kan ada beberapa jumlahnya.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

b. Sub sistem Distribusi

Kelancaran distribusi pangan di wilayah desa Pangkalan Satu dapat dikatakan cukup lancar. Hal ini dilihat dari adanya akses jalan menuju desa tersebut. Jarak desa Pangkalan Satu ke ibukota kabupaten cukup dekat yaitu sekitar \pm 20 km. Dari hasil observasi peneliti di lapangan akses menuju desa berupa jalan yang cukup baik kondisinya.



Gambar 4.13. Subsistem distribusi pangan di desa Pangkalan Satu didukung dengan akses jalan yang kondisinya cukup baik (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 20 Maret 2014 saat melakukan observasi lapangan)

c. Sub sistem Konsumsi

Upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di desa Pangkalan Satu dilakukan melalui kegiatan Percepatan Penganekaragaman Pangan dan Gizi (P2KPG) pada tahun 2009. kegiatan ini merupakan kegiatan dari pusat melalui dana Tugas Pembantuan (TP) yang dilaksanakan di tingkat kabupaten di desa yang menerima program mandiri pangan. Bentuk kegiatan ini yaitu berupa pelatihan pengolahan produk pangan lokal bagi ibu-ibu rumah tangga sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut.

“pelatihan pengolahan pangan lokal dulu pernah ada dilaksanakan yaitu sekitar tahun 2009 melalui program P2KPG. Kami diberikan peralatan memasak dan diajari tentang mengolah bahan pangan seperti singkong, jagung, dan umbi-umbian menjadi produk panganan. Namun itu hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun saja, di tahun berikutnya kegiatan tersebut tidak ada lagi.” (Lisa, sekretaris kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“kegiatan P2KPG bagi kelompok wanita yang merupakan kelompok afinitas dilaksanakan di desa Pangkalan Satu pada tahun 2009. Adapun yang menjadi sasaran penerima manfaat adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang mempunyai anak balita dan wanita pasangan usia subur. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 3 macam yaitu sosialisasi P2KPG sebanyak 30 kali, pengadaan alat peraga/demonstrasi sebanyak 10 kali, dan pemanfaatan lahan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan dilaksanakan melalui pembuatan kebun kelompok dan pembuatan kebun di pekarangan masing-masing anggota. Anggaran biaya bersumber dari dana APBN sebesar Rp.28.000.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok wanita yang didukung oleh petugas pokja pangan dan gizi, Tim Pangan Desa dan Pendamping Desa Mandiri Pangan Setempat.” (Sudirman, aparat ketahanan pangan, wawancara 10 Juni 2014)



Gambar 4.14. Kelompok wanita anggota kelompok afinitas yang menjadi sasaran penerima manfaat kegiatan P2KPG di desa Pangkalan Satu (sumber data dokumentasi : Laporan Akhir Perkembangan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013)



Gambar 4.15. Sosialisasi kegiatan P2KPG didukung oleh Petugas Pokja Pangan dan Gizi, Tim Pangan Desa, dan Pendamping Desa Mandiri Pangan setempat (sumber data dokumentasi : Laporan Akhir Perkembangan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013)



Gambar 4.16. Pemanfaatan lahan pekarangan dalam kegiatan P2KPG berupa demplot kelompok wanita anggota kelompok afinitas di desa Pangkalan Satu (sumber data dokumentasi : Laporan Akhir Perkembangan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013)

Upaya memberikan pendidikan pangan dan gizi masyarakat melalui penyuluhan pangan dan gizi, penganekaragaman pola konsumsi, peningkatan keterampilan dan pengolahan pangan untuk peningkatan nilai tambah pangan dalam program aksi demapan di desa Pangkalan Satu belum dilaksanakan secara maksimal. Pertemuan rutin yang dilakukan kelompok-kelompok afinitas setiap bulannya hanya diisi oleh pengarahan dari pendamping saja. Upaya koordinasi lintas sektor melalui kerjasama dengan penyuluh kesehatan atau dengan pokja PKK tidak pernah dilakukan seperti dinyatakan oleh beberapa informan berikut.

“pertemuan rutin yang dilakukan kelompok Makmur selama ini diisi dengan pengarahan dari pendamping saja. Sementara pengarahan lintas sektor misalnya dari penyuluh kesehatan tentang konsumsi pangan yang sehat dan aman belum pernah dilakukan. (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“Selama saya ikut kegiatan demapan ini seingat saya tidak pernah ada pengarahan atau bimbingan dari dinas-dinas lain yang disampaikan melalui pertemuan rutin kelompok kami. Selama ini yang memberikan materi pendampingan ya dari pendamping saja. Saya sendiri termasuk anggota PKK di desa ini ya juga tidak pernah diajak untuk berkoordinasi misalnya, dari Penggerak PKK untuk mereka ikut rembug memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu kelompok afinitas kami ini.” (Lisa, sekretaris kelompok Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“pendampingan menurut saya masih kurang. Selama ini pengaruh pendampingan menurut saya di kelompok ya cuman untuk pengarahan, arisan, ngecek perguliran dana, setelah itu ya sudah, selesai, pulang. Kami pengarahan ya kami diarahkan untuk nanam tanaman kayak jagung, singkong. Cuman ya sebatas diarahkan nanam saja. Kan akan sangat bagus kalo ada pelatihan, kayak di kelompok kami ini kan banyak ibu-ibu. Coba misalkan diadakan pelatihan praktek bagaimana cara membuat panganan kayak bikin kue dari singkong, emping singkong, keripik singkong, emping melinjo. Lalu kami diarahkan ke mana untuk menjual panganan itu. Kalo begitu kan bagus untuk kami dapat keterampilan yang baru, bisa untuk menambah pendapatan. Atau praktek bikin kerajinan misalnya nyongket atau menjahit gitu, bikin taplak atau kerajinan lainnya, lalu dijual” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

Harmonisasi sistem ketahanan pangan di desa Pangkalan Satu dapat dikatakan belum dilakukan secara maksimal. Idealnya ketiga subsistem tersebut harus berjalan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan masyarakat di tingkat desa.

Tahap Pengembangan (Tahun Ketiga)

Tahap pengembangan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dimulai pada tahun ketiga. Arah pengembangan dilakukan melalui pengembangan kapasitas masing-masing lembaga sesuai dinamika dan peluang yang ada. Dari hasil observasi di lapangan melalui wawancara dengan informan, tahap pengembangan yang dilakukan di desa Pangkalan Satu tidak jauh berbeda dengan

kegiatan yang dilakukan pada tahap sebelumnya yaitu dari tahap penumbuhan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pertemuan rutin kelompok-kelompok afinitas setiap bulannya. Upaya pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan yang layak secara ekonomi tidak dilakukan secara berkelompok, melainkan individu per individu. Kondisi ini terjadi karena anggota kelompok lebih memilih untuk mengembangkan usahanya masing-masing dibanding jika berkelompok.

“Anggota kelompok afinitas dalam mengembangkan usahanya dilakukan masing-masing, tidak dalam bentuk usaha bersama. Mereka lebih memilih seperti itu karena jika usahanya dibentuk dalam kelompok mereka merasa lebih repot karena harus mengatur waktu serta keterbatasan dalam memahami manajemen kelompok.” (Mujiono, bendahara LKD, wawancara 03 Juni 2014).

“Kalo untuk usaha bersama (kelompok) belum ada. Dulu kan bertani, pinjam sama kantor desa lebihan tanah, nanam jagung, nanam kacang, akhirnya tekor juga. Pinjam dari PMUK sekian, nggak kembali, soalnya tanahnya pasir melulu disini, kurang subur. Dua minggu sekali royongan, bersihkan, nyangkut. Sudah berjalan beberapa tahun nanam, tapi ya tekor, modal nggak kembali.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“kalo diarahkan untuk membuat usaha kelompok bareng-bareng ya pernah, kami menanam tanaman pangan waktu itu. Cuma karena tidak berhasil panennya ya sudah nggak tidak dilanjutkan lagi.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

Tahap Kemandirian (Tahun Keempat)

Proses kemandirian masyarakat dilaksanakan pada tahun keempat sampai terwujudnya ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Proses kemandirian masyarakat desa ditandai dengan: (1) Meningkatnya peran masyarakat dalam penyediaan dan distribusi pangan; (2) Meningkatnya kemampuan kelompok afinitas dalam melakukan kegiatan usaha; (3)

Meningkatnya kemandirian kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan; (4) Meningkatkan jaringan kemitraan usaha dan lembaga keuangan/bank; (5) Meningkatkan peran Tim Pangan Desa sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan.

Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan dan distribusi pangan pada tahap kemandirian proksi demapan di Desa Pangkalan Satu jika dibandingkan dengan kondisi sebelum masyarakat menjadi peserta program ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Namun peningkatan penyediaan dan distribusi pangan tersebut lebih didukung oleh jalur akses keluar dan masuk ke desa ini cukup lancar. Sebagian besar masyarakat memiliki usaha di bidang perkebunan yaitu kelapa sawit dan tanaman karet. Hasil perkebunan tersebut kemudian dijual melalui tengkulak keliling untuk dibawa ke perusahaan pengolahan yang letaknya berada di luar desa Pangkalan Satu. Hasil penjualan produk perkebunan tersebut yang kemudian digunakan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Distribusi pangan cukup lancar, hal ini dapat dilihat dari terdapatnya beberapa toko sembako di desa tersebut dimana masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan.

“untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saya biasanya beli di toko sembako di desa ini kan sudah ada. Karena saya tidak punya sawah maka untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok saya membeli dari toko sembako yang ada. Untuk pangan lain seperti sayur, saya coba memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di samping rumah, sebagian lain beli dari pedagang sayur keliling.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“untuk kebutuhan beras sehari-hari saya tidak membeli di toko, karena sudah ada hasil panen sendiri dari sawah saya yang ikut program SRI. Kelebihan hasil panennya saya simpan untuk stok kebutuhan keluarga saya di rumah. Kalo untuk kebutuhan pangan lainnya seperti sayur-sayuran sebagian saya tanam di pekarangan, sebagian lagi saya beli dari pedagang sayur keliling.” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).



Gambar 4.17. Sebagian besar masyarakat desa Pangkalan Satu memiliki matapencaharian sebagai petani kebun tanaman karet dan kelapa sawit, akses penjualan hasil perkebunan didukung oleh kondisi jalan yang cukup baik (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 20 Mei 2014 saat melakukan observasi lapangan)

Sebagian besar anggota kelompok afinitas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan dengan jenis tanaman karet dan kelapa sawit. Usaha tersebut telah cukup membantu masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan. Hasil penjualan dari panen kebunnya itulah yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari. Untuk penjualan hasil panen kebun masyarakat tidak mengalami kesulitan karena sudah ada para tengkulak keliling yang siap membeli hasil panennya. Pinjaman dana PMUK dalam progsi demapan membantu para anggota kelompok untuk membeli modal pupuk.

“Di sini (masyarakatnya) berkebun semua. Pendamping dulu pernah memberikan penyuluhan tentang budidaya tanaman pangan, tapi di sini masyarakatnya biasa budidaya perkebunan, kalo nggak sawit ya karet. Lahan di sini sudah nggak ada yang ndak ditanami sawit atau karet, nggak ada sisanya. Orang itu pinjam untuk beli pupuk, rondap. Usaha selain perkebunan di sini tempe ada 2 titik, tahu 1 titik, ada juga yang ternak ayam.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Peningkatan kemampuan kelompok afinitas dalam melakukan kegiatan usaha belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya penyuluhan baik oleh pendamping, LKD, TPD, aparat desa, aparat kabupaten, maupun petugas lintas sektoral bagi para anggota kelompok afinitas. Sedangkan kemampuan dalam melakukan kegiatan usaha yang ada didapatkan masyarakat dari pengalaman pribadi sebelumnya.

“Anggota kelompok selain setoran, pinjaman dan angsuran, pembahasan lain yang dibicarakan (penyuluhan/pembinaan) ya ndak ada. Ya cuman, angsuran, arisan, diam. Kalo TPD, LKD ndak ada siapa yang bicarakan? Penyuluh ndak ada. Ya cuman menjalankan uangnya itu aja, rutin itu aja. Masyarakat sini tau budidaya karet juga dari pengalaman sendiri dulu waktu kerja kebun karet di PIR.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“Usaha saya adalah produksi tempe, ilmunya saya dapatkan dari pengalaman sendiri, dulu di Jawa saya sudah biasa membuat tempe. Lalu di desa ini saya coba membuat tempe juga. Saya menjualnya di dalam desa ini saja kepada masyarakat. Satu hari biasanya terjual sekitar 4-5 kilo. Untuk modal beli kedelai saya pinjam dari dana PMUK. Saya membungkusnya dengan daun, tidak dengan plastik karena berdasarkan pengalaman tempe yang dibungkus dengan daun rasanya lebih enak dibanding yang dibungkus dengan plastik.” (Sarijo, anggota kelompok Makmur, wawancara 13 Mei 2014).

Upaya peningkatan jaringan kemitraan usaha tidak dilakukan secara terpadu, melainkan diusahakan oleh masing-masing anggota kelompok. Seperti dalam mencari pemasar hasil perkebunan tanaman karet dan buah kelapa sawit jaringannya dibentuk oleh masing-masing anggota kelompok. Sementara untuk lembaga keuangan/bank, anggota kelompok afinitas proksi demapan di desa Pangkalan Satu belum melakukan kerjasama dengan lembaga bank manapun untuk memperbesar akses permodalan yang dilakukan secara terpadu dengan dikoordinasikan melalui LKD.

“hasil kebun karet dan kelapa sawit kami sudah ada yang pasti akan membelinya yaitu para tengkulak yang juga merupakan penduduk desa ini. Mereka membeli hasil panen kami untuk kemudian dijual kepada perusahaan pengolahan hasil perkebunan. Kami sudah ada langganan tengkulak masing-masing, jadi kami tidak kebingungan untuk mencari pembeli hasil panen kebun. Hal tersebut kami lakukan sendiri-sendiri, tidak melalui koordinasi dengan lembaga di progsi demapan seperti TPD atau LKD.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

Sementara untuk pengembangan jenis usaha lain seperti ternak ayam, masyarakat menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta PT. Unggas Bersama yang memberi bantuan berupa bibit, pakan, dan obat bagi masyarakat yang berminat melakukan usaha ternak ayam. Masyarakat cukup menyiapkan kandangnya. Modal pembuatan kandang ini diperoleh masyarakat melalui peminjaman dana PMUK.

“saya mencoba usaha beternak ayam potong, sudah saya siapkan kandangnya, tinggal menghubungi pihak PT. Unggas Bersama untuk memberikan bantuan bibit dan pakannya. Di desa ini sudah ada beberapa masyarakat yang menjalankan usaha ternak ini, cukup berhasil, karena untuk pemeliharaan ternak seperti suntik vitamin dan obat-obatan pun disediakan dan dilakukan oleh petugas dari PT tersebut. Nanti saat panen mereka juga yang akan membelinya, jadi kerjasama masyarakat dengan PT tersebut adalah sistem bagi hasil.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Upaya peningkatan peran Tim Pangan Desa sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa Pangkalan Satu dinilai belum maksimal. Peran TPD baru sebatas memberikan pengarahan dalam administrasi perguliran dana PMUK yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan rutin kelompok afinitas. Bahkan setelah memasuki tahun kedua tahap kemandirian TPD tidak aktif menjalankan fungsinya yang dilihat dari ketidakhadirannya dalam pertemuan rutin kelompok afinitas.

“Anggota kelompok selain setoran, pinjaman dan angsuran, pembahasan lain yang dibicarakan (penyuluhan/pembinaan) ya ndak ada. Ya cuman, angsuran, arisan, diam. Kalo TPD, LKD ndak ada siapa yang bicarakan? Penyuluh ndak ada. Ya cuman menjalankan uangnya itu aja, rutin itu aja. Bicara sama siapa. Kalo dulu kan ada sistem orang tua, sekarangkan ndak ada. Ibaratnya anak sama orangtua kan dulu ada yang mimpin, sekarang sudah ndak ada. Seharusnya kan ada (perwakilan dari desa, TPD, atau LKD) 1 orang datang ke pertemuan. Satu tahun kemaren sama sekali nggak ada. Dari desa kan banyak, sudah dibagi-bagi (tugasnya) tapi ini ndak ada yang datang. Harusnya ada dari desa itu 1 orangkah, umpama ada kegiatan (di desa) apa kan tau anggota itu.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Program aksi desa mandiri pangan dirancang dalam 4(empat) tahap, setiap tahap dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sehingga pada tahun kelima desa Pangkalan Satu diharapkan sudah menjadi desa yang mandiri pangan. Sistem ketahanan pangan dibangun oleh tiga subsistem yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Desa Pangkalan Satu dapat dikategorikan sebagai desa mandiri pangan jika ditinjau dari subsistem distribusi dan akses pangan. Hal ini dapat tercapai karena didukung oleh kondisi infrastruktur yaitu akses jalan yang cukup baik. Pemasaran hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat tidak mengalami kendala karena sudah terbentuk jaringan pemasaran, meski jaringan tersebut tidak dibentuk melalui progsi demapan melainkan diusahakan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ditinjau dari subsistem ketersediaan, jika hanya mengandalkan hasil produksi lokal maka desa Pangkalan Satu masih tergolong sebagai desa yang rawan pangan. Hanya sedikit masyarakat yang mengembangkan usahanya di sektor pertanian, sebagian besar lahan yang ada dikembangkan untuk usaha perkebunan.

“Di sini (masyarakatnya) berkebun semua. Pendamping dulu pernah memberikan penyuluhan tentang budidaya tanaman pangan, tapi di sini masyarakatnya biasa budidaya perkebunan, kalo nggak sawit ya karet. Lahan di sini sudah nggak ada yang ndak ditanami sawit atau karet, nggak ada sisanya. Orang itu pinjam untuk beli pupuk, rondap. Usaha selain perkebunan di sini tempe ada 2 titik, tahu 1 titik, ada juga yang ternak ayam.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Namun ketersediaan pangan di desa Pangkalan Satu ditunjang oleh terdapatnya toko-toko sembako di desa tersebut sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses kebutuhan pangan mereka. Sedangkan masyarakat yang memiliki lahan sawah telah dapat menyimpan cadangan pangan pokok bagi keluarganya.

“untuk kebutuhan beras sehari-hari saya tidak membeli di toko, karena sudah ada hasil panen sendiri dari sawah saya yang ikut program SRI. Kelebihan hasil panennya saya simpan untuk stok kebutuhan keluarga saya di rumah. Kalo untuk kebutuhan pangan lainnya seperti sayur-sayuran sebagian saya tanam di pekarangan, sebagian lagi saya beli dari pedagang sayur keliling.” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

Ditinjau dari subsistem konsumsi, masyarakat di desa Pangkalan Satu masih tergolong rawan pangan. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang memenuhi standar kecukupan gizi melalui pola makan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam proksi demapan yang dilaksanakan sejak tahun 2008 belum pernah dilakukan upaya penyuluhan yang berkesinambungan dari lintas sektor terkait yaitu kesehatan. Kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan subsistem konsumsi hanya dilakukan melalui kegiatan P2KPG saja yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 2009-2010 saat desa Pangkalan Satu memasuki tahap penumbuhan dan pengembangan. Pada tahun berikutnya kegiatan tersebut tidak dilanjutkan. Pendampingan sebagai proses

pembelajaran dan pendidikan masyarakat hanya dilakukan oleh pendamping saja, tidak dilakukan upaya koordinasi dengan petugas kesehatan setempat. Selain itu upaya diversifikasi pangan melalui pengembangan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama dengan pokja PKK yang membidangnya juga belum pernah dilakukan bagi kelompok afinitas.

“pendampingan menurut saya masih kurang. Selama ini pengaruh pendampingan menurut saya di kelompok ya cuman untuk pengarahan, arisan, ngecek perguliran dana, setelah itu ya sudah, selesai, pulang. Kami pengarahan ya kami diarahkan untuk nanam tanaman kayak jagung, singkong. Cuman ya sebatas diarahkan nanam saja. Kan akan sangat bagus kalo ada pelatihan, kayak di kelompok kami ini kan banyak ibu-ibu. Coba misalkan diadakan pelatihan praktek bagaimana cara membuat panganan kayak bikin kue dari singkong, emping singkong, keripik singkong, emping melinjo. Lalu kami diarahkan ke mana untuk menjual panganan itu. Kalo begitu kan bagus untuk kami dapat keterampilan yang baru, bisa untuk menambah pendapatan. Atau praktek bikin kerajinan misalnya nyongket atau menjahit gitu, bikin taplak atau kerajinan lainnya, lalu dijual” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“Selama saya ikut kegiatan demapan ini seingat saya tidak pernah ada pengarahan atau bimbingan dari dinas-dinas lain yang disampaikan melalui pertemuan rutin kelompok kami. Selama ini yang memberikan materi pendampingan ya dari pendamping saja. Saya sendiri termasuk anggota PKK di desa ini ya juga tidak pernah diajak untuk berkoordinasi misalnya, dari Penggerak PKK untuk mereka ikut rembug memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu kelompok afinitas kami ini.” (Lisa, sekretaris kelompok Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

Evaluasi proses dalam model CIPP menurut Suharsimi Arikunto (2009) menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh Stufflebeam diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses yaitu : (1) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?; (2)

Apakah staf yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?; (3) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?; (4) Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?

Evaluasi proses program aksi desa mandiri pangan di Desa Pangkalan Satu pelaksanaan programnya sudah sesuai dengan jadwal, yaitu dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang dibagi dalam 4 (empat) tahap. Pada tahun 2008 tahun pertama dilaksanakan tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi program, pembentukan kelompok afinitas yang anggotanya merupakan masyarakat rumah tangga miskin hasil dari survey DDRT, pembentukan Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, dan penetapan pendamping desa. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan proses di tahap persiapan progsi demapan ini, yaitu tidak aktifnya peran instansi lintas sektor terkait dalam wadah pokja progsi demapan. Payung hukum berupa Surat Keputusan Bupati nomor 191.4/SK/KP.010/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 rupanya tidak digunakan sebaik-baiknya dalam upaya pemberdayaan masyarakat sasaran kegiatan. Padahal jika dilihat dari susunannya, anggota pokja tersebut merupakan pihak-pihak yang mempunyai daya (*power*) untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat, baik melalui penyuluhan ataupun membantu menyiapkan akses bagi potensi usaha yang dimiliki masyarakat. Fungsi pokja progsi demapan hanya berjalan pada tingkat rapat dewan ketahanan kabupaten saja, tidak sampai

menyentuh masyarakat akar rumput sebagai sasaran kegiatan program. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada peran serta anggota pokja sejak awal program yaitu kegiatan mensosialisasikan program kepada masyarakat desa saat tahap persiapan. Sosialisasi program hanya dilakukan oleh instansi pengelola program dalam hal ini yaitu KPPKP. Tidak aktifnya peran pokja progsi demapan tersebut berakibat pada terbatasnya akses sumber daya dalam proses pembelajaran masyarakat kelompok afinitas untuk meningkatkan keberdayaannya. Hal ini antara lain bisa dilihat dari isi materi dalam pertemuan rutin kelompok yang cenderung monoton karena hanya diisi oleh pendamping saja. Padahal jika dilihat dari tingkat antusiasme kelompok afinitas terhadap upaya pemberdayaan cukup tinggi.

“sejak saya ikut jadi anggota kelompok afinitas di program mapan ini tahun 2008, seingat saya belum pernah mendapat pelatihan. Baik itu dari propinsi, kabupaten, atau dari desa. Kalau memang diadakan yang saya mau saja to ikut, kan bisa nambah pengetahuan apa gitu.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“anggota kelompok karya sejahtera ini kan banyak ibu-ibu mbak. Kalo seumpama kita ada diajak ikut pelatihan misalkan kayak diajari bagaimana membuat panganan dari bahan lokal gitu ya kami sangat setuju. Kan bisa menambah keterampilan kami para ibu-ibu anggota kelompok. Kami bisa jadi lebih kreatif, terus seumpama peluangnya bagus kan bisa jadi modal untuk nambah pendapatan. (Romdiah, anggota kelompok Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah minimnya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dalam progsi demapan di desa Pangkalan Satu. Dari hasil observasi dokumen dan wawancara peneliti terhadap informan, diketahui bahwa hanya sekali dilakukan pelatihan bagi pendamping yaitu pelatihan PRA dan pelatihan pemberdayaan kelompok yang difasilitasi oleh Kantor Bimas Ketahanan Provinsi Kalimantan Tengah. Itupun dilaksanakan pada tahun 2006 ketika

pendamping masih berstatus sebagai pendamping progsi demapan di desa lain. Ketika pendamping ditugaskan di desa Pangkalan Satu dari tahun 2008-2011 belum pernah mendapat pelatihan lanjutan. Sementara pendamping kabupaten yang melanjutkan tugas pendampingan pada tahap kemandirian lanjutan hanya mendapat pelatihan ketika masih bertugas sebagai pendamping progsi demapan di desa lain. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga lainnya yaitu LKD yang hanya sebanyak 1 (satu) kali mendapat pelatihan dari tingkat propinsi yaitu pada tahun 2011, itupun dengan materi yang tidak sinkron dengan kondisi desa Pangkalan Satu. Pada tahun 2011 desa Pangkalan Satu sudah memasuki tahap kemandirian, sementara materi pelatihan yang diikuti oleh pengurus LKD adalah persiapan bagi desa-desa baru yang akan menerima program. Untuk lembaga lainnya yaitu TPD bahkan belum pernah mendapatkan materi pelatihan tentang bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya sebagai motor penggerak ketahanan pangan tingkat desa. Minimnya pelatihan berakibat pada minimnya pemahaman komponen-komponen tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

“Selama saya menjadi pengurus LKD dalam program demapan ini baru sekali saja mengikuti pelatihan, yaitu pelatihan yang diadakan oleh BKP Propinsi di Palangkaraya tahun 2011. Tapi sayangnya pelatihan itu menurut saya tidak sesuai dengan kondisi di Pangkalan Satu ini. Pada tahun 2011 kan desa ini sudah memasuki tahun keempat, tahap kemandirian. Sementara materi pelatihan yang saya ikuti itu adalah tentang persiapan bagi desa-desa calon penerima program demapan.” (Jarwanto, ketua LKD, wawancara 21 Juni 2014).

“Saya selaku aparat kabupaten yang menangani progsi demapan ini pernah mengikuti pelatihan yang diperuntukkan bagi pengurus LKD tahun 2011 yang diadakan oleh BKP Provinsi Kalteng di Palangkaraya. Sayangnya materi pelatihan tersebut tidak sesuai untuk Desa Pangkalan Satu. Materi pelatihan adalah tentang persiapan bagi desa-desa calon penerima program, sementara Desa Pangkalan

Satu pada tahun tersebut telah memasuki tahun keempat, yaitu tahap kemandirian.” (Sudirman, aparat ketahanan pangan, wawancara 10 Juni 2014).

“Tahun 2008 sampai dengan 2013 saya sebagai pengurus TPD belum pernah mengikuti pelatihan progsi demapan. Pada tahun 2014 ini pun dalam tugas saya sebagai bendahara LKD, saya belum pernah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai anggota tim penggerak ketahanan pangan dalam progsi demapan ini.” (Mujiono, bendahara LKD, wawancara 03 Juni 2014).

“Pelatihan yang pernah saya ikuti dalam progsi demapan ini adalah Pelatihan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang difasilitasi oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut di Binuang Kalimantan Selatan pada tanggal 11-15 Juni 2007. Ketika itu saya masih bertugas sebagai pendamping di desa Sebuai. Sementara untuk kegiatan pelatihan yang lain belum pernah ada lagi.” (Kun Aliman, pendamping kabupaten, wawancara 03 April 2014).

“Pelatihan bagi pengurus kelompok, pengurus LKD, serta pengurus TPD memang sangat jarang dilakukan. Pada tahun 2011 diadakan satu kali pelatihan yaitu bagi pengurus LKD oleh BKP Provinsi di Palangkaraya, namun materi pelatihan tidak sesuai dengan kondisi desa Pangkalan Satu.” (Amrul Hasani, aparat ketahanan pangan, wawancara 13 Juni 2014).

Minimnya pelatihan bagi komponen-komponen dalam progsi demapan ini berlanjut hingga memasuki tahap penumbuhan, pengembangan, dan tahap kemandirian. Upaya pembinaan memang pernah dilakukan dari tingkat propinsi bagi desa Pangkalan Satu dengan cara turun langsung ke lapangan, yaitu pada tahun 2011 ketika desa Pangkalan Satu telah memasuki tahap kemandirian. Namun upaya ini adalah sebatas pemantauan saja, tidak ada upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan pelaksanaan progsi demapan agar lebih baik, yaitu melalui pelatihan.



4.18. Monitoring dari propinsi ke desa Pangkalan Satu untuk meninjau pelaksanaan progsi depaman yang telah memsuki tahap kemandirian pada tahun 2011 (sumber data dokumentasi : Laporan Akhir Perkembangan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013)

Konsep pemberdayaan menurut Pearson *et al* (1994) menekankan bahwa orang perlu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Upaya ini antara lain adalah melalui pelatihan untuk membuka wawasan, keterampilan dan pengetahuan yang pada gilirannya akan memperbesar ruang gerak dan pola pikir setiap komponen program untuk meningkatkan keberdayaannya.

Komponen yang terlibat dalam pelaksanaan progsi depaman memasuki tahap kemandirian dan memiliki peran yang semakin besar dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat adalah lembaga LKD dan TPD. Peran LKD dalam pengembangan selanjutnya adalah untuk : pertama, mempersiapkan terciptanya akses atau kesempatan bagi mayarakat dalam memperoleh bantuan. Kedua, mempersiapkan masyarakat lapisan bawah untuk dapat mendayagunakan bantuan

tersebut sehingga dapat menjadi modal bagi kegiatan usaha. Ketiga, menanamkan pengertian bahwa bantuan yang diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari surplus yang diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi ini berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. Dalam pelaksanaannya di lapangan dari hasil observasi peneliti, LKD dan juga TPD sudah cukup baik dalam menangani kegiatan selama progsi demapan berlangsung. Namun hanya sejauh kemampuan menggulirkan dana bantuan PMUK saja. Sementara dalam hal pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat belum maksimal. Ruang gerak LKD belum sampai menyentuh upaya membantu masyarakat untuk membangun jaringan pemasaran hasil/produk usaha mereka. Masyarakat secara sendiri-sendiri mencari jaringan pemasaran di sekitar desa.

“hasil kebun karet dan kelapa sawit kami sudah ada yang pasti akan membelinya yaitu para tengkulak yang juga merupakan penduduk desa ini. Mereka membeli hasil panen kami untuk kemudian dijual kepada perusahaan pengolahan hasil perkebunan. Kami sudah ada langganan tengkulak masing-masing, jadi kami tidak kebingungan untuk mencari pembeli hasil panen kebun. Hal tersebut kami lakukan sendiri-sendiri, tidak melalui koordinasi dengan lembaga di progsi demapan seperti TPD atau LKD.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

“saya mencoba usaha beternak ayam potong, sudah saya siapkan kandangnya, tinggal menghubungi pihak PT. Unggas Bersama untuk memberikan bantuan bibit dan pakannya. Di desa ini sudah ada beberapa masyarakat yang menjalankan usaha ternak ini, cukup berhasil, karena untuk pemeliharaan ternak seperti suntik vitamin dan obat-obatan pun disediakan dan dilakukan oleh petugas dari PT tersebut. Nanti saat panen mereka juga yang akan membelinya, jadi kerjasama masyarakat dengan PT tersebut adalah sistem bagi hasil.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“Usaha saya adalah produksi tempe, ilmunya saya dapatkan dari pengalaman sendiri, dulu di Jawa saya sudah biasa membuat tempe. Lalu di desa ini saya coba membuat tempe juga. Saya menjualnya di dalam desa ini saja kepada masyarakat. Satu hari biasanya terjual sekitar 4-5 kilo. Saya membungkusnya dengan daun, tidak dengan plastik karena berdasarkan pengalaman tempe yang dibungkus dengan daun rasanya lebih enak dibanding yang dibungkus dengan plastik.” (Sarijo, anggota kelompok Makmur, wawancara 13 Mei 2014).

Hambatan-hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan proksi demapan di desa Pangkalan Satu antara lain yaitu masih kurangnya peran masing-masing komponen program. Pendamping yang menggantikan peran pendamping desa sebelumnya merupakan pendamping kabupaten yang ruang kerjanya mencakup seluruh desa-desa mapan yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini berakibat upaya pendampingan di desa Pangkalan Satu menjadi kurang maksimal karena pendamping kabupaten tidak fokus hanya di satu desa saja. Dan tentu saja dengan kondisi demikian upaya pelaksanaan program agar lebih baik tidak dapat hanya mengandalkan peran pendamping saja. Belum lagi tidak adanya upaya mengkoordinasikan kegiatan pendampingan dengan lembaga penyuluhan yang ada di desa tersebut. Kemudian kurangnya pemahaman LKD dan TPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“kami selaku TPD tentu tidak bisa memberikan pinjaman begitu saja. Tugas TPD adalah memverifikasi RUK calon peminjam. Tujuannya adalah demi kelancaran perguliran dana PMUK yang ada. Dana ini kan sifatnya dana abadi, dan setiap anggota berhak untuk dapat memanfaatkannya. Tugas kami selaku TPD adalah memastikan agar perguliran dana tersebut lancar, tidak ada yang macet di anggota. Kami perlu memverifikasi calon peminjam apakah usulannya layak dan apakah besaran pinjaman sesuai dengan profil kemampuannya. Kemudian setelah kami verifikasi pun RUK tersebut akan dikoordinasikan dengan kepala desa untuk diketahui beliau.” (Kasno, pengurus TPD, wawancara 11 Mei 2014).

“anggota LKD ini sebenarnya ada 6(enam) orang, namun yang aktif melakukan tugasnya hanya 3 (tiga) orang saja, yaitu saya selaku ketua, sekretaris dan bendahara. 3 (tiga) anggota lainnya tidak, karena bingung juga apa yang mau dikerjakan kurang jelas tugasnya.” (Jarwanto, ketua LKD, wawancara wawancara 21 Juni 2014).

Peran KPPKP sebagai instansi pengelola kegiatan di tingkat kabupaten juga belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya upaya aparat kabupaten untuk memfasilitasi pendamping, LKD, dan TPD dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat melakukan pembinaan yang lebih baik lagi kepada masyarakat kelompok afinitas. Misalnya melalui kegiatan pelatihan di kabupaten dengan mengundang keterlibatan instansi lintas sektor terkait urusan pangan atau dari tingkat propinsi.

4. Evaluasi Hasil (*Product*) Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Evaluasi hasil merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mengukur *outcome* dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambil keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

Progsi demapan di desa Pangkalan Satu mulai dilaksanakan sejak tahun 2008 dan masih berjalan hingga saat ini tahun 2014. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk mengubah kondisi desa yang awalnya tergolong sebagai desa rawan pangan menjadi desa yang mandiri pangan. Pada awal tahun 2008 berdasarkan hasil survey DDRT diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin mencapai 36,5%. Pada tahun 2013 dari hasil observasi dokumen database progsi demapan jumlah rumah tangga miskin di desa Pangkalan Satu berkurang menjadi

17,63%. Turunnya prosentase rumah tangga miskin ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator berhasilnya upaya mengubah desa rawan pangan ini menjadi desa yang mandiri pangan.

Kaitannya dengan progsi demapan, penurunan prosentase angka rumah tangga miskin tersebut lebih disebabkan karena adanya bantuan akses dana bantuan PMUK bagi masyarakat desa khususnya yang tergabung menjadi anggota kelompok afinitas.

“Di sini (masyarakatnya) berkebun semua. Pendamping dulu pernah memberikan penyuluhan tentang budidaya tanaman pangan, tapi di sini masyarakatnya biasa budidaya perkebunan, kalo nggak sawit ya karet. Lahan di sini sudah nggak ada yang ndak ditanami sawit atau karet, nggak ada sisanya. Orang itu pinjam untuk beli pupuk, rondap. Usaha selain perkebunan di sini tempe ada 2 titik, tahu 1 titik, ada juga yang ternak ayam.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“Usaha saya adalah produksi tempe, ilmunya saya dapatkan dari pengalaman sendiri, dulu di jawa saya sudah biasa membuat tempe. Lalu di desa ini saya coba membuat tempe juga. Saya menjualnya di dalam desa ini saja kepada masyarakat. Satu hari biasanya terjual sekitar 4-5 kilo. Untuk modal beli kedelai saya pinjam dari dana PMUK. Saya membungkusnya dengan daun, tidak dengan plastik karena berdasarkan pengalaman tempe yang dibungkus dengan daun rasanya lebih enak dibanding yang dibungkus dengan plastik.” (Sarijo, anggota kelompok Makmur, wawancara 13 Mei 2014).

“pengaruh progsi demapan di desa Pangkalan Satu ini menurut saya lebih kepada faktor dana bantuan PMUK. Untuk modal usaha masyarakat bisa meminjam dana PMUK secara bergiliran, dana tersebut digunakan misalnya untuk membeli pupuk bagi masyarakat yang usahanya dibidang pertanian dan perkebunan, atau untuk modal membeli bahan baku untuk yang usahanya di bidang pangan. Kelebihan meminjam di progsi demapan ini adalah masyarakat cukup membuat RUK disertai surat perjanjian, tanpa perlu memberikan semacam jaminan pinjaman. Sementara kalau untuk pengarahan atau memberikan materi pembelajaran untuk masyarakat menurut saya masih kurang. Karena keterbatasan kami juga. Kalau peran saya sebagai ketua LKD sudah berusaha sebisa saya, misalnya membantu anggota dalam mengisi RUK sebagai syarat meminjam. Sebenarnya saya sudah pernah usul ke kantor ketahanan pangan, untuk mengadakan semacam pelatihan supaya kemampuan kami meningkat dalam menjalankan peran kami sebagai LKD, cuman sampe sekarang belum ada. Tahun 2011 saya pernah ikut pelatihan

di propinsi, namun materinya menurut saya kurang mengena.” (Jarwanto, Ketua LKD, wawancara 21 Juni 2014).

“Pak Mudhori dulu selaku pendamping termasuk rajin, dia selalu hadir kalau kami ada pertemuan rutin kelompok setiap bulannya. Dalam pertemuan itu materi yang diberikan ya cukup beragam. Seingat saya dulu pernah juga diberi materi tentang budidaya tanaman pangan, kayak jagung, tanaman hortikultura, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Terutama kami juga dibimbing dalam mengelola keuangan kelompok, bagaimana supaya program ini bisa terus berjalan, kami harus disiplin dalam mengelolanya, termasuk soal pemanfaatan dana bantuan serta punya kebiasaan menabung.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“Selama saya ikut kegiatan demapan ini seingat saya tidak pernah ada pengarahan atau bimbingan dari dinas-dinas lain yang disampaikan melalui pertemuan rutin kelompok kami. Selama ini yang memberikan materi pendampingan ya dari pendamping saja. Saya sendiri termasuk anggota PKK di desa ini ya juga tidak pernah diajak untuk berkoordinasi misalnya, dari Penggerak PKK untuk mereka ikut rembug memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu kelompok afinitas kami ini.” (Lisa, sekretaris kelompok Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“saya selama ikut jadi anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera belum pernah mendapat penyuluhan dari penyuluh desa yaitu Pak Jumarno. Tapi selain di demapan ini saya juga ikut jadi anggota kelompok gapoktan. Kan di desa ini ada program SRI mulai tahun 2006, saya diajari melalui sekolah lapangan dalam kegiatan gapoktan ini tentang bagaimana cara budidaya padi dengan sistem SRI. Dengan sistem SRI ini kami diajari bagaimana cara menanam padi, membuat MOL, dan pemanfaatan serangga predator sebagai musuh alami hama yang menyerang tanaman padi oleh bapak penyuluh. Setiap bulan saya pasti sekolah di situ sama Pak Jumarno. Cuman kalo melalui kegiatan pertemuan rutin kelompok, memang tidak pernah ada penyuluhan.” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“Pada tahap persiapan memang ada dibentuk kelompok kerja atau disebut pokja yang khusus menangani kegiatan program aksi desa mandiri pangan. Anggotanya berasal dari lintas sektor terkait urusan pangan. Ada dari distanak, diskanla, disperindag, dinas kesehatan, koperasi, juga penggerak PKK. Penetapannya dengan SK Bupati. Dalam pelaksanaannya untuk koordinasi lintas sektor mereka melalui rapat-rapat. Tujuan dibentuknya pokja ini supaya kegiatan pemberdayaan kelompok afinitas untuk mewujudkan kemandirian pangan bisa lebih luas dan terintegrasi. Tapi selama ini saya lihat *action* di lapangannya sangat minim bahkan bisa dibilang tidak ada. Contohnya waktu kami sosialisasi program ke masyarakat desa dulu di tahap persiapan yang hadir hanya dari ketahanan pangan

saja, sementara dari dinas-dinas lain tidak ikut hadir. (Amrul Hasani, aparat ketahanan pangan, wawancara 13 Juni 2014).

Sasaran akhir kegiatan progsi demapan adalah untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat miskin di desa rawan pangan. Tingkat keberhasilan program ini diukur dengan indikator *output* yaitu : (1) peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang dimiliki kelompok dan perorangan; (2) perkembangan ketersediaan pangan masyarakat; (3) peningkatan kemampuan daya beli dan akses pangan rumah tangga. Indikator *outcome* yaitu : (1) perkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh Lembaga Keuangan Desa (LKD); (2) perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman; (3) penambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaan; (4) penurunan jumlah rumah tangga penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin).

Usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang terdapat di desa Pangkalan Satu adalah usaha perorangan, belum ada yang merupakan usaha bersama kelompok.



Gambar 4.19. Usaha produktif berbasis sumber daya lokal pembuatan emping singkong yang dimiliki oleh anggota kelompok afinitas (sumber data

dokumentasi : Laporan Akhir Perkembangan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013)



Gambar 4.20. Usaha produktif berbasis sumber daya lokal pembuatan emping melinjo yang dimiliki oleh anggota kelompok afinitas (sumber data dokumentasi : Laporan Akhir Perkembangan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013)

“Anggota kelompok afinitas dalam mengembangkan usahanya dilakukan masing-masing, tidak dalam bentuk usaha bersama. Mereka lebih memilih seperti itu karena jika usahanya dibentuk dalam kelompok mereka merasa lebih repot karena harus mengatur waktu serta keterbatasan dalam memahami manajemen kelompok.” (Mujiono, bendahara LKD, wawancara 03 Juni 2014).

Upaya pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan yang layak secara ekonomi tidak dilakukan secara berkelompok, melainkan individu per individu. Kondisi ini terjadi karena anggota kelompok lebih memilih untuk mengembangkan usahanya masing-masing dibanding jika berkelompok. demikian juga dalam hal pemasaran hasil usaha produktif mereka melakukannya secara sendiri-sendiri.

“Usaha saya adalah produksi tempe, ilmunya saya dapatkan dari pengalaman sendiri, dulu di Jawa saya sudah biasa membuat tempe. Lalu di desa ini saya coba membuat tempe juga. Saya menjualnya di dalam desa ini saja kepada masyarakat. Satu hari biasanya terjual sekitar 4-5 kilo. Untuk modal beli kedelai saya pinjam

dari dana PMUK. Saya membungkusnya dengan daun, tidak dengan plastik karena berdasarkan pengalaman tempe yang dibungkus dengan daun rasanya lebih enak dibanding yang dibungkus dengan plastik.” (Sarijo, anggota kelompok Makmur, wawancara 13 Mei 2014).

“hasil kebun karet dan kelapa sawit kami sudah ada yang pasti akan membelinya yaitu para tengkulak yang juga merupakan penduduk desa ini. Mereka membeli hasil panen kami untuk kemudian dijual kepada perusahaan pengolahan hasil perkebunan. Kami sudah ada langganan tengkulak masing-masing, jadi kami tidak kebingungan untuk mencari pembeli hasil panen kebun. Hal tersebut kami lakukan sendiri-sendiri, tidak melalui koordinasi dengan lembaga di progsi demapan seperti TPD atau LKD.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

“saya mencoba usaha beternak ayam potong, sudah saya siapkan kandangnya, tinggal menghubungi pihak PT. Unggas Bersama untuk memberikan bantuan bibit dan pakannya. Di desa ini sudah ada beberapa masyarakat yang menjalankan usaha ternak ini, cukup berhasil, karena untuk pemeliharaan ternak seperti suntik vitamin dan obat-obatan pun disediakan dan dilakukan oleh petugas dari PT tersebut. Nanti saat panen mereka juga yang akan membelinya, jadi kerjasama masyarakat dengan PT tersebut adalah sistem bagi hasil.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Perkembangan ketersediaan pangan masyarakat di desa Pangkalan Satu dapat dikatakan cukup baik. Hal ini lebih didukung oleh cukup baiknya akses keluar dan masuk desa yang kemudian mendukung kelancaran arus distribusi pangan bagi masyarakat.

“cadangan pangan di desa dalam bentuk lumbung pangan belum ada. Untuk cadangan pangan beras saya stok sendiri di rumah, cukup untuk sebulan ke depan. Karena saya tidak punya sawah maka cadangan pangan beras tersebut saya beli dari toko di sekitar desa ini kan ada beberapa jumlahnya.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“untuk kebutuhan beras sehari-hari saya tidak membeli di toko, karena sudah ada hasil panen sendiri dari sawah saya yang ikut program SRI. Kelebihan hasil panennya saya simpan untuk stok kebutuhan keluarga saya di rumah. Kalo untuk kebutuhan pangan lainnya seperti sayur-sayuran sebagian saya tanam di pekarangan, sebagian lagi saya beli dari pedagang sayur keliling.” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

Progsi demapan memberi dampak dalam peningkatan kemampuan daya beli dan akses pangan rumah tangga. Perguliran dana bantuan PMUK dalam progsi demapan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses bantuan permodalan pengembangan usaha.

“Di sini (masyarakatnya) berkebun semua. Pendamping dulu pernah memberikan penyuluhan tentang budidaya tanaman pangan, tapi di sini masyarakatnya biasa budidaya perkebunan, kalo nggak sawit ya karet. Lahan di sini sudah nggak ada yang ndak ditanami sawit atau karet, nggak ada sisanya. Orang itu pinjam untuk beli pupuk, rondap. Usaha selain perkebunan di sini tempe ada 2 titik, tahu 1 titik, ada juga yang ternak ayam.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“Usaha saya adalah produksi tempe, ilmunya saya dapatkan dari pengalaman sendiri, dulu di Jawa saya sudah biasa membuat tempe. Lalu di desa ini saya coba membuat tempe juga. Saya menjualnya di dalam desa ini saja kepada masyarakat. Satu hari biasanya terjual sekitar 4-5 kilo. Untuk modal beli kedelai saya pinjam dari dana PMUK. Saya membungkusnya dengan daun, tidak dengan plastik karena berdasarkan pengalaman tempe yang dibungkus dengan daun rasanya lebih enak dibanding yang dibungkus dengan plastik.” (Sarijo, anggota kelompok Makmur, wawancara 13 Mei 2014).

Pemasaran hasil usaha yang menjadi sumber pendapatan masyarakat tidak mengalami kendala karena sudah terbentuk jaringan pemasaran, meski jaringan tersebut tidak dibentuk secara terkoordinasi melalui progsi demapan. Jaringan tersebut diusahakan oleh masyarakat itu sendiri.

“hasil kebun karet dan kelapa sawit kami sudah ada yang pasti akan membelinya yaitu para tengkulak yang juga merupakan penduduk desa ini. Mereka membeli hasil panen kami untuk kemudian dijual kepada perusahaan pengolahan hasil perkebunan. Kami sudah ada langganan tengkulak masing-masing, jadi kami tidak kebingungan untuk mencari pembeli hasil panen kebun. Hal tersebut kami lakukan sendiri-sendiri, tidak melalui koordinasi dengan lembaga di progsi demapan seperti TPD atau LKD.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

“saya mencoba usaha beternak ayam potong, sudah saya siapkan kandangnya, tinggal menghubungi pihak PT. Unggas Bersama untuk memberikan bantuan bibit dan pakannya. Di desa ini sudah ada beberapa masyarakat yang menjalankan usaha ternak ini, cukup berhasil, karena untuk pemeliharaan ternak seperti suntik vitamin dan obat-obatan pun disediakan dan dilakukan oleh petugas dari PT tersebut. Nanti saat panen mereka juga yang akan membelinya, jadi kerjasama masyarakat dengan PT tersebut adalah sistem bagi hasil.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Pemasaran hasil usaha yang lancar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya. Progsi demapan yang dilaksanakan di desa Pangkalan Satu sebagai program pemberdayaan masyarakat memberi dukungan bagi masyarakat dalam mengakses permodalan melalui dana bantuan PMUK sehingga mereka dapat melakukan usaha-usaha produktif sebagai sumber pendapatan. Hal tersebut pada gilirannya akan berdampak pada kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli sehingga ketahanan pangan rumah tangga dapat dicapai.

“progsi demapan di desa Pangkalan Satu ini sangat membantu masyarakat dalam peminjaman dana bantuan. Untuk meminjam kami tidak perlu memberikan jaminan. Kami hanya perlu membuat RUK dan surat perjanjian sebagai syarat peminjaman. Pembuatannya pun dibantu oleh LKD dan TPD.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

“bagi anggota kelompok yang akan meminjam dana PMUK mereka harus menyusun RUK terlebih dahulu. Dari RUK itu kami selaku LKD mengetahui apa tujuan penggunaan dana yang akan dipinjam. Sebenarnya dalam pengisian RUK ini kan harus detail ya rinciannya, namun karena kondisi masyarakat di sini terbatas kualitas SDM nya jadi kami memodifikasi RUK agar lebih mudah dipahami oleh calon peminjam. Selain RUK anggota juga harus membuat surat perjanjian pinjaman. Hal ini merupakan bentuk kompensasi karena kami kan tidak mensyaratkan jaminan. Jadi cukup dengan surat perjanjian tersebut anggota kelompok sudah bisa meminjam. Tentunya setelah melalui verifikasi oleh TPD dan diketahui oleh kepala desa.” (Jarwanto, ketua LKD, wawancara wawancara 21 Juni 2014).

“kami selaku TPD tentu tidak bisa memberikan pinjaman begitu saja. Tugas TPD adalah memferivikasi RUK calon peminjam. Tujuannya adalah demi kelancaran perguliran dana PMUK yang ada. Dana ini kan sifatnya dana abadi, dan setiap anggota berhak untuk dapat memanfaatkannya. Tugas kami selaku TPD adalah memastikan agar perguliran dana tersebut lancar, tidak ada yang macet di anggota. Kami perlu memferivikasi calon peminjam apakah usulannya layak dan apakah besaran pinjaman sesuai dengan profil kemampuannya. Kemudian setelah kami verifikasi pun RUK tersebut akan dikoordinasikan dengan kepala desa untuk diketahui beliau.” (Kasno, pengurus TPD, wawancara 11 Mei 2014).

Sebagai program dengan pendekatan pemberdayaan, progsi demapan telah dapat memberi hasil yang positif bagi peningkatan kemandirian masyarakat desa Pangkalan Satu dengan cara memberikan akses modal usaha bagi masyarakat melalui peminjaman dana bantuan PMUK. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Korten (1992) bahwa pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian masyarakat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal masyarakat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

B. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Satu sebagai Hasil dari Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Proses pemberdayaan masyarakat di desa Pangkalan Satu sebagai hasil dari program aksi demapan sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti akan mengkaji dari 3 aspek yaitu : 1) Pendampingan; 2) Peran Kelembagaan Masyarakat; 3) Pemanfaatan PMUK.

1. Pendampingan

Proses pemberdayaan dalam progsi demapan dilakukan melalui upaya pendampingan masyarakat kelompok sasaran kegiatan. Beberapa indikator untuk menilai berhasil tidaknya proses pendampingan antara lain dapat dilihat dari : (1)

adanya kemajuan sumber pendapatan; (2) peningkatan daya beli; (3) peningkatan ketahanan pangan rumah tangga; (4) peningkatan pola pikir; (5) peningkatan keterampilan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dokumen diketahui terdapat kemajuan sumber pendapatan yang cukup berarti pada masyarakat desa Pangkalan Satu. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya prosentase angka kemiskinan dari 36,5% pada tahun 2008 menjadi 17,63%. Penurunan angka kemiskinan ini didasarkan pada penurunan jumlah penduduk yang menerima program raskin. Sebagian besar masyarakat desa Pangkalan Satu memiliki matapencaharian di bidang perkebunan. Dalam hal pemasaran hasil produk usaha masyarakat tidak mengalami kendala yang cukup berarti, karena telah memiliki jalur pemasaran yang jelas.

“hasil kebun karet dan kelapa sawit kami sudah ada yang pasti akan membelinya yaitu para tengkulak yang juga merupakan penduduk desa ini. Mereka membeli hasil panen kami untuk kemudian dijual kepada perusahaan pengolahan hasil perkebunan. Kami sudah ada langganan tengkulak masing-masing, jadi kami tidak kebingungan untuk mencari pembeli hasil panen kebun. Hal tersebut kami lakukan sendiri-sendiri, tidak melalui koordinasi dengan lembaga di progsi demapan seperti TPD atau LKD.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

“saya mencoba usaha beternak ayam potong, sudah saya siapkan kandangnya, tinggal menghubungi pihak PT. Unggas Bersama untuk memberikan bantuan bibit dan pakannya. Di desa ini sudah ada beberapa masyarakat yang menjalankan usaha ternak ini, cukup berhasil, karena untuk pemeliharaan ternak seperti suntik vitamin dan obat-obatan pun disediakan dan dilakukan oleh petugas dari PT tersebut. Nanti saat panen mereka juga yang akan membelinya, jadi kerjasama masyarakat dengan PT tersebut adalah sistem bagi hasil.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

Adanya kemajuan sumber pendapatan ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya beli dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga yang dikatakan berhasil adalah dari subsistem distribusi dan akses pangan. Hal ini didukung oleh kondisi infrastruktur jalan yang cukup baik untuk keluar dan masuk desa. Kondisi infrastruktur yang baik kemudian mendukung ketahanan pangan rumah tangga pada subsistem ketersediaan, yaitu bahwa di desa Pangkalan Satu telah banyak dijumpai toko-toko yang menjual kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan.

“untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saya biasanya beli di toko sembako di desa ini kan sudah ada. Karena saya tidak punya sawah maka untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok saya membeli dari toko sembako yang ada. Untuk pangan lain seperti sayur, saya coba memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di samping rumah, sebagian lain beli dari pedagang sayur keliling.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“untuk kebutuhan beras sehari-hari saya tidak membeli di toko, karena sudah ada hasil panen sendiri dari sawah saya yang ikut program SRI. Kelebihan hasil panennya saya simpan untuk stok kebutuhan keluarga saya di rumah. Kalo untuk kebutuhan pangan lainnya seperti sayur-sayuran sebagian saya tanam di pekarangan, sebagian lagi saya beli dari pedagang sayur keliling.” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

Ketiga indikator tersebut di atas, yaitu adanya kemajuan sumber pendapatan, adanya peningkatan daya beli, dan adanya peningkatan ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat cukup berhasil. Namun keberhasilan ini lebih disebabkan oleh dukungan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat. Sementara upaya pendampingan dalam progsi demapan belum dilaksanakan secara maksimal. Fungsi pendampingan pada dasarnya adalah untuk membantu meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses pendampingan yang baik akan menghasilkan peningkatan pola

pikir dan peningkatan keterampilan masyarakat. Yang terjadi di desa Pangkalan Satu adalah masyarakat menganggap upaya pendampingan dalam progsi demapan selama ini hanya terbatas pada pertemuan rutin kelompok setiap bulannya dan hanya dilakukan oleh pendamping saja.

“pendampingan menurut saya masih kurang. Selama ini pengaruh pendampingan menurut saya di kelompok ya cuman untuk pengarahan, arisan, ngecek perguliran dana, setelah itu ya sudah, selesai, pulang. Kami pengarahan ya kami diarahkan untuk nanam tanaman kayak jagung, singkong. Cuman ya sebatas diarahkan nanam saja. Kan akan sangat bagus kalo ada pelatihan, kayak di kelompok kami ini kan banyak ibu-ibu. Coba misalkan diadakan pelatihan praktek bagaimana cara membuat panganan kayak bikin kue dari singkong, emping singkong, keripik singkong, emping melinjo. Lalu kami diarahkan ke mana untuk menjual panganan itu. Kalo begitu kan bagus untuk kami dapat keterampilan yang baru, bisa untuk menambah pendapatan. Atau praktek bikin kerajinan misalnya nyongket atau menjahit gitu, bikin taplak atau kerajinan lainnya, lalu dijual” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“saya selama ikut jadi anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera belum pernah mendapat penyuluhan dari penyuluh desa yaitu Pak Jumarno. Tapi selain di demapan ini saya juga ikut jadi anggota kelompok gapoktan. Kan di desa ini ada program SRI mulai tahun 2006, saya diajari melalui sekolah lapangan dalam kegiatan gapoktan ini tentang bagaimana cara budidaya padi dengan sistem SRI. Dengan sistem SRI ini kami diajari bagaimana cara menanam padi, membuat MOL, dan pemanfaatan serangga predator sebagai musuh alami hama yang menyerang tanaman padi oleh bapak penyuluh. Setiap bulan saya pasti sekolah di situ sama Pak Jumarno. Cuman kalo melalui kegiatan pertemuan rutin kelompok, memang tidak pernah ada penyuluhan.” (Fatimah, anggota kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

“anggota kelompok karya sejahtera ini kan banyak ibu-ibu mbak. Kalo seumpama kita ada diajak ikut pelatihan misalkan kayak diajari bagaimana membuat panganan dari bahan lokal gitu ya kami sangat setuju. Kan bisa menambah keterampilan kami para ibu-ibu anggota kelompok. Kami bisa jadi lebih kreatif, terus seumpama peluangnya bagus kan bisa jadi modal untuk nambah pendapatan. (Romdiah, anggota kelompok Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

Dalam rangka mendukung pendayagunaan bantuan modal usaha dan pembangunan prasarana perdesaan maka dalam progsi demapan disiapkan

penyediaan tenaga yang bertugas mendampingi kelompok masyarakat agar menjadi suatu masyarakat dalam kebersamaan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan. Pendamping bertugas sebagai pemandu (fasilitator), penghubung (komunikator), penggerak (dinamissator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan usaha kelompok.

Dalam pelaksanaannya, kelancaran dan keberhasilan program ditentukan oleh : (1) peran serta kelompok masyarakat sebagai kelompok sasaran dan sekaligus pelaksana; (2) dukungan segenap aparat pemerintah di pusat dan daerah; (3) pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yang secara khusus bertugas untuk mendampingi kelompok masyarakat; (4) berbagai pihak yang peduli pada pemberdayaan masyarakat.

2. Peran Kelembagaan Masyarakat

a. Kelompok Afinitas

Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pangkalan Satu dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok. Program Aksi Demapan menggabungkan kelompok masyarakat sasaran dalam kelompok-kelompok afinitas. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam program aksi Desa Mandiri Pangan di desa Pangkalan Satu dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok karena jika secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu.

Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Friedman (1993), proses pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Upaya pemberdayaan masyarakat adalah lebih efisien jika masyarakat tersebut digabung dalam kelompok.

Namun dalam pelaksanaan pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat tidak menjalankan usahanya dalam bentuk usaha bersama / kelompok.

“Anggota kelompok afinitas dalam mengembangkan usahanya dilakukan masing-masing, tidak dalam bentuk usaha bersama. Mereka lebih memilih seperti itu karena jika usahanya dibentuk dalam kelompok mereka merasa lebih repot karena harus mengatur waktu serta keterbatasan dalam memahami manajemen kelompok.” (Mujiono, bendahara LKD, wawancara 03 Juni 2014).

“Kalo untuk usaha bersama (kelompok) belum ada. Dulu kan bertani, pinjam sama kantor desa lebihan tanah, nanam jagung, nanam kacang, akhirnya tekor juga. Pinjam dari PMUK sekian, nggak kembali, soalnya tanahnya pasir melulu disini, kurang subur. Dua minggu sekali royongan, bersihkan, nyangkul. Sudah berjalan beberapa tahun nanam, tapi ya tekor, modal nggak kembali.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“kalo diarahkan untuk membuat usaha kelompok bareng-bareng ya pernah, kami menanam tanaman pangan waktu itu. Cuman karena tidak berhasil panennya ya sudah nggak tidak dilanjutkan lagi.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

b. Tim Pangan Desa (TPD)

Menurut Jafar Hafsah (2008), salah satu masalah pokok yang berkaitan dengan kemiskinan yang terjadi di pedesaan adalah partisipasi masyarakat yang minim dalam usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkorelasi positif dengan keberhasilan pembangunan ekonomi, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan pemerataan yang semakin baik. Peran masyarakat yang aktif akan menumbuhkan potensi daerah, sehingga dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, sikap bertanggung jawab, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula halnya pembaruan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pembangunan kelembagaan yang terutama adalah kelembagaan perdesaan.

TPD dibentuk dengan tujuan sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat desa. Keberhasilan pemberdayaan progsi demapan ditandai dengan aktifnya peran TPD dengan kegiatan yaitu : (1) melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat; (2) memantau dan melaporkan masalah pangan kepada aparat desa/pokja menyusun rencana tindak lanjut; (3) memantau dan melanjutkan kegiatan progsi demapan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Dengan *output* yaitu : (1) tumbuhnya kader

pangan desa; (2) tumbuhnya usaha produktif di masyarakat; (3) terwujudnya cadangan pangan tingkat rumah tangga dan masyarakat.

Usaha-usaha produktif masyarakat desa Pangkalan Satu cukup beragam, dalam jenis *on farm*, *off farm*, dan *non farm*. Tumbuhnya usaha produktif di masyarakat tersebut lebih disebabkan oleh dukungan akses sarana dan prasarana yang memadai, seperti akses jalan, dan adanya lembaga-lembaga lain di luar progsi demapan seperti gapoktan yang turut membantu mengembangkan usaha produktif yang ada. Peran TPD dalam progsi demapan dalam upaya mendukung tumbuhnya usaha produktif di masyarakat lebih kepada peran administratif, yaitu menjaga dan mengarahkan masyarakat dalam hal penggunaan dana bantuan PMUK yang dilakukan pada pertemuan rutin kelompok. Itu pun tidak dijalankan secara kontinu, terutama pada tahap kemandirian tahun kedua yaitu pada tahun 2012.

“Anggota kelompok selain setoran, pinjaman dan angsuran, pembahasan lain yang dibicarakan (penyuluhan/pembinaan) ya ndak ada. Ya cuman, angsuran, arisan, diam. Kalo TPD, LKD ndak ada siapa yang bicarakan? Penyuluh ndak ada. Ya cuman menjalankan uangnya itu aja, rutin itu aja. Bicara sama siapa. Kalo dulu kan ada sistem orang tua, sekarangkan ndak ada. Ibaratnya anak sama orangtua kan dulu ada yang mimpin, sekarang sudah ndak ada. Seharusnya kan ada (perwakilan dari desa, TPD, atau LKD) 1 orang datang ke pertemuan. Satu tahun kemaren sama sekali nggak ada. Dari desa kan banyak, sudah dibagi-bagi (tugasnya) tapi ini ndak ada yang datang. Harusnya ada dari desa itu 1 orangkah, umpama ada kegiatan (di desa) apa kan tau anggota itu.”

Desa Pangkalan Satu pada tahun 2012 secara jadwal memang telah memasuki tahun kemandirian dimana posisi pendamping seharusnya telah dapat digantikan oleh peran TPD. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata TPD belum benar-benar memahami tugasnya bukan semata-mata membantu LKD dalam

mengelola perguliran dana bantuan PMUK, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa tersebut.

“kami selaku TPD tentu tidak bisa memberikan pinjaman begitu saja. Tugas TPD adalah memverifikasi RUK calon peminjam. Tujuannya adalah demi kelancaran perguliran dana PMUK yang ada. Dana ini kan sifatnya dana abadi, dan setiap anggota berhak untuk dapat memanfaatkannya. Tugas kami selaku TPD adalah memastikan agar perguliran dana tersebut lancar, tidak ada yang macet di anggota. Kami perlu memverifikasi calon peminjam apakah usulannya layak dan apakah besaran pinjaman sesuai dengan profil kemampuannya. Kemudian setelah kami verifikasi pun RUK tersebut akan dikoordinasikan dengan kepala desa untuk diketahui beliau.” (Kasno, pengurus TPD, wawancara 11 Mei 2014).

Hal ini tentu dapat dipahami karena sejak awal dilaksanakannya progsi demapan di desa Pangkalan Satu belum pernah sekalipun dilakukan pelatihan bagi pengurus TPD.

“Tahun 2008 sampai dengan 2013 saya sebagai pengurus TPD belum pernah mengikuti pelatihan progsi demapan. Pada tahun 2014 ini pun dalam tugas saya sebagai bendahara LKD, saya belum pernah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai anggota tim penggerak ketahanan pangan dalam progsi demapan ini.” (Mujiono, bendahara LKD, wawancara 03 Juni 2014).

“Pelatihan bagi pengurus kelompok, pengurus LKD, serta pengurus TPD memang sangat jarang dilakukan. Pada tahun 2011 diadakan satu kali pelatihan yaitu bagi pengurus LKD oleh BKP Provinsi di Palangkaraya, namun materi pelatihan tidak sesuai dengan kondisi desa Pangkalan Satu.” (Amrul Hasani, aparat ketahanan pangan, wawancara 13 Juni 2014).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang perlu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994). Tidak adanya pelatihan bagi pengurus TPD yang merupakan cara untuk membuka wawasan dan pemahamannya sebagai motor penggerak pembangunan ketahanan pangan berimbas pada keterbatasan lembaga ini dalam menjalankan

tugas dan fungsinya untuk membina masyarakat kelompok afinitas dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan.



Gambar 4.21. Pembinaan TPD kepada masyarakat kelompok afinitas dilakukan melalui pertemuan rutin kelompok dengan materi pembinaan seputar administrasi pengelolaan dana bantuan PMUK (didokumentasikan oleh peneliti pada tanggal 13 April 2014 saat pertemuan rutin kelompok di rumah ketua kelompok afinitas Makmur)

c. Lembaga Keuangan Desa (LKD)

Program aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat yang merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan melalui program aksi Desa Mandiri Pangan adalah suatu program yang didesain dengan pendekatan partisipatif dan informatif dengan menyediakan dana langsung bagi masyarakat melalui lembaga layanan modal yaitu Lembaga Keuangan Desa (LKD). LKD berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang dibentuk dalam program aksi desa mandiri pangan untuk mempersiapkan embrio lembaga yang mengelola keuangan di perdesaan. LKD

ditumbuhkan oleh perwakilan kelompok-kelompok afinitas yang berfungsi untuk mengelola dana bansos Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), simpanan modal/tabungan masyarakat, dan layanan permodalan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok afinitas untuk pengembangan usaha produktif.

Dalam hal menjalankan perannya sebagai lembaga layanan modal bagi masyarakat, fungsi LKD sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya dana bantuan PMUK yang dimanfaatkan oleh masyarakat kelompok afinitas sebagai modal pengembangan usaha.

Tabel 4.18. Perkembangan Keuangan Demapan Desa Pangkalan Satu sampai dengan Desember 2013

No	Nama Kelompok	Jumlah Tabungan (Rp)	Sumber Dana PMUK		Infak/Jasa Pinjaman (Rp)	Total Aset (Rp)
			APBN (Rp)	APBD I (Rp)		
1	Sumber Rejeki					
2	Tali Rasa					
3	Makmur					
4	Karya Sejahtera					
	Total	27.452.000	100.000.000	0	61.013.000	188.465.000
	Biaya Operasional (Rp) tahun 2013					4.000.000
	Jumlah Bersih (Rp)					184.465.000
	Surplus / Defisit (Rp)					84.465.000
	Persentase (%)					84,46

sumber data : Laporan Progsi Demapan Desa P.Satu tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jasa pinjaman dari perguliran PMUK juga mempunyai andil yang cukup besar dalam penambahan modal LKD. Sampai dengan akhir tahun 2013 jasa yang dihimpun sudah mencapai Rp.84.465.000,-. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan keuangan yang dikelola.

Proses pemberdayaan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi LKD antara lain yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat dalam merancang,

melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Bantuan yang didasarkan pada pendekatan ideal hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan cara ini program menjadi lebih terarah. Syarat yang harus dipenuhi adalah kejelasan mengenai kriteria pengalokasian dan langkah-langkah untuk menjangkau sasaran. Berdasarkan pendekatan ini, perencanaan alokasi bantuan ditentukan sendiri oleh masyarakat.

“dalam proses peminjaman dana PMUK anggota kelompok terlebih dahulu membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) kemudian dilengkapi dengan perjanjian pinjaman anggota kelompok kepada pendamping, ketua TPD, dan ketua LKD dengan diketahui oleh kepala desa. Setelah kami verifikasi barulah dana PMUK tersebut diberikan kepada anggota.” (Jarwanto, Ketua LKD, wawancara 21 Juni 2014).

Perencanaan alokasi bantuan PMUK melalui pembuatan RUK oleh masyarakat itu sendiri dalam proksi demapan ini merupakan pola pendekatan *inner resources approach*, sesuai dengan konsep mengenai pola pendekatan pemberdayaan menurut Ross (1987) bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan pola pendekatan yang dianggap paling efektif adalah pola yang menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah atau lembaga-lembaga lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola *inner resources approach* ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Peran LKD dalam pengembangan dan pelestarian bantuan adalah : pertama, mempersiapkan terciptanya akses atau kesempatan bagi masyarakat dalam

memperoleh bantuan. Kedua, mempersiapkan masyarakat lapisan bawah untuk dapat mendayagunakan bantuan tersebut sehingga dapat menjadi modal bagi kegiatan usaha. Ketiga, menanamkan pengertian bahwa bantuan yang diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari surplus yang diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi ini berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. Dalam pelaksanaannya upaya peningkatan kualitas SDM pengurus LKD itu sendiri masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kuantitas pelatihan yang diselenggarakan bagi pengurus LKD.

“Selama saya menjadi pengurus LKD dalam program demapan ini baru sekali saja mengikuti pelatihan, yaitu pelatihan yang diadakan oleh BKP Propinsi di Palangkaraya tahun 2011. Tapi sayangnya pelatihan itu menurut saya tidak sesuai dengan kondisi di Pangkalan Satu ini. Pada tahun 2011 kan desa ini sudah memasuki tahun keempat, tahap kemandirian. Sementara materi pelatihan yang saya ikuti itu adalah tentang persiapan bagi desa-desa calon penerima program demapan.” (Jarwanto, ketua LKD, wawancara 21 Juni 2014).

“Pelatihan bagi pengurus kelompok, pengurus LKD, serta pengurus TPD memang sangat jarang dilakukan. Pada tahun 2011 diadakan satu kali pelatihan yaitu bagi pengurus LKD oleh BKP Provinsi di Palangkaraya, namun materi pelatihan tidak sesuai dengan kondisi desa Pangkalan Satu.” (Amrul Hasani, aparat ketahanan pangan, wawancara 13 Juni 2014).

Hal ini tentu berdampak pada kualitas layanan sebagai lembaga permodalan yang membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, baik di bidang *on farm*, *off farm*, maupun *non farm*.

“anggota LKD ini sebenarnya ada 6(enam) orang, namun yang aktif melakukan tugasnya hanya 3 (tiga) orang saja, yaitu saya selaku ketua, sekretaris dan bendahara. 3 (tiga) anggota lainnya tidak, karena bingung juga apa yang mau dikerjakan kurang jelas tugasnya.” (Jarwanto, ketua LKD, wawancara wawancara 21 Juni 2014).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa belum semua anggota LKD yang benar-benar memahami peran lembaganya. Tidak berfungsinya peran anggota seksi *on farm*, *off farm*, dan *non farm* tersebut berakibat pada upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha pertanian dan non pertanian tidak berjalan maksimal. Dari hasil observasi peneliti terhadap dokumen RUK anggota kelompok, terdapat berbagai macam jenis usaha yang diusulkan, baik dari *on farm*, *off farm*, dan *non farm*. Seperti bercocok tanam sayur-sayuran, pembuatan batu bata, beternak ayam, berdagang, usaha pembuatan emping melinjo, kerupuk, tahu dan tempe. Peran LKD belum sampai kepada upaya membantu anggota kelompok dalam menganalisis potensi usaha yang dilakukan untuk dapat dikembangkan lebih jauh dengan memanfaatkan bantuan dana PMUK yang dipinjamkan. Kurangnya pemahaman pengurus LKD kemudian berdampak pada menurunnya tingkat keaktifan lembaga layanan modal ini pada tahap kemandirian lanjutan dalam mengelola perguliran dana PMUK yang ditandai minimnya kehadiran pengurus LKD dalam pertemuan rutin kelompok-kelompok afinitas. Sehingga sistem perguliran dana yang awalnya sudah dikelola dengan sistem satu pintu kemudian berubah menjadi pengelolaan keuangan di kelompok masing-masing. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memonitoring jumlah dana bansos PMUK yang berkembang. Namun demikian usaha untuk mengembalikan sistem pengelolaan keuangan kembali menjadi satu pintu sudah dilakukan melalui arahan dari pendamping

kabupaten. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kembali fungsi LKD yang sempat tidak aktif dan agar perguliran dana bantuan PMUK dapat kembali terarah bagi masyarakat kelompok afinitas yang memerlukan melalui mekanisme awal yaitu pembuatan RUK dan surat perjanjian pinjaman.

3. Pemanfaatan PMUK

Pemerintah pada tahun 2009 melalui alokasi dana APBN mengucurkan dana PMUK sebesar Rp.100.000.000,-. Dana ini oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok afinitas dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif. Jika dilihat dari perkembangan modal LKD Karya Mandiri seperti pada tabel 4.18 sampai dengan akhir tahun 2013 cukup mengalami peningkatan yang signifikan.

LKD Karya Mandiri hanya melakukan kegiatan usaha simpan pinjam untuk keperluan anggota. Dari usaha simpan pinjam inilah diharapkan dapat membantu anggota dalam menambah modal usaha, menghidupkan kegiatan ekonomi anggota dan dari jasa pembayaran anggota dapat menambah permodalan bagi keuangan LKD. Modal usaha yang ada di LKD bersumber dari dana APBN dan simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan anggota. Modal yang dikelola selanjutnya dimanfaatkan oleh kelompok untuk meningkatkan modal usaha kelompok di bidang pertanian, pengolahan hasil, perkebunan, dan peternakan.

“Di sini (masyarakatnya) berkebun semua. Pendamping dulu pernah memberikan penyuluhan tentang budidaya tanaman pangan, tapi di sini masyarakatnya biasa budidaya perkebunan, kalo nggak sawit ya karet. Lahan di sini sudah nggak ada yang ndak ditanami sawit atau karet, nggak ada sisanya. Orang itu pinjam untuk beli pupuk, rondap. Usaha selain perkebunan di sini tempe ada 2 titik, tahu 1 titik, ada juga yang ternak ayam.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“Usaha saya adalah produksi tempe, ilmunya saya dapatkan dari pengalaman sendiri, dulu di Jawa saya sudah biasa membuat tempe. Lalu di desa ini saya coba membuat tempe juga. Saya menjualnya di dalam desa ini saja kepada masyarakat. Satu hari biasanya terjual sekitar 4-5 kilo. Untuk modal beli kedelai saya pinjam dari dana PMUK. Saya membungkusnya dengan daun, tidak dengan plastik karena berdasarkan pengalaman tempe yang dibungkus dengan daun rasanya lebih enak dibanding yang dibungkus dengan plastik.” (Sarijo, anggota kelompok Makmur, wawancara 13 Mei 2014).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut : pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Proksi demapan dalam pemberdayaan masyarakat desa Pangkalan Satu dalam hal pemanfaatan dana PMUK dapat dikatakan sudah cukup baik pelaksanaannya. Dana yang dialokasikan kepada masyarakat desa telah digunakan secara bergulir. Dana tersebut tetap ada hingga memasuki tahap kemandirian lanjutan dan digunakan untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa. Upaya pemberdayaan

melalui pemanfaatan dana PMUK bagi masyarakat ini sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) yaitu bahwa dalam upaya pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*) antara lain melalui ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan usaha bukanlah pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama melainkan dilakukan secara individu per individu oleh anggota kelompok afinitas.

“Anggota kelompok afinitas dalam mengembangkan usahanya dilakukan masing-masing, tidak dalam bentuk usaha bersama. Mereka lebih memilih seperti itu karena jika usahanya dibentuk dalam kelompok mereka merasa lebih repot karena harus mengatur waktu serta keterbatasan dalam memahami manajemen kelompok.” (Mujiono, bendahara LKD, wawancara 03 Juni 2014).

“Kalo untuk usaha bersama (kelompok) belum ada. Dulu kan bertani, pinjam sama kantor desa lebihan tanah, nanam jagung, nanam kacang, akhirnya tekor juga. Pinjam dari PMUK sekian, nggak kembali, soalnya tanahnya pasir melulu disini, kurang subur. Dua minggu sekali royongan, bersihkan, nyangkul. Sudah berjalan beberapa tahun nanam, tapi ya tekor, modal nggak kembali.” (Damis, bendahara kelompok Makmur, wawancara 24 April 2014).

“kalo diarahkan untuk membuat usaha kelompok bareng-bareng ya pernah, kami menanam tanaman pangan waktu itu. Cuman karena tidak berhasil panennya ya sudah nggak tidak dilanjutkan lagi.” (Sarikin, ketua kelompok afinitas Sumber Rejeki, wawancara 11 Mei 2014).

Pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Hal ini sesuai dengan

konsep pemberdayaan menurut Friedman (1993), bahwa kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Upaya pemberdayaan masyarakat adalah lebih efisien jika masyarakat tersebut digabung dalam kelompok. Dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam, diketahui tidak ada bentuk usaha bersama dari keempat kelompok afinitas di desa Pangkalan Satu. Perguliran dana dilakukan kepada individu per individu anggota kelompok. Sementara sistem yang diterapkan dalam perguliran dana adalah sistem tanggung renteng yang pada dasarnya dibuat demi kelancaran proses perguliran dana. Namun karena bentuk peminjaman dana modal usahanya tidak dengan pendekatan usaha kelompok maka hal ini mengakibatkan proses perguliran dana menjadi tidak lancar. Jika ada salah satu anggota yang belum bisa melunasi pinjaman maka anggota kelompok lain belum boleh meminjam. Peminjaman baru bisa dilakukan jika anggota yang meminjam sudah melunasi pinjaman sebelumnya. Hal ini seperti dinyatakan oleh informan berikut.

“di kelompok Karya Sejahtera ini kalau ada yang masih nunggak pinjamannya, anggota lain ya terpaksa belum boleh pinjam dulu. Karena kami kan menggunakan sistem tanggung renteng. Jadi kalo ada yang nunggak ya saya sebagai pengurus kelompok harus mengopyak-opyak anggota untuk segera melunasi pinjamannya supaya perguliran dananya lancar, anggota yang lain bisa gantian pinjam.” (Lisa, sekretaris kelompok afinitas Karya Sejahtera, wawancara 14 Mei 2014).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian seperti yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan di desa Pangkalan Satu secara konteks sudah tepat sasaran yaitu desa rawan pangan dengan jumlah penduduk miskin setidaknya 30% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin di Desa Pangkalan Satu pada tahun awal program terdapat sebanyak 36,5%. Pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan secara input sudah cukup baik, hal ini dilihat dari dipenuhinya unsur-unsur input dalam program berupa pedoman umum / pedoman teknis, pendamping, kelembagaan (kelompok afinitas, Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa), dan dana PMUK sebagai dana bergulir bagi anggota kelompok afinitas sebagai kelompok sasaran kegiatan. Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan secara proses dalam upaya mewujudkan desa tersebut menjadi desa yang mandiri pangan sudah cukup baik dengan catatan bahwa belum semua subsistem ketahanan pangan yang tercapai. Desa ini disebut sebagai desa yang mandiri pangan jika dilihat dari subsistem ketersediaan dan akses distribusi pangan. Setiap tahapan yang dijadwalkan dalam program ini sudah dilaksanakan sesuai prosedur yaitu mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Program Aksi Desa Mandiri Pangan di desa Pangkalan Satu secara dampak dapat disimpulkan sudah cukup baik

pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah rumah tangga miskin menjadi 17,63% pada tahun tahap kemandirian. Penurunan prosentase angka rumah tangga miskin tersebut lebih disebabkan karena adanya bantuan akses dana bantuan PMUK bagi masyarakat desa khususnya yang tergabung menjadi anggota kelompok afinitas.

- 2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan masih belum efektif. Upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dirasa masih minim. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pelatihan yang rendah bagi setiap komponen pelaksana program seperti pendamping, TPD, LKD, kelompok afinitas, dan aparat kabupaten. Selain itu program aksi desa mandiri pangan dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pangkalan Satu belum dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan peran lembaga-lembaga lintas sektor terkait. Hal ini dapat dipahami karena tidak adanya pemahaman yang sama antar komponen pelaksana program dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Upaya pendampingan sebagai wadah pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keberdayaan selama ini hanya dilakukan oleh pendamping, belum ada koordinasi dan sinergi dengan lembaga lintas sektor terkait yang ada di desa tersebut seperti lembaga penyuluhan, lembaga layanan kesehatan, dan pokja PKK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi SKPD teknis kegiatan perlu melakukan pengawalan yang lebih intens terhadap pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan dalam pemberdayaan masyarakat desa Pangkalan Satu. Dalam melaksanakan tugasnya TPD yang berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ternyata hanya menjalankan perannya sebagai pengarah urusan administrasi pengelolaan dana bantuan PMUK. Sementara fungsi LKD juga baru sampai pada memberi layanan modal, belum sampai pada membantu kelompok afinitas untuk melakukan analisa potensi usaha. Upaya pendampingan selama ini hanya mengandalkan peran pendamping saja dan terus berlanjut hingga saat ini ketika tugas pendamping dilanjutkan oleh pendamping kabupaten. Dengan kemampuan yang terbatas maka komponen pelaksana program tersebut juga akan sulit melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat propinsi. Dengan kapasitas individu yang baik, disertai dengan penyegaran secara berkala, tentu hal ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi komponen pelaksana program tersebut dalam menjalankan perannya masing-masing.
- 2) Tujuan program aksi desa mandiri pangan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga melalui pemberdayaan masyarakat hanya dapat tercapai jika melibatkan peran serta

lintas sektor terkait. Perlu dilakukan upaya koordinasi mulai dari tingkat kabupaten dalam hal ini oleh instansi pengelola kegiatan yaitu P2KP dengan mengajak peran serta instansi teknis terkait. Di tingkat desa perlu dilakukan koordinasi dengan lembaga penyuluhan dari berbagai lembaga pelayanan yang ada dalam upaya transfer ilmu pengetahuan bagi anggota kelompok, mengingat partisipasi lembaga layanan penyuluhan desa juga belum optimal dalam program desa mandiri pangan. Dalam memberikan akses layanan modal program aksi desa mandiri pangan selama ini hanya mengandalkan alokasi dana APBN sebesar Rp.100 juta. Dalam upaya pengembangan usaha masyarakat tentu diperlukan dukungan modal usaha yang lebih besar lagi. Hal ini salah satunya adalah melalui sharing dana APBD I atau APBD II dari pemerintah daerah provinsi atau dari pemerintah kabupaten. Adanya sharing dana tersebut pada akhirnya akan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2011). *Pedoman Teknis Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2011*. Jakarta : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Anonim. (2012). *Laporan Akhir Perkembangan Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2013*. Kotawaringin Barat : KPPKP.
- Anonim. (2012). *Pedoman Umum Desa Mandiri Pangan TA 2012*. Jakarta : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Dunn, N William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Bartle, Phill. (2002). *Participatory Method of Measuring Empowerment*. Modul Pelatihan Pemberdayaan.
- Biggs, John B. and Ross Telfer. (1987). *The Process of Learning*. Australia : Prentice Hall of Australia Pty LTD.
- Bogdan, Robert C., and Sari Knopp Biklen. (1998). *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods*. 3rd ed. Allyn and Bacon.
- Bungin Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Chambers, Robert. (1995). *Rural Appraisal, Rapid, Rilex and Participatory*. Terjemahan Y. Sukoco. Yogyakarta : Yayasan Mitra Tani.
- Dahl, Robert. (1992). *Democracy and Its Critics*. New Haven Conn : Yale University Press.
- Indonesia, LANRI. (2004). *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi Kedua*. Jakarta : LAN.
- Friedman, John. (1992). *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Massachusetts : MIT Press.
- Hulme, David dan M. Turner. (1990). *Sociology of Development : Theories, Policies and Practices*. Hertfordshire : Harvester Whearsheaf.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat : Sebuah Tinjauan Administrasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administtrasi. Universitas Brawijaya, Malang, 27 Mei.

- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1997). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3S.
- Kosasih, Husein. (2004). *Teknik Pengukuran dan evaluasi Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama*. Modul Diklat AKIP/LAKIP. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Administrasi, Departemen Agama RI.
- Kieffer, C.H. (1984). *The Emergence of Empowerment : The Development of Participatory Competence Among Individuals in Organizations*. Unpublished PhD dissertation : University of Michigan. Ann Arbor.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Korten, David C dan Sjahrir. (1992). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Marzuki. (2002). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Paul, Samuel. (1987). *Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience*. Washington DC : The World Bank.
- Prijono, Onny S. Dan Pranarka A.M.W. (ed.). (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Moleong. Lexy. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Setiawan, Beni. (1999). *Agenda Pendidikan Nasional*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media.
- Siagian, Sondang. (1970). *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sudjana. (2006). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Bandung : Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Djudju . (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta : Rosdakarya.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : Widya Karya.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soetrisno, Loekman. (2005). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin Abdul Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin. (2007). *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, cetakan ketiga*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul, dkk. (2002). *Masa Depan Otonomi Daerah*. Malang : Percetakan SIC.
- Wisadirana, Darsono. (2004). *Sosiologi Pedesaan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Lampiran 1 :

Pedoman Wawancara

A. Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.	
1.	Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam hal <i>context (C)</i> / konteks
	a. Pelaksanaan survey DDRT sebagai langkah pengumpulan data untuk mengetahui kondisi dan potensi desa dan masyarakat calon penerima manfaat proksi demapan
2.	Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam hal <i>input (I)</i> / input
	a. Adanya fasilitator (pendamping) b. Adanya lembaga Tim Pangan Desa (TPD) c. Adanya Lembaga Keuangan Desa (LKD) d. Adanya bantuan dana bergulir (PMUK)
3.	Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam hal <i>process (P)</i> / proses
	a. Pelaksanaan tahap persiapan (seleksi lokasi, sosialisasi program, pendampingan, penyusunan DDRT, pelatihan, pemberdayaan kelompok afinitas) b. Pelaksanaan tahap penumbuhan (penumbuhan kelembagaan aparat, penguatan kelembagaan masyarakat kelompok afinitas, penguatan modal usaha, harmonisasi sistem ketahanan pangan) c. Pelaksanaan tahap pengembangan d. Pelaksanaan tahap kemandirian
4.	Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam hal <i>product (P)</i> / hasil
	a. Peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang dimiliki kelompok atau perorangan b. Perkembangan ketersediaan pangan masyarakat c. Peningkatan kemampuan daya beli dan akses pangan rumah tangga
B. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Satu sebagai Hasil dari Program Aksi Desa Mandiri Pangan	
1.	Pendampingan
	a. Adanya kemajuan sumber pendapatan b. Peningkatan daya beli c. Peningkatan ketahanan pangan rumah tangga d. Peningkatan pola pikir e. Peningkatan keterampilan masyarakat
2.	Peran Kelembagaan Masyarakat
	a. Kelompok afinitas b. Tim Pangan Desa (TPD) c. Lembaga Keuangan Desa (LKD)
3.	Pemanfaatan dana bantuan PMUK
	a. Tersalurnya dana bansos untuk usaha produktif b. Meningkatnya usaha produktif

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian



BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 300 / 05 / Kasbang.III / 2014

- a. Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.
- b. Menimbang : Surat dari Sdri. **NOVPRIDA AULINA PASARIBU**, Nomor : Lepas Tanggal Maret 2014 Perihal Permohonan Izin Penelitian Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kotawaringin Barat, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Objek : **NOVPRIDA AULINA PASARIBU**
- b. Jabatan/Tempat/ Identitas : Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Palangka Raya NIM 018788199
- c. Untuk : 1. Melakukan Pengumpulan Data Penelitian untuk Keperluan Penyusunan Tugas Akhir dengan Proposal berjudul "**PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**"
2. Lokasi Penelitian : di Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai Kab.Kotawaringin Barat
3. Waktu / Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan, Dari Tanggal 26 Maret 2014 s/d 26 Juni 2014
4. Bidang Ekonomi

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.



Pangkalan Bun, 26 Maret 2014

KEPALA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

H. MUDELAN, S. Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19600215 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng di P.Raya ;
2. Bupati Kotawaringin Barat di P.Bun ;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kobar di P.Bun ;
4. Camat Kumai di Kumai;
5. Kepala Desa Pangkalan Satu di P.Bun ;
6. Ketua BPD Desa Pangkalan Satu di P. Bun ;
7. Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya di P. Raya ;
8. Mahasiswa Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Biodata

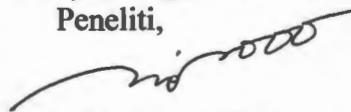
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NASIONAL PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. (021) 7415050, Fax. (021) 7415588

BIODATA

Nama : **NOVPRIDA AULINA PASARIBU**
NIM : **018788199**
Tempat dan Tanggal Lahir : **KUALA KAPUAS, 23 NOVEMBER 1984**
Jenis Kelamin : **WANITA**
Alamat Rumah dan Telp. : **Jl. JENDERAL SUDIRMAN GANG NAGA 2
RT.11 NO.63 KELURAHAN SIDOREJO,
PANGKALAN BUN**
No. HP. : **085225213225**
Alamat Email : **novprida.map@gmail.com**
Riwayat Pendidikan : - SDN Sidorejo 2 Tahun 1991
- SLTP Negeri I Arut Selatan Tahun 1997
- SMU Negeri 5 Palangka Raya Tahun 2000
- Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2002
Riwayat Pekerjaan : - Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Tahun 2008 - 2011
- Pelaksana Seksi Ketahanan Pangan Kantor
Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tahun 2011 - sekarang
Prestasi atau Penghargaan yang pernah diraih : -

Palangka Raya, Agustus 2014
Peneliti,


Novprida Aulina Pasaribu